KOMPILASI SISTEM PENDIDIKAN ANTAR BENUA

CV. PENA JAYA PERS
AHU-0013523-AH.01.14 TAHUN 2023



HENDRI GUNAWAN, PEBRI HASTUTI, JANUARDI, DEPI PRAMIKA,
CHANDRA KURNIAWAN, FAHMI ASHARI S. SIHALOHO,
SYAMSUL ARIFIN, AHMAD NABILUL MARAM

PESMA

AN-NUR

Kompilasi Sistem Pendidikan Antar Benua

Hendri Gunawan, Pebri Hastuti, Januardi, Depi Pramika, Chandra Kurniawan, Fahmi Ashari S. Sihaloho, Syamsul Arifin, Ahmad Nabilul Maram

Kompilasi Sistem Pendidikan Antar Benua

Hendri Gunawan, Pebri Hastuti, Januardi, Depi Pramika, Chandra Kurniawan, Fahmi Ashari S. Sihaloho, Syamsul Arifin, Ahmad Nabilul Maram

CV. PENA JAYA PERS

AHU-0013525-AH.01.14 TAHUN 2023

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Pena Jaya Pers

ISBN: 978-623-09-8375-7
ix + 259 hal; 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Februari 2024

Penulis	**: Hendri Gunawan, Pebri Hastuti, Januardi, Depi Pramika, Chandra Kurniawan, Fahmi Ashari S. Sihaloho, Syamsul Arifin, Ahmad Nabilul Maram**
Editor	**: Ahmad Nabilul Maram**
Desain Sampul	**: Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.**
Layouter	**: Ahmad Nabilul Maram**

Diterbitkan oleh:

Pena Jaya Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2023
No. 387/JTI/2023
Perum IKIP C-92 Gunung Anyar - Surabaya
penajayapers@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR viii

SISTEM PENDIDIKAN AUSTRALIA 1

A. Latar Belakang 1

B. Jenjang Pendidikan Dan Kurikulum 4

C. Peran penting pendidikan pada perekonomian Australia 16

D. Staf Pengajar 19

E. Anggaran Biaya Pendidikan Negara 21

SISTEM PENDIDIKAN SINGAPURA 27

A. Latar Belakang 27

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum 31

C. Staf Pengajar 54

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara 60

C. Sistem Pendidikan dan Pembelajaran 63

SISTEM PENDIDIKAN BELANDA 67

A. Latar Belakang 67

B. Jenjang Pendidikan Dan Kurikulum 71

C. Staf Pengajar 87

D. Anggaran Biaya Pendidikan 90

E. Sistem Pengelolaan Pendidikan 91

SISTEM PENDIDIKAN KOREA SELATAN 95

A. Latar Belakang 95
B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum...................................... 97
C. Staf Pengajar 111
D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara....................................114
E. Sistem Pembelajaran 116
SISTEM PENDIDIKAN AMERIKA SERIKAT.................................121
A. Latar Belakang 121
B. Sejarah Pendidikan di Amerika..123
C. Politik Pendidikan Amerika..130
D. Penanggung Jawab Sistem Pendidikan 133
E. Sistem Pendidikan 134
F. Kurikulum...140
G. Guru/ Tenaga Kependidikan...144
H. Manajemen...145
SISTEM PENDIDIKAN REPUBLIK AFRIKA SELATAN.............158
A. Latar Belakang 158
B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum.....................................163
C. Staf Pengajar 168
D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara....................................169
E. Sistem Pembelajaran 172
SISTEM PENDIDIKAN MESIR...187
A. Latar Belakang 187
B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum.....................................189
C. Staf Pengajar 200

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara 202
E. Sistem Pendidikan dan Pembelajaran di Mesir 203
SISTEM PENDIDIKAN TURKI 208
A. Latar Belakang 208
B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum 210
C. Staf Pengajar 224
D. Pendidikan Non-Formal 234
E. Sistem Anggaran Pendidikan 237
DAFTAR RUJUKAN 246
BIOADATA PENULIS 256

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang atau kelompok masyarakat akan mengalami proses perubahan sikap dan perilaku di masa sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan sebagai upaya untuk menyadarkan seseorang agar memanusiakan manusia. Proses pendidikan yang terjadi di lembaga formal (sekolah) sebagai pelaksana amanah untuk ikut andil dan keberlangsungan proses pendidikan. Pendidikan merupakan tanggungjawab seluruh komponen (*stakeholder* yang relevan), bukan hanya sekolah sebagai penentu utama keberhasilan bagi peserta didik. Pendidikan formal yang dirasakan bagi anak peserta didik merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku seseorang disamping pengaruh dominan dari pendidikan keluarga dan pendidikan non formal (baca: masyarakat). Sistem pendidikan yang ada di suatu negara sangatlah menentukan aspek input, proses, lulusan dan outcome dari kegiatan tersebut.

Sebuah sistem pendidikan yang dijalankan di sebuah negara akan menjadi pegangan kebijakan bagi masyarakatnya untuk mengikuti proses pendidikan tersebut. Buku yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi (PE) FEB UM Angkatan 2022 ini merupakan perspektif system Pendidikan yang ada di dunia. Buku yang menggambarkan system Pendidikan berbagai negara yang ada di 5 benua (Australia, Afrika, Asia, USA dan Eropa) sangat

menginspirasi dan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang system Pendidikan dinegara lain. Dengan penggunaan kalimat yang sederhana dan penyajiannya yang ringkas dan sistematis tentang kurikulum, staf pengajar, anggaran biaya Pendidikan dan system pengelolaan Pendidikan, buku ini layak untuk jadi refrensi sebagai perbandingan sistem Pendidikan.

Malang, 5 Februari 2024

Kaprodi S3 PE FEB UM

Nasikh , S.E., M.P., M.Pd

AUSTRALIA



SISTEM PENDIDIKAN AUSTRALIA

A. Latar Belakang

Australia merupakan negara, yang memiliki banyak institusi politik, pendidikan dan budaya penting yang menyokong hidup masyarakatnya. Merupakan negara dengan masyarakat yang aktif dan dinamis, diantaranya yang terletak di pusat Australian Capital Territory (ACT). Kota ini menawarkan yang terbaik dari dua sisi, melalui perpaduan antara kehidupan kota modern dan pemandangan alam Australia yang mengesankan. Canberra adalah tempat tinggal yang aman dan telah dinobatkan oleh OECD sebagai ibukota paling aman di dunia termasuk sebagai tujuan pendidikan dunia.

Sistem Pendidikan di Australia berfokus pada pelajar dan didukung oleh prinsip-prinsip keunggulan, kesetaraan, kemudahan akses, perwakilan dan inklusi. Kesempatan-kesempatan pembelajaran bersifat inovatif dan berfokus pada masa depan, dengan penekanan pada kesejahteraan pelajar dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bermanfaat. Para pelajar disemangati untuk terus menimba ilmu sepanjang hidup, dan khususnya mengejar minat dan memperluas wawasan mereka sewaktu di kolese. Terdapat sekitar 90 Sekolah Pemerintah di ACT,

yang menyediakan pelajaran dari Preschool hingga Year 12. Sekolah menengah atas terhubung dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti Australian National University (ANU), the University of Canberra, Australian Catholic University, Australian Defence Force Academy and Canberra Institute of Technology.

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan

pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah pendidikan.

Australia yang menjadi tujuan pendidikan dunia pada akhirnya mendatangkan keuntungan bidang ekonomi bagi Negara tersebut. Dari informasi yang didapat pemasukan dari sektor pendidikan telah dianggap sebagai impor jasa terbaik ke- 3 di Australia dalam menghasilkan pendapatan negara dengan menunjukkan bahwa pendidikan internasional adalah senilai $19,9 miliar, menjadikannya ekspor terbesar ketiga Australia. Selain itu, diperkirakan 130.000 siswa internasional di Australia pada 2014-15 akan berkontribusi sebagai migran terampil di angkatan kerja Australia pada kelulusan, mewakili peningkatan 3 persen dalam proporsi Tenaga kerja Australia saat ini dengan pendidikan tersier. Pendidikan Australia adalah pasar layanan yang dinamis dan berkembang. Pada tahun 2016, Australia mendapat peringkat sebagai penyedia pendidikan terbesar ketiga untuk siswa internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya (UK). Maka pada penulis berkeinginan membahas sistem pendidikan di Australia yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem pendidikan di negara lain.

B. Jenjang Pendidikan Dan Kurikulum

1. JENJANG PENDIDIKAN

Sistem pendidikan di Australia berdasarkan informasi yang diperoleh dari *education.gov.au* adalah bahwa pendidikan formal di Australia memiliki empat sub-sektor yang luas:

a. Pendidikan Usia Dini

Peran pendidikan anak usia dini adalah memberikan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak, mempersiapkan diri anak-anak untuk sekolah, dan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi secara efektif di kemudian hari serta memberikan wawasan awal kesempatan belajar. Program pendidikan anak usia dini dilakukan di melalui program masyarakat, pra-sekolah dan tempat penitipan anak lainnya.

Melalui COAG, pendidikan dan pengembangan anak usia dini telah ditetapkan sebagai kebijakan prioritas selama lebih dari satu dekade di Australia. Reformasi anak usia dini Pemerintah Australia Agendanya sudah termasuk pengembangan dan pelaksanaan Pembelajaran Usia Dini Nasional Framework dan pengembangan Kerangka Mutu Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Car. Pemerintah Australia melalui departemen pendidikan juga telah membentuk Kemitraan Nasional untuk Anak Usia Dini Pribumi

Pengembangan dan Agenda Mutu Nasional Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini

Tingkat partisipasi pendidikan Australia pada usia empat tahun telah meningkat tajam sejak tahun 2005 (dari 53 per persen pada tahun 2005 menjadi 89 persen pada tahun 2016), mewakili peningkatan tertinggi keempat di OECD.

Tanggung jawab untuk penitipan anak dan pra-sekolah dibagi antara Australia, Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1) Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab kebijakan untuk pengasuhan formal (penitipan anak, keluarga penitipan anak, penitipan di luar jam sekolah, dan beberapa penitipan sesekali)
2) Pemerintah Australia mengelola subsidi biaya (Child Care Benefit), sebuah out-of-pocket subsidi (Rabat Pajak Pengasuhan Anak) dan memberikan sejumlah dana kepada Pemerintah Australia layanan yang disetujui untuk tujuan tertentu
3) Pemerintah Australia mengawasi sistem akreditasi yang berkualitas pada anak usia dini pendidikan dan mobil
4) Pemerintah Australia mendukung pra-sekolah khusus untuk penduduk asli Australia

5) Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah bertanggung jawab atas kebijakan dan pendanaan pra-sekolah.
6) Pendidikan pra-sekolah disampaikan dengan menggunakan berbagai model pendanaan dan pengiriman, termasuk ketentuan swasta
7) Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah bertanggung jawab atas beberapa pusat perawatan darurat. Beberapa
8) Pemerintah Negara Bagian dan Teritori berkontribusi secara finansial untuk perawatan di luar jam sekolah, lama penitipan anak dan layanan sejenis lainnya.

b. Sekolah dasar dan menengah

Ada sekitar 3.798.226 siswa terdaftar di sekolah-sekolah Australia pada tahun 2016 yang mewakili peningkatan sebesar 47.253 (1,3 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sekolah dasar dan menengah di Australia didanai pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintah Australia bertanggung jawab untuk:

1) mengalokasikan dana ke Negara Bagian dan Teritorial untuk mendukung penyampaian layanan dan reformasi yang harus dipenuhi hasil yang disepakati secara nasional

2) memastikan pengaturan pendanaan untuk sektor sekolah dan sekolah non-pemerintah konsisten dengan, dan mendukung, tanggung jawab Negara Bagian dan Wilayah di regulasi, kualitas pendidikan, kinerja dan pelaporan hasil pendidikan

3) memimpin keterlibatan internasional Australia dalam masalah pendidikan termasuk internasional program penilaian.

Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah bertanggung jawab atas pendanaan infrastruktur dan pemeliharaan pembayaran guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta administrasi dan manajemen semua sumber daya di sekolah.

Anak-anak wajib sudah mulai sekolah pada saat mereka menginjak usia enam tahun usia. Anak-anak pada umumnya bersekolah di sekolah dasar sampai mereka berusia 11 atau 12 tahun. Sekolah dasar menawarkan program dari Foundation (juga disebut sebagai taman kanak-kanak atau resepsi) hingga Kelas 6 atau 7 tergantung pada Negara Bagian atau Wilayah.

Sekolah dasar dan menengah Australia mengikuti kurikulum nasional. Informasi tentang Kurikulum Nasional Australia dapat ditemukan di Penilaian Kurikulum Australia dan Situs web Reporting Authority (ACARA) dapat ditemukan di http://www.acara.edu.au/.

ACARA juga punya pengawasan Program Pengkajian Nasional-Literasi Dan Numerasi (NAPLAN) yang dilakukan setiap tahun untuk siswa Kelas 3, 5, 7 dan 9. Informasi lebih lanjut tentang NAPLAN dapat ditemukan di http://www.nap.edu.au/ Siswa yang menyelesaikan program sekolah menengah pada Kelas 12 atau yang setara diberikan.

Sertifikat Pendidikan Menengah Atas (gelar kualifikasi sebenarnya dari Sekolah Menengah Atas Sertifikat bervariasi di Negara Bagian dan Wilayah yang berbeda). Mereka kemudian meninggalkan sekolah untuk melanjutkan kejuruan atau pendidikan tinggi dan/atau mulai bekerja. Program Sekolah (VET di Sekolah) dilakukan oleh siswa sekolah sebagai bagian dari Senior. Ini merupakan Sertifikat Pendidikan Menengah yang memberikan kredit menuju atau menyelesaikan yang diakui secara nasional. Kualifikasi VET dalam Kerangka Kualifikasi Australia (AQF). Pelatihan yang mahasiswa terima mencerminkan standar kompetensi industri tertentu dan disampaikan oleh pelatihan terdaftar organisasi (RTO) atau sekolah dalam kemitraan dengan RTO.

Tingkat penyelesaian pendidikan di Australia pada tahun 2016 (yaitu jumlah siswa sekolah yang memulai Tahun 7/8 dan menyelesaikan Tahun 12, dinyatakan sebagai persentase) adalah 80,9 persen untuk siswa laki-laki dan 87,8 persen untuk siswa perempuan.

c. Pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET)

Australia memiliki model VET yang inovatif. Pada 2015, Dewan Industri dan Keterampilan COAG (CISC) membentuk Komite Industri dan Keterampilan Australia (AISC) untuk memberikan industri peran yang lebih luas arah kebijakan dan pengambilan keputusan untuk sektor VET. AISC terdiri dari para pemimpin industri dan mengacu pada saran dari Komite Referensi Industri (IRC) yang terdiri dari perwakilan industri yang berpengalaman. Saran mereka memastikan pelatihan paket memenuhi kebutuhan pengusaha dan ekonomi modern. IRC didukung oleh keterampilan organisasi jasa (SSO). SSO adalah organisasi layanan profesional independen yang melakukan peninjauan dan pengembangan pekerjaan produk pelatihan atas nama AISC.

AISC memastikan bahwa paket pelatihan dikembangkan dengan standar kualitas yang disepakati dan sangat tinggi responsif terhadap kebutuhan keterampilan yang ada dan masa depan industri.

Kerangka Kualifikasi Australia (AQF) AQF adalah kebijakan yang disepakati para menteri Persemakmuran, Negara Bagian dan Wilayah untuk diatur kualifikasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan Australia. Salah satu tujuan utama dari AQF adalah untuk memfasilitasi jalur ke, dan melalui, kualifikasi formal. Kerangka ini memiliki 10 tingkat kualifikasi. Semua kualifikasi AQF

terjamin kualitasnya melalui proses regulasi nasional yang independen. Di sektor pendidikan tinggi, kualifikasi AQF diakreditasi baik oleh TEQSA, atau oleh penyedia pendidikan tinggi yang mengakreditasi sendiri seperti universitas. Kualifikasi yang diakreditasi oleh TEQSA dapat dapat ditemukan di Daftar Nasional di http://training.gov.au/ Di sektor VET, kualifikasi diakreditasi oleh ASQA, Registrasi Victoria dan Otoritas Kualifikasi (VRQA) atau Dewan Akreditasi Pelatihan Australia Barat (TAC) dan terdaftar di Daftar Nasional di http://training.gov.au/ Catatan: Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan, tujuan, pengaturan pengaturan dan pemantauan untuk AQF di http://www.aqf.edu.au

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi membutuhkan studi intensif selama beberapa tahun untuk mencapai kualifikasi tingkat tinggi yang diakui. Sebagian besar pendidikan tinggi berlangsung di universitas terakreditasi atau serupa lembaga tingkat tersier. Australia memiliki 43 universitas terdaftar. Daftar universitas ini adalah tersedia di National Register yang dapat ditemukan di http://www.teqsa.gov.au/national-register

Pemerintah Australia menyediakan dana publik untuk sektor pendidikan tinggi melalui Undang-Undang Dukungan Pendidikan Tinggi, 2003 (pembaruan reguler untuk Undang-Undang tersebut dapat ditemukan di

https://www.legislation.gov.au/Details/). Pemerintah menyediakan dana untuk universitas untuk berkontribusi pada biaya yang terkait dengan setiap siswa domestik yang terdaftar. Pada tahun 2015, 1.410.133 siswa domestik dan internasional terdaftar di perguruan tinggi Australia program pendidikan. Sekitar 25 persen adalah siswa internasional. Universitas negeri didirikan atau diakui berdasarkan undang-undang Negara Bagian dan Wilayah. TEQSA adalah regulator independen nasional untuk sektor pendidikan tinggi. TEQSA mendaftar dan menilai kinerja penyelenggara pendidikan tinggi terhadap Kerangka Standar Pendidikan Tinggi, dan melakukan penilaian kepatuhan dan kualitas penyedia. TEQSA bertanggung jawab untuk pendaftaran dan pendaftaran ulang penyelenggara serta akreditasi dan reakreditasi penyelenggara kursus.

Ciri penting lanskap pendidikan tinggi di Australia adalah proporsi yang besar dari pelajar internasional. Australia adalah tujuan utama bagi siswa dari seluruh dunia, menjadi tuan rumah 8 persen dari siswa luar negeri dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, siswa internasional mewakili sekitar 25 persen dari semua siswa terdaftar di universitas Australia. Agar siswa internasional dapat menerima visa untuk belajar Australia mereka harus ditawari masuk untuk belajar program di sebuah institusi di Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students

(CRICOS). Sebagian besar pelajar internasional yang terdaftar di Australia berasal dari kawasan Asia (lihat Tabel 2 di bawah). Namun, perbedaan yang signifikan terjadi pada sub-sektor yang dimiliki oleh siswa internasional ini terdaftar masuk Misalnya, mayoritas siswa Cina melakukan pendidikan Australia program terdaftar di pendidikan tinggi sementara siswa Thailand sebagian besar terdaftar di VET.

2. KURIKULUM

Kurikulum Nasional dan penilaian

Australia memiliki Kurikulum Nasional untuk sekolah yang dikembangkan secara progresif oleh Otoritas Kurikulum, Penilaian dan Pelaporan Australia (ACARA). ACARA didirikan berdasarkan Bagian 5 Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority Act (Cth) on 8 Desember 2008. Fungsi ACARA meliputi pengembangan Kurikulum Nasional, administrasi penilaian nasional dan pelaporan terkait tentang sekolah di Australia. strategis ACARA arah ditetapkan oleh Piagamnya dan instruksi tertulis lainnya dari Pendidikan COAG Dewan. Pekerjaan mereka meliputi pengenalan kerangka kurikulum dan hasil pembelajaran yang umum di semua sekolah, mulai dari Foundation (yaitu Taman Kanak-Kanak) hingga Kelas 12. Peluncuran Kurikulum Australia berstandar nasional dimulai pada tahun 2012.

Program Penilaian Nasional – Literasi dan Numerasi (NAPLAN) merupakan penilaian tahunan untuk siswa Kelas 3, 5, 7 dan 9. Dengan program :

1) NAPLAN menguji jenis keterampilan yang penting bagi setiap anak untuk berkembang di sekolah dan kehidupan, seperti membaca, menulis, mengeja dan berhitung. Penilaian dilakukan nasional, setiap tahun, pada minggu kedua bulan Mei
2) NAPLAN terdiri dari pengujian di empat area (atau 'domain'): membaca, menulis, Konvensi Bahasa (ejaan, tata bahasa, dan tanda baca), Berhitung
3) NAPLAN test keterampilan yang konsisten dengan kurikulum sekolah
4) Hasil NAPLAN 2016 menunjukkan bahwa hampir 94 persen anak telah memenuhi standar nasional standar minimum untuk usia/tahapan mereka.

Pendidikan dan pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Australia (Federal) dan Pemerintah Australia masing-masing Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah. Di bawah Konstitusi Persemakmuran, pendidikan di Australia terutama merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Dewan dari Pemerintah Australia (COAG) adalah puncak forum antar pemerintah di Australia. Ada

delapan Dewan yang mendukung COAG. Dewan menyediakan forum untuk kolaborasi antar pemerintah dan pengambilan keputusan dan memungkinkan untuk fokus pada prioritas utama nasional. Dua Dewan yang berhubungan untuk pendidikan Australia adalah Dewan Pendidikan dan Dewan Industri dan Keterampilan. Mekanisme akuntabilitas yang kuat dan transparan di semua sektor Pendidikan Australia memiliki serangkaian mekanisme akuntabilitas yang kuat dan transparan di semua bidang sektor pendidikan. Kepemimpinan nasional disediakan melalui badan hukum dan Negara dan Yurisdiksi wilayah. Badan pengatur utama dalam pendidikan termasuk Kualitas Pendidikan Tinggi Badan Standar (TEQSA); Otoritas Kualitas Keterampilan Australia (ASQA); dan orang Australia.

Badan Kualitas Pendidikan dan Perawatan Anak (ACECQA). Sistem yang sangat diprivatisasi Australia memiliki sistem pendidikan yang sangat diprivatisasi dibandingkan dengan negara lain. Itu proporsi investasi swasta (yang didanai non-pemerintah) di sekolah-sekolah Australia jauh lebih besar daripada di negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) lainnya (hampir 40 persen untuk Australia dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 16 persen; tahun 2016). Di Dalam hal pendaftaran siswa, pada tahun 2016 terdapat 3.798.226 siswa yang terdaftar di sekolah Australia. Proporsi siswa di sekolah

negeri 65,4 persen, sekolah Katolik 20,2 persen persen dan sekolah Mandiri 14,4 persen. Sebagian besar pendaftar pendidikan tinggi di 2016 (93 persen) berada di universitas negeri. Namun, menurut data terbaru, public pendanaan merupakan bagian yang relatif rendah dari pendanaan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ini khususnya kasus di pendidikan tinggi di mana dana swasta merupakan 58 persen dari keseluruhan pengeluaran, tertinggi kelima di OECD.

Biaya kuliah universitas tahunan juga tertinggi kelima di OECD. Sekitar 80 persen dari semua siswa domestik mengambil Sarjana, Magister dan gelar Doktor mengambil pinjaman mahasiswa untuk menyelesaikan studi mereka melalui Perguruan Tinggi Program Pinjaman Pendidikan (HECS-HELP). Informasi lebih lanjut tentang skema HECS-HELP dapat ditemukan di http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppaying myfees.

Di Australia, seperti di semua negara, model pembiayaan sistem pendidikan dan pelatihan adalah ruang yang diperebutkan secara ideologis. Namun, ada kesepakatan umum di antara pembuat kebijakan itu pendanaan publik dan swasta untuk pendidikan dan pelatihan Australia harus difokuskan pada peningkatan dan mempertahankan hasil yang dicapai oleh siswa di semua tingkatan, sehingga Australia memiliki

manusianya sumber daya untuk tetap kompetitif di dalam negeri, di dalam wilayah kita dan globall.

C. Peran penting pendidikan pada perekonomian Australia

Perdagangan jasa pendidikan Pelajar internasional Pendidikan internasional adalah ekspor terbesar ketiga Australia, senilai $19,9 miliar pada 2015-16. Sebagai Tabel 2 di atas menunjukkan, mayoritas pendaftaran siswa internasional dari 10 besar kebangsaan berasal dari kawasan sub-benua Asia/India. Namun, perbedaan yang signifikan terjadi dalam preferensi sub sektoral. Misalnya, pada 2016, 64 per persen siswa Cina yang mengikuti program pendidikan Australia terdaftar di perguruan tinggi pendidikan dan hanya 6 persen di VET. Dalam kasus siswa Thailand, 50 persen terdaftar di VET dan 8 persen terdaftar di program pendidikan tinggi, sementara 59 persen mahasiswa Malaysia terdaftar di pendidikan tinggi, dan 27 persen di VET.

Pentingnya pendidikan Australia bagi perekonomian Australia Kontribusi pendidikan internasional terhadap ekonomi Australia sangat signifikan. Berdasarkan informasi terbaru dari Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan bahwa pendidikan internasional adalah senilai $19,9 miliar, menjadikannya ekspor terbesar ketiga Australia. Selain itu, diperkirakan 130.000 siswa internasional di Australia pada 2014-15 akan berkontribusi sebagai

migran terampil di angkatan kerja Australia pada kelulusan, mewakili peningkatan 3 persen dalam proporsi Tenaga kerja Australia saat ini dengan pendidikan tersier. Pendidikan Australia adalah pasar layanan yang dinamis dan berkembang. Pada tahun 2016, Australia mendapat peringkat sebagai penyedia pendidikan terbesar ketiga untuk siswa internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya (UK).

Saat ini sekitar lima juta mahasiswa perguruan tinggi belajar di luar negara mereka sendiri. PBB Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi delapan juta pada tahun 2025. ABS memperkirakan pendidikan internasional bernilai rekor $21,8 miliar pada tahun 2016 – naik 17 persen pada tahun 2015. ABS juga memperkirakan sektor ini menyumbang lebih dari 130.000 pekerjaan ke Australia ekonomi. Selain itu, diperkirakan lebih dari 130.000 siswa sedang belajar di Australia kualifikasi lepas pantai, area sektor yang bernilai lebih dari $400 juta per tahun. Strategi Nasional Pemerintah Australia untuk Pendidikan Internasional 2025 (The National Strategy) yang dirilis pada tahun 2016

(https://internationaleducation.gov.au/Internationalnetwork/Australia/InternationalStrategy/Pages/National-Strategy.aspx), mengakui pentingnya ekspor layanan terbesar kami untuk kemakmuran ekonomi

masa depan kami. Ini juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas lembaga pendidikan Australia dan internasional pengalaman siswa, terutama yang berkaitan dengan kemampuan kerja, untuk melanjutkan pertumbuhan di sektor ini. Itu Strategi Nasional juga berbicara tentang pentingnya soft-power penting dari pendidikan internasional dibina melalui program mobilitas dua arah baik bagi mahasiswa maupun peneliti dan peran pengakuan kualifikasi dalam memfasilitasi mobilitas tenaga kerja global.

Strategi Nasional dibingkai di sekitar tiga pilar kebijakan utama:

1) memperkuat dasar-dasar sistem pendidikan kita untuk menghadirkan dunia yang berkualitas tinggi pendidikan kelas dan pengalaman siswa
2) membuat kemitraan transformatif baik di dalam maupun di luar negeri melalui inisiatif mobilitas dan koneksi alumni dan
3) bersaing secara global dengan mempromosikan keunggulan kami dalam layanan pendidikan dan menumbuhkan peluang untuk memperluas pasar pendidikan internasional kami

D. Staf Pengajar

a. Staf Pengajar

Australia memiliki guru-guru yang berkualitas baik dan melakukan upaya bersama untuk meningkatkan pengajaran di sekolah dan kepemimpinan. Pendirian Australian Institute of Teaching and School Leadership (AITSL). Tahun 2010 dirancang untuk memberikan kepemimpinan nasional di bidang ini. Profesional Australia.Standar untuk Guru juga dikembangkan pada tahun 2010 dan menetapkan keterampilan dan pengetahuan guru pada tahap karir yang berbeda diminta untuk menunjukkan. Standar Profesional Australia untuk

1. Kepala Sekolah dan Kemitraan Nasional untuk Peningkatan Mutu Guru (2009-13) juga telah melakukannya
2. berkontribusi pada peningkatan fokus pada kualitas guru dan perbaikan sekolah. Untuk lebih
3. informasi lihat website AITSL di https://www.aitsl.edu.au/

b. Gaji dan fasilitas lain

Institut Pengajaran dan Kepemimpinan Sekolah Australia (AITSL) didirikan oleh Pemerintah Australia untuk menyediakan kepemimpinan nasional dalam pengajaran dan kepemimpinan sekolah. AITSL

memainkan peran kunci dalam reformasi pendidikan nasional atas nama Australia, Negara Bagian dan Wilayah pemerintah di bawah arahan dari Menteri Pendidikan dan Pelatihan. Bidang utama AITSL yaitu fokus antara lain:

1) mendukung dan memajukan kualitas pengajaran dan kepemimpinan sekolah
2) pendekatan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru awal di perguruan tinggi Australia institusi pendidikan
3) melakukan penelitian dan evaluasi untuk menghasilkan publikasi dan sumber daya berkualitas tinggi untuk dukungan guru dan kepala sekolah dan
4) bertindak sebagai otoritas penilaian yang ditunjuk untuk migrasi terampil ke Australia untuk pekerjaan guru pendidikan pra-sekolah dasar, sekolah dasar, menengah, menengah dan luar biasa.

Gaji guru sangat bervariasi di berbagai negara. Di sebagian besar negara, gaji guru meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang mereka ajarkan. Perbedaan gaji antara guru sekolah dasar dan sekolah menengah atas yang memiliki pengalaman serupa di Finlandia, misalnya, adalah 55 persen, dan di Meksiko, 82

persen. persen. Namun, tidak demikian halnya di Australia yang selisih gajinya kurang dari 5 persen.

E. Anggaran Biaya Pendidikan Negara

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan tentang model pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan telah dilakukan di Parlemen Australia, dalam proses COAG, dan melalui tinjauan ekstensif Pendanaan pendidikan sekolah Pemerintah Australia, dipimpin oleh David Gonski. 'Ulasan Gonski' menghasilkan publikasi 2011, Undang-Undang Pendidikan Australia 2O13. Pada bulan Juni 2013, Parlemen Australia menyetujui Australian Education Act 2013. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Januari 2014, dan menyediakan kerangka kerja bagi pendanaan Persemakmuran disediakan ke sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut menguraikan pengaturan untuk pendanaan berulang untuk pemerintah dan sekolah non-pemerintah; pendanaan modal untuk sekolah non-pemerintah; dan syarat untuk pendanaan keadaan khusus.

Undang-undang juga menetapkan harapan untuk akuntabilitas pendanaan Persemakmuran dan komunitas sekolah. Undang-undang tersebut secara khusus memberikan wewenang kepada Menteri Pendidikan Federal dana untuk lembaga perwakilan sekolah non-pemerintah. Badan-badan ini mungkin termasuk asosiasi sekolah independen dan Komisi Pendidikan Katolik. Undang-Undang Amandemen

Pendidikan Australia 2017 Pada bulan Juni 2017, Parlemen Australia menyetujui Undang-Undang Amandemen Pendidikan Australia 2017 (bahasa sehari-hari dikenal sebagai reformasi Gonski 2.0). Undang-Undang Pendidikan Australia 2013 yang diamandemenkan memberikan dana tambahan sebesar $23,4 miliar untuk sekolah-sekolah Australia selama 10 tahun ke depan.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2023, dana Persemakmuran Australia untuk sekolah negeri akan meningkat dari rata-rata saat ini 17 persen menjadi 20 persen dan pendanaan untuk sekolah non-pemerintah akan tumbuh dari rata-rata 77 persen menjadi 80 persen. Jumlahnya didasarkan pada Sekolah Resource Standard (SRS), yang terdiri dari jumlah pendanaan per siswa (jumlah dasar) dan beban untuk memenuhi kebutuhan tambahan siswa dan sekolah yang kurang mampu. Ini memperhitungkan semua pendanaan Pemerintah Australia, pendanaan Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah, dan sebuah gagasan kontribusi per siswa oleh sekolah non-pemerintah yang diukur dengan 'kapasitas mereka untuk menyumbang'.

Pembiayaan pendidikan: pemerintah dan non pemerintah kontribusi Sebagaimana didefinisikan oleh ABS, 'pengeluaran pemerintah untuk pendidikan' mengacu pada pengeluaran oleh umum sektor pemerintah pada semua jenjang pendidikan, termasuk

pra-sekolah, dasar, menengah, universitas, dan Pendidikan Teknis dan Lanjutan (TAFE). Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak termasuk pengeluaran untuk kursus yang disediakan oleh lembaga non-pendidikan, seperti pelatihan kejuruan program bisnis swasta. Antara 2013-14 dan 2015-16, belanja pendidikan nasional di Australia meningkat dari sekitar $81.540 juta hingga sekitar $87.857 juta (lihat Tabel 3 di bawah). Publik pengeluaran untuk pendidikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) Australia adalah 4,7 persen, dibandingkan dengan rata-rata 4,8 persen untuk semua negara OECD. Pengeluaran publik pada pendidikan sebagai persentase dari total pengeluaran publik adalah 13,8 persen di Australia, dibandingkan dengan 11,3 persen di OECD.

Pengeluaran total Australia (publik dan swasta) untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi pendidikan sebagai persentase dari PDB adalah 5,6 persen, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata OECD 5,2 persen. Sekitar 30 persen pengeluaran publik dan swasta untuk pendidikan di Australia adalah melalui sumber swasta, dibandingkan dengan rata-rata 16 persen untuk semua negara OECD.

Pendanaan Persemakmuran untuk pendidikan turun sementara kontribusi negara bagian dan teritori untuk keseluruhan anggaran pendidikan meningkat. Untuk menempatkan angka-angka ini dalam konteks,

antara 2007-10, Gedung tersebut Inisiatif Revolusi Pendidikan dari 2007-10 melihat investasi sebesar $16,2 miliar dalam pendidikan infrastruktur oleh Pemerintah Australia sebagai respon stimulus ekonomi Global Krisis keuangan.

Pendanaan pendidikan: kontribusi rumah tangga ABS memberikan ringkasan singkat tentang pendanaan pendidikan di Australia, dan caranya kontribusi pemerintah dan rumah tangga berinteraksi. Dana penunjang fasilitas pendidikan dan penyelenggaraan layanan pendidikan bersumber dari berbagai sumber, terutama hibah dari Australia dan Negara Bagian dan Teritori Pemerintah. Pendanaan juga berasal dari penjualan barang dan jasa termasuk biaya dan biaya untuk biaya kuliah dan materi, yang sangat bervariasi dalam sektor pendidikan. Sumber lain dari dana dapat mencakup barang-barang seperti sumbangan atau pengembalian dari investasi.

1) Uang sekolah sekolah dasar dan menengah gratis di sekolah negeri di semua negara bagian dan Wilayah. Biaya dapat dikenakan untuk menyewa atau membeli peralatan pendidikan pribadi seperti buku teks atau perlengkapan seni, dan sekolah juga dapat meminta sumbangan sukarela dari orang tua. Sebagian besar sekolah non-pemerintah membebankan biaya yang dapat sangat bervariasi berdasarkan filosofi pendidikan

dan tingkat pendanaan pemerintah. Biaya tambahan mungkin dikenakan untuk buku pelajaran, bahan pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

2) Penyedia VET membebankan biaya kepada siswa untuk administrasi kursus, untuk biaya kuliah, materi atau untuk fasilitas siswa. Biaya ini bervariasi sesuai dengan jenis kursus dan durasinya, dan institusi yang menyediakan kursus. Untuk beberapa kursus, siswa membayar semua biaya mereka tanpa menerima subsidi pemerintah.

3) Institusi pendidikan tinggi dapat menerima hibah langsung dari pemerintah, tetapi juga menerima pendapatan dari siswa yang diminta untuk berkontribusi pada biaya pendidikan mereka melalui: HECS-HELP; biaya di muka; biaya siswa internasional; dan secara tidak langsung melalui beasiswa skema. Banyak fasilitas dan layanan dalam kampus didanai melalui biaya tambahan langsung atau melalui biaya layanan umum.

4) Kursus pendidikan orang dewasa dan komunitas (ACE) biasanya diberikan berdasarkan biaya, termasuk ketika disampaikan melalui institusi yang mungkin juga menawarkan VET formal, sekolah atau program pendidikan tinggi. Tingkat biaya untuk ACE dapat sangat bervariasi karena

keragaman kursus dan penyedia yang tersedia di sektor ini.


SINGAPURA

SISTEM PENDIDIKAN SINGAPURA

A. Latar Belakang

Republik Singapura merupakan negara Pulau yang berada di Semenanjung Malaya dengan luas 137 Km saat ini dihuni oleh sekitar 6 juta penduduk yang berasal dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Melayu, India dan Arab. Negara di bawah kepemimpinan **Halimah Yacob** mengandalkan sektor industri maupun jasa sebagai sumber penghasilan negaranya (Putri: 2022). Negara Singa ini juga tercatat pada tahun 2018 sebagai negara yang memperoleh peringkat kedua setelah RRC dalam rata-rata Skor PISA untuk ketiga Kategori yang diukur yaitu *Reading, Mathematics,*dan *Science* (Schleicher: 2019).

Sama halnya dengan negara-negara lain pada umumnya di dunia ini. Sistem Pendidikan di Singapura juga dikelola oleh Kementerian Pendidikan negara tersebut atau yang dikenal dengan *Ministry of Education (MOE) Singapore*. Kementerian ini mengelola dan mengontrol pengembangan hingga administrasi dari mulai sekolah negeri hingga sekolah swasta. Sistem pengembangan Pendidikan di Singapura memanfaatkan dana pajak yang dihimpun pemerintah dari masyarakat yang kemudian dialokasikan kurang lebih 20 persen dari anggaran tahunan negara tersebut (Cracknell, 1968).

Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan di Singapura adalah untuk mengeluarkan sisi terbaik dari setiap anak di Singapura, berusaha untuk mengasuh seluruh anak dan mengembangkan mereka menjadi pembelajar seumur hidup, dengan inti kompetensi yang bertahan untuk berkembang di abad 21, dengan berbagai jalur Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan di Singapura dalam mengembangkan kompetensi dan minat setiap siswa (SUN Education Group, 2014).

Sistem Pendidikan di negara tersebut menyediakan beragam pengalaman belajar bagi setiap siswa untuk membangun fondasi yang kuat dalam literasi dan numerasi. Selain itu, juga mereka memenuhi kebutuhan Pendidikan mereka secara holistik dalam pengambangan aspek fisik, estetika, moral, sosial dan emosional. Selain pembelajaran dari sisi akademik terdapat beberapa program untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di Singapura dengan beberapa program Pendidikan berikut:

1. Pengembang bakat dan minat siswa dalam bidang seni, musik, dan olahraga dalam sebuah program ko-kurikuler dan Pendidikan luar ruangan. Tujuan aktivitas kokurikuler dan Pendidikan luar ruangan ini adalah untuk mengasah keterampilan sosial-emosional serta keterampilan sebagai pemimpin.

2. Terdapat juga sistem Pendidikan kemasyarakatan dimana siswa dapat berkontribusi dalam aktivitas bermasyarakat melalui berbagai program yang disebut dengan *Values in Action Programme*. Program Pendidikan ini merupakan bagian integral dalam kegiatan sekolah yang memberikan pembelajaran terapan dimana siswa akan mampu untuk:
   a. *Learn by doing* (Belajar sambil melakukan);
   b. *Learn about the real world* (belajar tentang dunia nyata);
   c. *Learn for life* (belajar sepanjang hayat)
3. Sistem persekolahan juga menawarkan Pendidikan dan bimbingan karir untuk membantu para siswa dalam menemukan minat dan kompetensi yang mereka miliki kemudian memberikan alternatif pilihan kepada siswa untuk memilih jalur yang memungkinkan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.
4. Sistem Pendidikan di sekolah juga mengharuskan siswa untuk mampu menguasai dwibahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Ibu Resmi (Tamil, Melayu Inggris dan Mandarin). Hal ini memungkinkan mereka dapat terhubung satu sama lain yang memiliki latar belakang lingkungan multi-budaya dan juga mampu berkembang di dunia yang terglobalisasi dan beragam.

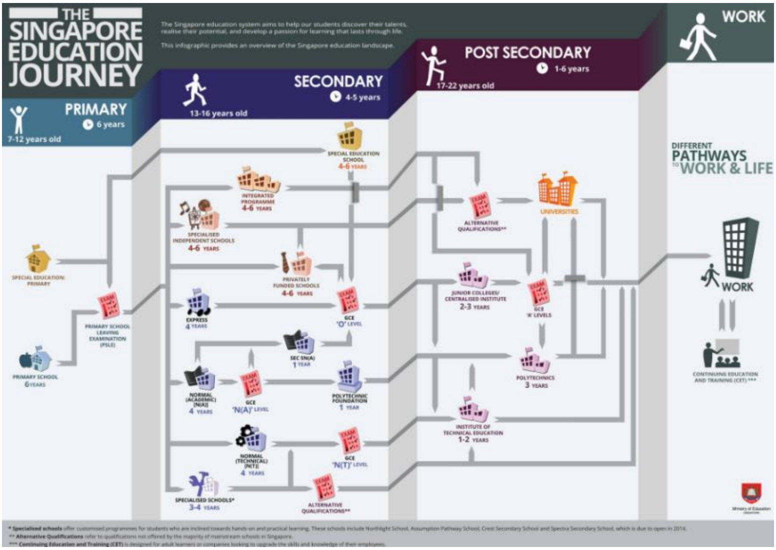
Semua rancangan sistem persekolahan ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan kualitas

Pendidikan siswa di Singapura. Kualitas Pendidikan yang dimaksud adalah kemampuan kreativitas, kolaborasi dan kasing sayang. Sistem Pendidikan ini juga secara konsisten memelihara "*The Joy of Learning*" dan mendorong "*entrepreneurial dare"* yang nantinya mampu mengembangkan motivasi intrinsik siswa dalam mengeksplorasi dan menemukan minat mereka serta mengejar hasrat mereka dalam belajar. Selain itu, sekolah juga menanamkan di dalamnya nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggungjawab, ketahanan, integritas, kepedulian dan harmoni. Dimana seluruh nilai-nilai tersebut dianggap sangat penting sebagai bekal siswa untuk hidup dalam masyarakat yang kohesif, multi-ras dan multi-budaya.

Tercapainya semua program tersebut tidak terlepas dari peran seorang guru. Pemerintahan Singapura sangat berkomitmen dalam membina dan memotivasi guru untuk tumbuh dan mencapai pribadi dan profesional terbaik mereka yang disesuaikan kepada aspirasi dan minat setiap guru. Setiap guru akan menerima pelatihan pra-jabatan yang cukup ketat dan berbasis bukti di *National Institute of Education*. Selain itu, Kerjasama dengan pihak orangtua dan masyarakat berperan dalam pengembangan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang peduli dan kondusif di sekolah, di rumah dan di masyarakat.

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum

Sedikit berbeda dengan sistem Pendidikan di Indonesia, jenjang Pendidikan di Singapura terbagi atas beberapa jenjang pendidikan. *Pertama*, Pendidikan Dasar (*Primary School*) yang ditempuh selama enam tahun untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya siswa diharuskan mengikuti ujian nasional tingkat sekolah dasar yang biasa nya disebut dengan *Primary School Leaving Examination (PSLE)*. *Kedua*, Setelah melewati ujian tersebut siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu Pendidikan Menengah (*Secondary School*). Pendidikan menengah yang setara dengan level SMP dan SMA di Indonesia yang harus ditempuh selama 4 tahun. Setelah menempuh pendidikan selama empat tahun siswa di Singapura harus mengikuti ujian akhir pendidikan N(A)-Level untuk pendidikan menengah untuk kelas normal untuk kemudian di terus pendidikan selamat 1 tahun setelahnya siswa mengikuti ujian nasional O-Level. *Ketiga*, setelah menyelesaikan pendidikan level menengah keilmuan siswa sudah spesifik sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka masing-masing. Siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi yang disebut *Junior Colleges, Institutes,* atau *Polytechnics.* Perjalanan sistem pendidikan anak-anak di Singapura dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar I. Peta Jenjang Pendidikan di Singapura

Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah siswa akan melanjutkan pendidikan pada Program *Pre*-University yang akan berlangsung selama 3 tahun dimana nanti siswa akan memperoleh sertifikat GCE A-Level (Yuni et al., 2022). Penjelasan lebih rinci mengenai sistem pendidikan dan bagaimana kurikulum yang berlaku di Singapura dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Pra Sekolah (*Pre School* atau *Nurturing Early Learner-NEL*)

Sebelum mengenyam pendidikan dasar siswa di Singapura dapat memulai pendidikannya pada level

taman kanak-kanak. Di level ini guru Bersama dengan orang tua akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka melalui enam jenis bidang pembelajaran antara lain:

a. Estetika dan Ekspresi Kreatif

Bidang ini akan memberikan kesempatan siswa untuk menikmati aktivitas seni, musik dan Gerakan (tari). Melalui bidang ini siswa akan tergali kemampuan berekspresi di bidang seni, menyalurkan ide dan perasaannya melalui instrumen seni yang ada.

b. Penemuan Dunia

Bidang penemuan dunia ini mengakomodir kemampuan siswa untuk menunjukkan minatnya pada daerah tempat mereka tinggal, kemudian mencari tahu hal-hal yang terjadi di sekitar mereka melalui penyelidikan sederhana. Selain itu, siswa juga diajak untuk mencari tahu bagaimana hal-hal yang ada disekitar lingkungan mereka dapat terjadi. Sisi positif yang dapat diambil lainnya adalah pada bidang ini siswa akan mampu mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

c. Bahasa dan Literasi

Bidang Bahasa dan literasi akan memancing kemampuan siswa untuk mengenal Bahasa ibu mereka pada tingkat dasar sehingga menimbulkan kesadaran

akan budaya etnik lokal. Kemudian, siswa akan diajarkan untuk menyampaikan makna dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, siswa juga diajak untuk mengkomunikasikan ide melalui gambar, simbol dan tulisan (ejaan konvensional dan yang diciptakan).

d. Pengembangan Keterampilan Motorik

Bidang pengembangan keterampilan motorik akan mengajarkan siswa untuk berpartisipasi secara fisik sehingga sistem kontrol, koordinasi dan keseimbangan motorik halus dan kasar siswa dapat dilatih. Lebih lanjut, siswa akan diajarkan untuk mengembangkan kebiasaan sehat dan kesadaran keselamatan di rumah dan di tempat umum.

e. Berhitung

Bidang berhitung akan mengajarkan siswa bagaimana mengenal pola dan hubungan angka sederhana serta mengenal dan menggunakan bentuk dasar dan konsep ruang dalam kehidupan sehari-hari

f. Perkembangan Sosial dan Emosional

Bidang perkembangan sosial akan mengajarkan siswa untuk mengetahui identitas diri, menunjukkan rasa hormat atas keragaman serta mampu berkomunikasi, berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara bidang emosional

mengajarkan siswa untuk mampu mengelola emosi dan bertanggungjawab atas perilaku mereka sendiri.

2. **Pendidikan Dasar (*Primary School*)**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pendidikan dasar akan ditempuh selama enam tahun dengan ujian akhir dengan *Primary School Leaving Examination (PSLE)*. Selama mengenyam pendidikan di sekolah dasar siswa akan diberikan beberapa mata pelajaran utama yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika, Sains, Seni, Musik, Pendidikan Olahraga, Pengetahuan Sosial, serta Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan. Untuk dapat mengetahui garis besar materi setiap mata pelajaran akan dijelaskan dalam uraian Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Uraian Mata Pelajaran dan Cakupan Materi Pendidikan Dasar

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
Kelas 1-6	Bahasa Inggris	Kompetensi yang diharapkan dari belajar Bahasa Inggris antara lain: 1. Menghargai, siswa mampu menghargai keragaman

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		dan mengadopsi sikap sosial yang disepakati. 2. Bertanggungjawab, dengan mencari informasi yang akurat, kredibel dan terkini dalam membuat keputusan. 3. Ketangguhan, melalui penilaian dan pembelajaran mandiri, kegigihan dalam mengejar pengetahuan dan pemahaman serta pertumbuhan pribadi 4. Integritas, melalui artikulasi prinsip etika dalam pertukaran informasi dan penyaluran ide-ide. 5. Kepedulian, melalui ekspresi empati dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		dalam berinteraksi di masyarakat. 6. Harmoni, melalui interaksi dan Kerjasama bermakna serta saling menghargai dengan orang lain untuk mencapai tujuan Bersama Cakupan Materi yang diajarkan dalam Bahasa Inggris yaitu Listening, Reading, Speaking, Writing,Grammar dan Vocabulary.
Di Semua kelas	Bahasa Ibu	Mata Pelajaran Bahasa Ibu disesuaikan dengan latar belakang budaya siswa. tersedia beberapa jenis Bahasa Ibu antara lain: 1. Bahasa Mandarin 2. Bahasa Melayu

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		3. Bahasa Tamil
Kelas 1-6	Matematika	Nilai-nilai inti dari pembelajaran Matematika, antara lain: 1. Siswa memperoleh konsep dan keterampilan matematika yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta pembelajaran berkelanjutan untuk jenjang berikutnya. 2. Siswa mampu mengembangkan pemikiran, penalaran, komunikasi, aplikasi, dan keterampilan metakognitif melalui pendekatan matematis dalam memecahkan masalah.

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		3. Membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan minat dalam matematika. Garis besar cakupan materi dalam pembelajaran matematika untuk pendidikan dasar dibagi menjadi dua tema besar yaitu angka dan aljabar serta pengukuran dan geometri
Kelas 3-6	Sains (IPA)	Nilai-nilai inti dalam pembelajaran sains antara lain; 1. Rasa ingin tahu, melalui penjelajahan lingkungan dan mempertanyakan apa yang ditemukan 2. Kreativitas, mencari cara yang inovatif dan relevan untuk memecahkan masalah

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		3. Integritas, menangani, dan mengkomunikasikan data dan informasi yang jujur. 4. Objektivitas, mencari data dan informasi untuk memvalidasi hasil pengamatan dan penjelasan tanpa bias. 5. Pemikiran yang terbuka, menerima segala pengetahuan sebagai sebuah penilaian yang sementara dan dapat ditunda, memahami adanya ambiguitas, sehingga mampu mengubah pandangan terhadap jika memang sudah terbukti meyakinkan 6. Ketangguhan, tidak mudah menyerah dalam memperoleh solusi, kemampuan mengambil

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		resiko dan mampu menerima kegagalan sebagai sebuah proses pembelajaran. 7. Bertanggungjawab, menunjukkan kepedulian terhadap makhluk hidup dan kesadaran untuk bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan. 8. Skeptisisme yang sehat, menanyakan hasil pengamatan, metode, proses, dan data serta meninjau hasilnya secara mandiri. Cakupan materi yang dipelajari antara lain 1. Keragaman makhluk hidup

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		2. Siklus kehidupan 3. Sistem hidup makhluk hidup 4. Pola interaksi 5. Energi
Kelas 1-6	Pendidikan Jasmani	Tujuan mata pelajaran Pendidikan Jasmani antara lain: 1. Mampu menampilkan berbagai Gerakan dalam berbagai aktivitas fisik 2. Mampu memahami dan menerapkan konsep gerak, prinsip dan strategi dalam berbagai aktivitas fisik 3. Mampu mendemonstrasikan praktik yang aman yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari berkaitan

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 4. Mampu menampilkan perilaku pribadi dan sosial yang positif 5. Mampu mempertahankan kebugaran melalui aktivitas fisik 6. Mampu menikmati manfaat dari hidup aktif secara fisik dan hidup sehat. Cakupan materi atau aktivitas yang dilakukan antara lain: 1. Atletik 2. Tari 3. Permainan dan olahraga 4. Senam 5. Pendidikan di luar kelas

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		6. Fitness dan Kesehatan fisik 7. Berenang
Kelas 1-6	Pendidikan Seni	Pendidikan seni terbagi atas dua muatan yaitu seni dan music 1. Mata pelajaran seni diajarkan seminggu sekali lebih dari 2 periode selama masa sekolah dengan durasi minimal 30 menit. Pendidikan seni di sekolah dasar memberikan landasan bagi siswa sekolah dasar untuk memahami seni sebagai cara belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. 2. Mata pelajaran musik itu bertujuan untuk

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		membangun kesadaran dan apresiasi terhadap music sebagai bagian dari budaya lokal dan global, membangun kemampuan untuk mengekspresikan kreativitas dan komunikasi melalui musik serta menyesiakan dasar untuk memmbangun kemampuan bermusik.
Kelas 1-6	Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan	Adapun tujuan dari mata pelajaran karakter dan pendidikan kewarganegaraan antara lain; 1. Membentuk karakter yang baik, seperti memiliki Kompas yang sehat dan kuas yang tentang benar dan salah, memiliki pemikiran yang etis dan kritis, bertanggungjawab atas pilihan yang diambil,

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		peduli terhadap orang lain dan berusaha untuk unggul. 2. Ketahanan dan kesejahteraan sosial dan emosional 3. Kesiapan masa depan 4. Kewarganegaraan yang aktif
Kelas 1-6	Pengetahuan Sosial (IPS)	Mata pelajaran ini membantu siswa untuk tumbuh dalam pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan mempelajari nilai-nilai melalui pengamatan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat dan dunia. Cakupan materi yang termasuk dalam mata pelajaran IPS antara lain:

Kelas	Mata Pelajaran	Nilai-nilai Inti dan Cakupan Materi
		1. Mengetahui mengenai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar 2. Kehidupan Bersama sebagai sebuah bangsa 3. Memahami singapura dan tantangannya 4. Memahami kehidupan di masa lalu 5. Memahami perkembangan Singapura sebagai sebuah bangsa 6. Memahami keragaman di Asia Tenggara dan keterhubungannya 7. Memahami fitur dan warisan peradaban

Sumber: Hasil Wawancara dan Website Resmi MOE Singapura

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi ***Ministry of Education Singapore*** melalui uraian

silabus untuk tiap jenjang pendidikan mulai dari Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, hingga Perguruan Tinggi didapatkan informasi bahwasanya pendidikan ekonomi di negara Singapura tidak sama seperti pola pendidikan ekonomi di Indonesia. Jika di Indonesia pendidikan ekonomi diperoleh melalui materi-materi yang ada di mata pelajaran IPS mulai dari sekolah menengah pertama hingga mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas. Sementara untuk Singapura pembelajaran ekonomi tidak dipelajari secara khusus seperti di Indonesia, melainkan pengenalan pembelajaran ekonomi melalui tema-tema pembelajaran yang termasuk dalam mata pelajaran *Humanities* yang di dalamnya terdapat materi mengenai *social studies*. Pengenalan materi ekonomi dijadikan sebagai sub bahasan pada *social studies.*

3. Pendidikan Menengah (*Secondary Education*)

Pendidikan menengah di Singapura dibuat dengan jalur kursus yang nantinya akan membentuk perjalanan pendidikan siswa selama sekolah menengah. Kursus tersebut terbagi atas tiga bagian yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat setiap siswa. Siswa yang memenuhi persyaratan dapat pindah antar kursus, atau mengambil pelajaran tertentu di tingkat yang lebih tinggi melalui banding yang berbasis mata pelajaran. Durasi pendidikan yang ditempuh yaitu sekitar empat tahun.

Berikut akan dijelaskan secara rinci bagaimana sistem kurikulum pada kursus-kursus tersebut:

a. Kursus Percepatan (*Express Course*)

Kursus ini dilaksanakan selama empat tahun dengan skor kelayakan kurus yaitu PSLE 4-22 yang nantinya akan mengarah pada ujian O-Level. Jika lulus dalam ujian ini maka siswa akan memperoleh Sertifikat Pendidikan Umum (*General Certificate of Education/GCE Sekunder-4*). Materi yang dipelajari dalam kursus ini antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika, Sains, Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan, Humaniora, Desain dan Teknologi. Edukasi Makanan dan Konsumen, Pendidikan Jasmani, Seni, Musik serta Pekerjaan Proyek. Sementara mata pelajaran wajibnya hanya Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika, Sains, dan Humaniora (IPS). Setelah tamat kursus ini siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada *Junior College, Millennia Institute, Polytechnic* atau *Institute of Technical Education (ITE).*

b. Kursus Akademik Normal (*Normal Academic Course /NA*)

Jangka pendidikan yang ditempuh pada kursus ini adalah 4 hingga 5 tahun dengan skor kelayakan kursus yaitu PLSE 21-25. Mata pelajaran wajib yang dipelajari dan yang ditawarkan sama dengan Kursus Percepatan. Sertifikat yang ditawarkan pada Kurus ini adalah GCE N(A)-Level untuk sekunder 4 atau GCE O-Lever untuk

sekunder 5. Setelah melewati 4 tahun Setelah N-Level ini siswa dapat melanjutkan pada Normal (Akademik) Sekunder 5, Politeknik, Program Nitec pada ITE atau Program Nitec Tinggi pada ITE. Sementara setelah melewati O-Level pada tahun ke-5 siswa dapat melanjutkan pada *Junior College, Millennia Institute, Polytechnic* atau *Institute of Technical Education (ITE).*

c. Kursus Normal Teknik (*Normal Technical Course*)

Sama seperti dua kursus sebelumnya Kursus Normal Teknik menawarkan sistem pendidikan selama 4 tahun dengan syarat kelayakan skor kursus 25-30. Mata pelajaran yang ditawarkan dalam kursus ini sama seperti kursus lainnya. Namun, sedikit berbeda dengan mata pelajaran wajib yang ditawarkan yaitu, Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika, Aplikasi Komputer dan Ilmu Sosial. Karena kursus ini dikhususkan untuk mempersiapkan siswa untuk masuk dalam Program Nitec pada ITE atau Kursus Normal (Akademik) Sekunder 5, jika memenuhi syarat. Sementara itu, sertifikat yang ditawarkan dalam kursus ini adalah GCE N(T)-Level (Sekunder 4), GCE N (A)-Level (Sekunder 4) untuk mata pelajaran yang ditawarkan di N(A)-Level, dan GCE O-Level (Sekunder 4) untuk mata pelajaran yang ditawarkan di O-Level.

4. Pendidikan Pasca Sekolah Menengah

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Siswa di Singapura dapat melanjutkan pendidikannya di berbagai lembaga pendidikan tinggi yang disediakan oleh MOE Singapura. Adapun beberapa lembaga pendidikan tersebut antara lain:

a. *Junior College* (JI) atau *Millennial Institute* (MI)

Pendidikan MI ini berupaya untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian A-Level atau Diploma *International Baccalaureate* (*IB*) di akhir tahun kedua pada pendidikan di JI dan akhir tahun ke tiga pada pendidikan di MI. setelah memperoleh sertifikat A-Level maka peserta didik akan dapat melanjutkan pembelajarannya pada sebuah Universitas, Politeknik atau Lembaga Seni.

b. Sekolah Olahraga Singapura (SSP), Sekolah Seni Singapura (SOTA)

SSP dan SOTA adalah sekolah yang independen yang mengkhususkan program pendidikannya pada olahraga dan seni. Adapun lulusan dari sekolah ini akan menerima *Diploma International Baccalaureate* (IB), Diploma Studi Bisnis atau Diploma Bisnis.

c. Politeknik

Sistem pendidikan pada politeknik ini berbasis praktik langsung di berbagai industry mitra sehingga

akan ada pengalaman belajar yang dirasakan langsung oleh siswa. adapun durasi praktik yang dilakukan siswa yaitu selama 6 minggu hingga 6 bulan, Lulusan dari Politeknik iniakan dapat melanjutkan pendidikan mereka pada Universitas, institute seni atau masuk ke dunia kerja. Politeknik ini juga menyediakan program di tingkat diploma, pasca-diploma, hingga pada studi kerja pasca diploma bagi siswa yang mau memperdalam ilmu mereka di bidang industri.

d. Institut Pendidikan Teknik (ITE)

Institut ini menyediakan pendidikan kejuruan dan teknis bagi siswa melalui kursus Nitec, Higher Nitec hingga Program Magang pada perusahaan mitra. Untuk dapat bergabung ke dalam program Nitec siswa harus memegang sertifikat N-Level. Sementara siswa dengan sertifikat O'Level dapat bergabung pada kursus *Higher Nitec*. Siswa dengan sertifikat N(A)-Menengah 4 akan dapat bergabung dalam program diploma politeknik. Lulusan dari ITE akan memperoleh sertifikat *Higher Nitec* atau Nitec. Setelah memperoleh sertifikat tersebut siswa dapat melanjutkan ke pendidikan di Politeknik yang lebih tinggi atau masuk ke dunia kerja.

e. LASSALLE, NAFA, Universitas Seni Singapura

LASALLE College of the Arts (LASALLE) dan Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) adalah perintis dari lembaga seni yang ada di Singapura yang

menawarkan berbagai gelar dan diploma dalam program Seni Visual dan Pertunjukan, seperti musik, tari, teater, desain interior dan desain busana. Lulusan dari pendidikan ini akan memperoleh gelar sarjana atau diploma tergantung pada studi masing-masing.

f. Lembaga Pendidikan yang Berafiliasi dengan Pemerintah

Kementerian Pendidikan di Singapura juga menyediakan program diploma, gelar, dan sertifikat pascasarjana khusus dibidang industri yang berafiliasi dengan pemerintah. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. *Building and Construction Authority Academy* (Akademi BCA) yaitu pendidikan yang menawarkan program diploma penuh waktu dalam bidang konstruksi, desain, teknik, seminar dan lokakarya.
2. Akademi Penerbangan Singapura (SAA)
3. Akademi IP (*Intellectual Property*) yaitu sistem pendidikan yang menyediakan program sarjana maupun pascasarjana dalam bidang kekayaan intelektual dan inovasi.

g. Universitas Otonom (*Autonomous University*) yaitu perguruan tinggi independent yang tidak berada di bawah naungan MOE Singapura yang menawarkan berbagai pilihan program akademik

hingga pada jalur gelar terapan seperti kedokteran, Ilmu Sosial dan Humaniora, Hukum, Sains dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Adapun yang perguruan tinggi yang menyediakan program tersebut adalah *Nanyang Technology University*, *National University of Singapore, Singapore Institute of Technology, Singapore Management University, Singapore University of Social Science, Singapore University of technology and Design.*

C. Staf Pengajar

Berdasarkan hasil wawancara via email dengan Bapak Muhammad Arif Rahman yang merupakan salah seorang guru MOE Singapura dengan pengalaman mengajar pada *Victoria School* sejak tahun 2013 menyatakan bahwa Secara umum sama, siapapun yang ingin menjadi guru untuk mengajar di sekolah lokal singapura harus memiliki kualifikasi mengajar (semacam akta 4) melalui national Institute of Education (NIE)/ seperti IKIP. Seseorang yang berminat menjadi staf pengajar di Sekolah Singapura terutama untuk menjadi guru yang berada di bawah naungan Kementerian Singapura akan diberikan sponsor biaya yang nantinya setelah selesai pendidikan akan dijadikan sebagai Guru MOE yang akan ditempat pada sekolah-sekolah lokal. Jika di Indonesia ini sama dengan seperti Guru PNS. Adapun para calon guru nantinya akan

mengikuti serangkaian proses penilaian yaitu pemeriksaan kesehatan, tes kemampuan masuk,wawancara, tes psikometri dan penilaian terkait serta tugas sekolah bagi pelamar yang tertentu).

Sementara untuk fasilitas yang akan didapatkan oleh guru di bawah naungan MOE Singapura menurut pernyataan Bapak Ari adalah bahwa para guru akan mendapat fasilitas dari MOE Singapura seperti Gaji pokok dan tunjangan bulanan, bonus performa setiap tahun (Tergantung peringkat performa kerja), gaji ke-13, bonus akhir tahun yang besarnya tergantung pada keuntungan ekonomi negara. Selanjutnya untuk rentangan gaji bulanan yang akan diperoleh guru di jelaskan lebih rinci pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

Tabel 2

Panduan gaji Guru MOE-Selama Pelatihan

Tingkat Pendidikan	**Gaji Bulanan (dalam S$)**
Pra Sekolah	2,000 – 3,000

Pendidikan Luar Biasa	2,620 – 3,120
Pendidikan Dasar, Menengah, Sekolah Menengah Pertama dan Institut Terpusat	2,760 – 3,500

Sumber: Chan (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa selama masa pelatihan atau bisa dikatakan pendidikan keguruan para calon guru juga memperoleh gaji selain biaya pendidikan yang dibiayai secara penuh oleh MOE Singapura. Jika dikurskan dalam rupiah maka rentang gaji guru selama masa pelatihan untuk pra sekolah adalah sebesar Rp.22.400.000 – Rp.33.600.000 per bulan. Sementara untuk guru sekolah luar biasa Rp.29.300.000 – Rp.34.900.000 per bulan. Lebih tinggi lagi untuk guru pendidikan dasar, menengah dan institute yaitu Rp.30.900.000 – Rp.39.200.000 per bulan.

Tabel 3

Panduan gaji Guru MOE-Terlatih

Tingkat Pendidikan	**Gaji Bulanan (dalam S$)**	**Rata-rata Gaji Bulanan Sepanjang Karir (dalam S$)**

Pra Sekolah	Guru: 2,500 – 4,106 Kepala Pusat/Wakil: 2,860 -5,874	1 – 4 tahun: 2,250 5 – 9 tahun: 2,250 10 – 19 tahun: 2,300
Pendidikan Luar Biasa	2,620 – 3,120	1 – 4 tahun: 5,330 5 – 9 tahun: 7,460 10 – 19 tahun: 9,740
Pendidikan Dasar	2,600	1 – 4 tahun: 2,600 5 – 9 tahun: 4,420 10 – 19 tahun: 5,400
Pendidikan Menengah	4,080	1 – 4 tahun: 4,080 5 – 9 tahun: 5,300 10 – 19 tahun: 6,250

Junior College atau Institut Terpusat	4,800	1 – 4 tahun: 5,500 5 – 9 tahun: 6,700 10 – 19 tahun: 7,900

Sumber: Chan (2022)

Berdasarkan data gaji guru yang telah terlatih di Tabel 3 kita dapat mengetahui berapa besar gaji Guru jika telah dikurskan dalam rupiah. Dimulai dari gaji guru untuk level pra sekolah Rp.28.000.000 – Rp.45.900.000 per bulan. Untuk Guru pendidikan luar biasa berada di rentangan Rp.29.300.000 – Rp.34.900.000 per bulan. Untuk guru sekolah dasar sebesar Rp. 29.100.000 per bulan. Lalu, untuk guru sekolah menengah sebesar Rp.45.600.000,- per bulan. Hingga pada guru institut adalah sebesar Rp. 53.700.000 per bulan.

Selain mendapatkan gaji yang telah diurai pada Tabel 2 dan Tabel 3 di atas. Guru-guru di Singapura juga mendapatkan remunerasi yang terdiri dari beberapa fasilitas berikut ini:

1. Bonus, berupa tunjangan tahunan non-pensiun, bonus kinerja dan bonus variable lain (tunjangan yang sama dengan PNS pada bidang lain)

2. *The Connect Plan*, berupa penghargaan atas dedikasi dan komitmen selama karir yang diberikan dalam bentuk pembayaran pada titik-titik tertentu.
3. Cuti selama liburan sekolah, atau dapat dikatakan bahwa guru dapat memperoleh cuti selama pelayanannya tidak diperlukan dalam waktu tersebut. Cuti tersebut seperti liburan, pengobatan, stud, pernikahan, ibu hamil/ayah, pengasuhan anak dan cuti pengasuhan orang tua.
4. Tunjangan gigi bersubsidi yaitu sebesar 85% perawatan gigi per kunjungan dengan total biaya maksimum S$ 120 per tahun.
5. Tunjangan medis dengan ketentuan guru akan menerima subsidi hingga S$500 per tahun untuk biaya pengobatan.
6. Cuti medis selama 14 hari jika tanpa rawat inap, dan 60 hari jika rawat inap.
7. Cuti 10 hari untuk keadaan mendesak, sesuai persetujuan.
8. Guru juga akan mendapatkan layanan istimewa karena tergabung dalam Klub Pegawai Negeri Sipil
9. Perhargaan sebagai tanda pengabdian dan kesetiaan dalam minimal masa kerja 5 tahun

10. Skema grup asuransi dengan premi rendah untuk kematian, cacat total dan tetap, serta cacat Sebagian dan permanen.
11. Layanan dukungan karyawan, berupa alokasi dana tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan social karyawan.

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara

Berdasarkan data dari website resmi Bank Dunia (2022) pada tahun 2020 Singapura tercatat memberikan persentase pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah sebesar 11,9%. Dimana anggaran ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 19,5% dan bahkan di tahun 2018 itu 20,8%. Singapura juga pernah tercatat mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sangat besar sepanjang 20 tahun terakhir yaitu terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 31,4%. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa memang ternyata negara Singapura memang mendedikasikan pembangunan negaranya di bidang pendidikan. Maka memang tidak salah jika pada tahun 2018 skor PISA negara singa ini mendapatkan peringkat kedua skor tertinggi diantara negara-negara lain di dunia. Paparan ini dapat dilihat dengan jelas pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Alokasi Anggaran Pendidikan Singapura 2000-2020

Lebih rinci lagi dapat dilihat pada data dari Laporan Pengalokasian anggaran pendidikan pada tahun 2020 dimana MOE mengalokasikan dana sebesar S$12,63 Miliar. Dari anggaran yang tersedia tersebut pemerintah mengalokasikan S$ 12,05 Miliar untuk Pengeluaran Operasional atau sekitar 95,4% dan S$582 Juta atau sekitar 4,6%. Adapun dana operasional tersebut digunakan Sebagian besar untuk membiayai program baru yang dibentuk yaitu Program *SG United Skills* (SGUS) dan juga untuk meningkatkan *Training Support Package Programme* (ETSP). Sementara sisa dari dana tersebut digunakan untuk Dana Hibah pada *Autonomous University* (AU). Lebih lanjut untuk pengeluaran pembangunan dialokasikan untuk pembayaran biaya tanah dan konstruksi kampus permanen *The Singapore Institute of Technology (SIT)* serta dana untuk

pembangunan sekolah yang jumlahnya berkurang dibandingkan tahun 2019 akibat adanya pandemi.

Selanjutnya pada tahun 2021 MOE Singapura juga melaporkan bahwa terdapat dana sejumlah S$13,09 Miliar yang meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak S$0,99 Miliar. Dana tersebut dialokasikan Program Pendidikan Umum, Program Universitas, Program Politeknik, Program Institut Pendidikan dan Teknologi, Program Keterampilan Di Masa Depan, dan Dana Konsolidasi Lainnya. Sementara Pada Tahun 2022 pemerintah menganggarkan biaya sebesar S$ 13,60 Miliar, dana ini lebih besar 3,3% dari tahun 2021. Biaya operasional umumnya digunakan untuk penyesuaian biaya tahunan, biaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Adapun komponen biaya tersebut antara lain:

1. Program Pendidikan Umum (*General Education Programme*)
2. Program Universitas (*University Programme*)
3. Program Politeknik (*Polytechnic Programme*)
4. Program Institut Pendidikan Teknologi (*Institute of Technical Education Programme*)
5. Program Keterampilan Masa Depan (*SkillsFuture Programme*)
6. Pengeluaran Dana Konsolidasi Lainnya (*Other Consolidated Fund Outlays*)

C. Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Singapura menerapkan Wajib Belajar (*Compulsory Education*) untuk setiap warga negaranya berdasarkan Undang-undang Pendidikan Wajib Tahun 2000 (UU CE 2000). Dalam UU CE 2000 menyatakan bahwa ana yang wajib menghadiri sekolah dasar nasional secara teratur adalah jika mereka:

1. Warga negara Singapura
2. Memasuki usia wajib sekolah (6 – 15 tahun)
3. Lahir setelah 1 Januari 1996
4. Tinggal di Singapura.

Adapun tujuan wajib belajar ini adalah agar setiap anak mencapai pengetahuan umum yang menjadi dasar untuk pendidikan berikutnya dan pendidikan wajib akan membangun identitas nasional dan mendorong kohesi sosial.

Kementerian Pendidikan Singapura juga sudah merancang sistem pendidikan maupun pembelajaran guna memberikan bekal kepada peserta didik untuk menghadapi masa depannya. Serangkaian kompetensi telah diramu menjadi satu dalam sebuah sistem pembelajaran yang harus mengintegrasikan nilai-nilai inti seperti rasa hormat, tanggungjawab, ketahanan, integritas, peduli dan harmoni. Keenam nilai-nilai inti tersebut akan didukung oleh lima kompetensi utama

seperti kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggungjawab, kesadaran sosial dan manajemen hubungan.

Secara garis besar rancangan pengajaran dan pembelajaran di Singapura meyakini bahwa pembelajaran harus bersifat holistik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan emosional siswa sehingga harus pembelajaran harus menciptakan pengalaman belajar tersendiri bagi setiap siswa. Untuk itu, sekolah harus dijadikan sebagai lingkungan yang aman dan peduli, sekolah juga dijadikan sebagai tempat untuk anak mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan juga mengembangkan keterampilan berpikir. Sistem penilaian yang diterapkan dalam sistem pembelajaran harusnya dapat mengatasi adanya kesenjangan belajar pada setiap anak.

Narasumber juga menyatakan bahwa "selama masa pandemi, sekolah hanya diliburkan selama enam bulan di awal *circuit breaker (lock down period)* dan belajar melalui *e learning* yang disediakan oleh MOE. Setelah itu, pada pertengahan 2020 kami belajar tatap muka seperti biasa dengan sistem prokes yang ketat". MOE menyediakan sebuah sistem yang diberi nama *Student Learning Space (SLS)* yaitu sebuah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dimana siswa nantinya akan merasakan model pembelajaran yang berbeda yang sifatnya mengintegrasikan pembelajaran mandiri dan

kolaboratif dimana semua guru, siswa dan juga kepala sekolah termasuk di dalamnya. Dengan adanya sistem SLS ini maka ketika pandemi menyerang dunia, Singapura tidak merasakan kekhawatiran bagaimana pengelolaan sistem pembelajaran di setiap sekolah. Karena memang sistem SLS ini sudah terbangun dan penggunaannya sudah menyeluruh di seluruh sekolah di Singapura.

Lebih lanjut dalam upaya untuk mengembangkan kompetensi dan minat siswa yang beragam, MOE Singapura juga menyediakan sistem pendidikan yang bersifat fleksibel dan beragam sehingga siswa memiliki banyak pilihan dalam menentukan jalur pendidikan mana yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan demikian, kompetensi siswa terbangun lebih kuat, dan kepercayaan diri siswa dalam belajar dapat terbangun kokoh untuk menggapai impian masa depan mereka. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh MOE dalam menyediakan alternatif pilihan sistem pendidikan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan beraneka ragam jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan gaya belajar, kompetensi dan minat mereka guna mengembangkan potensi dan aspirasi siswa.
2. Memberikan otonomi dan sumber daya yang mumpuni kepada sekolah untuk mengelola keunggulan sistem pendidikannya masing-

masing baik berupa aktivitas kurikuler dan pengembangan karakter.

3. Setiap sekolah juga dapat memberikan lebih banyak mata pelajaran tambahan setara O-Level, seperti komputasi dan modul-modul pembelajaran lanjutan. Bahkan di beberapa sekolah juga menawarkan kurikulum dan ujian yang berbeda seperti *International Baccalaureate (IB).*
4. Sekolah menengah dan perguruan tinggi juga menawarkan Program Terpadu untuk siswa yang kuat dari sisi Akademis sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih besar lagi.
5. Menambahkan penawaran Program Bahasa Ibu bagi siswa yang telah mahir.

Adanya Sekolah Independen khusus untuk menumbuhkembngkan beragam kemampuan dan bakat siswa, seperti *Singapore Sports School, NUS High School for Maths and Science, School of Science and Technology* dan *School or the Arts (SOTA)*.


BELANDA

SISTEM PENDIDIKAN BELANDA

A. Latar Belakang

Belanda adalah negara di bawah permukaan air laut, di mana-mana ditemukan air, maka seminggu sekali siswa-siswa Basisschool menuju kolam renang terdekat dengan sekolah mereka. Semua biaya renang dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Akan ada ujian renang resmi dan setiap siswa wajib menggondol diploma renang level terendah.

Bersepeda adalah hidup rakyat Belanda. Di Belanda ada 18 juta sepeda dibanding 16,4 juta penduduknya, alias setiap warga Belanda rata-rata memiliki 1,1 sepeda. Siswa Basisschool wajib belajar mengendarai sepeda dan belajar Peraturan Lalu Lintas. Akan ada ujian Lalu Lintas Bersepeda teori dan praktek yang diselenggarakan oleh Korps Kepolisian setempat. Siswa yang lulus menerima Diploma Lalu Lintas resmi dari Korps Kepolisian. Semua biaya kursus bersepeda dan ujian dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Belanda adalah di antara dunia atas negara-negara untuk ekuitas di kesempatan pendidikan, yang berarti siapapun dapat membuka sekolah berdasarkan keyakinan pribadi mereka, mereka memenuhi standar sistem pendidikan Belanda. Selain itu, sekolah-sekolah swasta yang mengikuti prinsip agama atau dikukuhkan tertentu telah

menerima dana negara yang sama sebagai sekolah umum sejak tahun 1917 .

Jumlah sekolah dikelola lebih dari dua kali lipat yang umum di Belanda. Pendidikan internasional juga tersedia di Belanda maupun sekolah swasta di Belanda. Delapan belas sekolah Belanda sedang mengikuti program percontohan untuk dwibahasa (Belanda/Inggris) pendidikan, mana mata pelajaran tertentu seperti sejarah, biologi atau musik mengajar hanya dalam bahasa Inggris. Jika Departemen Pendidikan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa pilot adalah sebuah sukses, jumlah dwibahasa sekolah di Belanda ini diharapkan tumbuh pesat.

Ada juga beberapa sekolah Belanda yang baru saja diperkenalkan sesuai tema internasional utama kurikulum (IPC). Pada tahun 2013, ada 965 SD di Belanda yang ditawarkan kelas bahasa Inggris, dan 100 lebih lanjut yang diajarkan Jerman, Perancis dan Spanyol. Banyak sekolah juga menggabungkan kelompok satu dan dua (usia empat dan lima). Anak-anak dalam kelompok ini disebut kleuters, dan kelompok yang dikenal sebagai kleuterklas. Dalam kleuterklas fokus pada belajar melalui bermain, keterampilan sosial, baik dan kotor keterampilan motorik, struktur dan bertahap persiapan untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis secara resmi dimulai dalam kelompok tiga (umur enam).

Dalam setiap kasus, oleh hukum semua sekolah di Belanda diwajibkan untuk memulai mengajar bahasa Inggris sebagai subjek oleh kelompok tujuh (tentang umur 10) yang terbaru. Peningkatan jumlah sekolah, namun, memutuskan untuk memulai Inggris sebelumnya, kadang-kadang bahkan dari kelompok satu. Anda juga dapat menemukan sekolah yang mengajarkan bahasa Perancis, Jerman atau Spanyol.

Belanda hanyalah sebuah Negara kecil di Eropa bagian barat laut. Belanda memiliki daerah kira-kira luasnya 42.000 km^2 (16,216 mil persegi). Posisi geografisnya dan keadaan tanahnya menyebabkan perdagangan, perkapalan, pertanian dan peternakan menjadi dasar perekonomian Belanda sejak lama. Negara belanda terbagi menjadi 12 provinsi. Sebagian besar penduduknya tinggal di tiga provinsi barat (Belanda Utara, Belanda Selatan dan Utrecht). Negeri Belanda berada dibawah permukaan laut dan umumnya datar, yang merupakan daerah delta Sungai Rhine, Sungai Mass, Sungai Scheldt batas disebelah utara dan barat dengan laut utara, di selatan berbatas dengan Belgia dan di timur berbatas dengan Republik Jerman. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Belanda, tetapi di bagian utara provinsi Friesland dalam interaksi lisan menggunakan bahasa Frisia.

Walaupun kecil Negara ini bisa menjadi perhatian dunia. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimilikinya

seperti pada bidang ekonomi, budaya, prestasi olahraga dunia, dan yang terkhusus dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Belanda sangat ditekankan dan menjadi salah satu masalah prioritas pemerintah, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi/universitas. Maka tidak aneh mulai dari sistem pendidikan dasar di Belanda hingga pendidikan tinggi/universitas itu berkualitas. Dunia sendiri mengakui akan prestasi Belanda di dunia pendidikan, terbukti 11 dari universitas di Belanda masuk ranking 200 universitas terbaik di dunia. Pada tahun 2009 Belanda masuk sebagai negara paling maju dan sukses dalam sistem pendidikannya.

Untuk negara kecil seperti Belanda, orientasi internasional, termasuk pendidikan dan pelatihan merupakan keharusan untuk dapat bertahan di tengah arus dunia yang semakin internasional. Karena terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan defisit anggaran yang cukup besar maka terjadilah pemotongan anggaran pendidikan yang cukup besar terjadi pada tahun 1983, sebagian melanda gaji pegawai (dari keseluruhan anggaran pendidikan, 82% adalah untuk gaji). Kementerian Pendidikan dan Ilmu pengetahuan terpaksa mengurangi pengeluarannya sampai f 1,000 juta (gulden) pada tahun 1986.

Perhatian pemerintah belanda terhadap pendidikan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat

dari pengeluaran belanja pemerintah yang tidak tanggung-tanggung membebaskan biaya pendidikan bagi warga negaranya. Pemerintah menciptakan kondisi-kondisi (misalnya peraturan & subsidi dana) dan menetapkan prioritas.Walaupun Menteri Pendidikan & Ilmu Pengetahuan mengkoordinir kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan menetapkan garis-garis besar, tiap menteri bertanggung jawab bagi penelitian dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dalam masing-masing bidang.

Disamping subsidi langsung oleh pemerintah, lembaga-lembaga penelitian (sebagian besar merupakan bagian dari universitas) dapat menggunakan dana yang dikelola oleh Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda) atau KNAW dan Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Organisasi Belanda untuk Penelitian Ilmu Pengetahuan) atau NWO atau dana yang ditawarkan oleh dunia usaha atas dasar pendidikan kontrak dan atau penelitian kontrak.

B. Jenjang Pendidikan Dan Kurikulum

1. Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan dasar di Belanda dimulai pada saat anak berusia 4 tahun, meskipun belum menjadi suatu kewajiban sampai anak tersebut berumur 5 tahun. Pendidikan dasar berlangsung selama 8 tahun, di mana 7

dari 8 tahun tersebut adalah wajib. Pada tahun terakhir, anak-anak mengikuti ujian akhir SD yang dikenal dengan CITO Toets dan hasilnya menjadi dasar rekomendasi dari sekolah bagi siswa dan orang tuanya untuk memilih dan melanjutkan ke berbagai jenis pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan dan minat anak tersebut. Sedangkan pendidikan menengah diwajibkan untuk anak-anak berumur 12 s.d. 16 tahun.

Pendidikan menengah ini terbagi ke dalam beberapa jenjang dan jenis:

1. VMBO (*Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs* atau Pendidikan Persiapan Kejuruan Tingkat Menengah)
2. MBO (*Middelbaar Beroeps Onderwijs* atau Pendidikan Kejuruan Tingkat Menengah)
3. HAVO (*Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs* atau Pendidikan Umum Tingkat Atas)
4. VWO (*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs* atau Pendidikan Persiapan Masuk Universitas)

Diagram Sistem Pendidikan di Belanda



2. VMBO & MBO

Pendidikan tingkat VMBO adalah kombinasi pendidikan umum dan lanjutan. VMBO adalah tingkat persiapan menuju MBO, yaitu Pendidikan Kejuruan Tingkat Menengah. Lulusan VMBO memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya ke MBO, dan tamatan MBO pada kelas empat bisa melanjutkan pendidikannya ke HBO (*Hoger Beroepsonderwijs* atau Pendidikan Tinggi Profesional/Politeknik). Pendidikan tingkat MBO berlangsung selama satu sampai empat tahun, yang terdiri dari jurusan ekonomi, teknologi, kesehatan,

kesejahteraan, dan pertanian. Masa belajar program MBO berbeda-beda (satu sampai empat tahun), dan berbeda dalam tingkat pendidikan (tingkat satu sampai dengan tingkat empat).

3. HAVO & VWO

Tingkat pendidikan menengah yang langsung memenuhi syarat untuk masuk ke pendidikan tinggi hanya HAVO (lima tahun) dan VWO (enam tahun). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa mendaftar sesuai dengan minat dan kemampuannya. VWO dan HAVO dapat dikategorikan sebagai pendidikan menengah yang selektif. Desain kurikulum VWO mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke WO (*Wetenschappelijk Onderwijs* atau Pendidikan Universitas)

Persyaratan minimum untuk masuk HBO adalah siswa yang memiliki ijazah HAVO. Pada dua tahun terakhir HAVO dan tiga tahun terakhir VWO disebut *tweede fase* (fase kedua), atau pendidikan menengah atas. Dalam masa tersebut, siswa memilih profil pada salah-satu dari empat jurusan pilihan. Semua jurusan pilihan tersebut dirancang untuk menyiapkan peserta didik mengikuti program-program pendidikan di perguruan tinggi. Siswa VWO atau HAVO dapat memilih satu dari empat jurusan berikut:

1. *Natuur en techniek* (Sains dan Teknologi)

2. *Natuur en gezondheid* (Sains dan Kesehatan)
3. *Economie en maatschappij* (Ekonomi dan Kemasyarakatan)
4. *Cultuur en maatschappij* (Budaya dan Kemasyarakatan)

4. Pendidikan Tinggi

Sejak 2002 pendidikan tinggi di Belanda menggunakan tiga jenjang pendidikan sebagaimana yang lazim di Tanah Air: sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Sebelum 2002, gelar S1 dan S2 dikombinasikan dalam satu kesatuan. Sistem tiga tingkatan ini diberlakukan secara resmi di awal Tahun Akademik 2002-2003. Gelar dari sistem lama masih dapat diberikan sampai tahun 2007-2009. Sistem yang lama dan baru akan dibahas di sini.

Pendidikan tinggi Belanda mengenal dua jenis pendidikan tinggi:

a. *WO* (*Wetenschappelijk Onderwijs* atau Pendidikan Universitas Riset)

b. *HBO* (*Hoger Beroepsonderwijs* atau Pendidikan Tinggi Profesi/Politeknik), yang diberikan oleh *hogescholen*.

Kategori universitas terdiri dari universitas umum, universitas khusus teknik dan pertanian, dan universitas terbuka (*Open Universiteit*). Pendidikan WO ini

menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan Sekolah Tinggi Profesi (*hogescholen*) terdiri dari perguruan tinggi umum, dan yang memiliki spesialisasi dalam jurusan tertentu seperti pertanian dan peternakan, seni, dan pendidikan guru. *Hogescholen* menyediakan program pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa memasuki lapangan kerja dan profesi sesuai jurusan yang dipilih. Oleh karena itu, muatan pendidikan HBO lebih menekankan pada kompetensi yang lebih praksis dibandingkan program-program yang ditawarkan universitas.

Belanda saat ini memiliki 13 universitas, dan 1 universitas terbuka. Kapasitas dan besar universitas sangat bervariasi dengan daya tampung yang beragam: mulai dari 6.000 hingga 30.000 mahasiswa. Daya tampung keseluruhan universitas mencapai 180.000 orang. Terdapat sekitar 60 *hogescholen* saat ini, dengan daya tampung mencapai 330.000 mahasiswa.

5. WO (*Wetenschappelijk Onderwijs* - Pendidikan Universitas) hingga 2002

Universitas di Belanda mengampu program pendidikan dan penelitian dalam berbagai jurusan seperti Bahasa dan Kebudayaan, Perilaku dan Masyarakat, Ekonomi dan Hukum, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Ilmu Alam, Teknik dan Pertanian. Sampai 2002, pendidikan pada jenjang kombinasi S1+S2 itu

memakan waktu 4 tahun untuk hampir semua jurusan, dan 5 tahun pada Jurusan Pertanian, Teknik, Matematika, dan hampir dalam semua jurusan sains lainnya, dimana pada akhir Pendidikan, mahasiswa menerima *doctorale getuigschrift* (ijazah doktoral/ magister/S2), atau *getuigschrift van het afsluitend examen* (ijazah telah menyelesaikan ujian). Program studi dalam Jurusan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memakan waktu 5 tahun (Kedokteran Gigi), dan 6 tahun untuk Kedokteran Umum, Farmasi, dan Kedokteran Hewan. Tahun pertama dari semua program tadi disebut *propedeuse,* dimana mahasiswa mendapat mata kuliah dasar sesuai jurusan masing-masing. Dalam tahun-tahun berikutnya, semua program doktoral membekali mahasiswa dengan metodologi dan praktek penelitian serta menyusun skripsi berdasarkan penelitian sebagai salah-satu syarat untuk menyelesaikan program tersebut.

Lulusan program doktoral (S2) berhak menyandang gelar sesuai bidangnya. Lulusan doktoral Jurusan Teknik, Pertanian, dan Lingkungan Alam mendapat gelar *ingenieur,* disingkat menjadi *ir*. Lulusan dari Jurusan Hukum mendapat gelar *meester in de rechten,* disingkat menjadi *mr*. Sedangkan lulusan dari jurusan selain itu menerima gelar *doctorandus*, disingkat menjadi *drs*. Tamatan program doktoral berhak pula

menggunakan gelar *Master* (Magister), dan berhak pula melanjutkan pendidikannya ke program doktor (S3).

Semua universitas memiliki otoritas memberikan gelar akademis tertinggi (doktor atau *PhD*), dan orang yang mendapat gelar tersebut berhak menyandang gelar doktor disingkat menjadi *dr*. Proses untuk memperoleh gelar doktor disebut *promotie*. Gelar doktor biasanya dicapai dengan riset, dengan penulisan disertasi, dan dipertahankan di depan umum. Waktu minimum untuk menyelesaikan program doktor ialah 4 tahun.

6. *Hoger Beroepsonderwijs* (Pendidikan Tinggi Profesi) sampai dengan 2002.

Sekolah Tinggi Profesi (*hogescholen*) menyiapkan mahasiswa untuk berkarir dalam 7 sektor profesi: pertanian, teknik dan mesin, ekonomi dan administrasi bisnis, kesehatan, seni, pendidikan guru, dan kesejahteraan sosial. Program pendidikan berlangsung selama 4 tahun, dimana pada akhir pendidikan mahasiswa dapat memperoleh *getuigschrift hoger beroepsonderwijs* (ijazah sekolah tinggi profesi). Tahun pertama di semua program disebut *propedeuse* yang mencakup mata kuliah basis di jurusan masing-masing. Selain pendidikan, seminar, proyek, dan belajar-mandiri, mahasiswa juga wajib menyelesaikan program kerja-praktek yang biasanya dilakukan pada tahun ketiga, serta proyek-akhir atau skripsi pada tahun terakhir.

Lulusan HBO Jurusan Teknologi dan Mesin, Pertanian dan Lingkungan Alam mendapat gelar *ingenieur*, disingkat menjadi *ing*. Sedangkan lulusan HBO dari jurusan lain menerima gelar *baccalaureus*, disingkat menjadi *bc*. Lulusan HBO dapat juga memakai gelar *Bachelor*. Semua lulusan HBO memenuhi syarat untuk melaksanakan profesinya masing-masing tanpa harus melanjutkan pendidikannya.

Sejak September 2002, sistem pendidikan tinggi di Belanda ditransformasi menjadi pendidikan tiga-jenjang menurut sistem Anglo-Sakson: *bachelor, master* dan *PhD*. Pada saat yang sama, sistem kredit ECTS (*European Credit Transfer System*) dijadikan standar untuk menentukan kuantitas beban-kuliah. Pendidikan tinggi tetap menggunakan sistem biner, tetapi terdapat perbedaan antara pendidikan universitas (*Wetenschappelijk Onderwijs*), dan pendidikan tinggi profesi (*Hoger Beroepsonderwijs*).

Fokus dari program gelar adalah menentukan jumlah beban-kuliah yang wajib dipenuhi untuk menyelesaikan program tadi dan gelar yang akan diberikan. Mahasiswa program *bachelor* di universitas harus menyelesaikan 180 SKS (program kuliah 3 tahun), dan menerima gelar *Bachelor of Arts* atau *Bachelor of Science* (*BA/BSc*) sesuai jurusan masing-masing. Sementara itu, mahasiswa yang mengikuti program *bachelor* di *hogescholen* wajib menyelesaikan 240 SKS (4

tahun kuliah) dan menerima gelar sesuai bidang masing-masing, misalnya *Bachelor of Engineering* (*BEng*), atau *Bachelor of Nursing* (*Nursing*). Sedangkan gelar-gelar lama dalam bidang tadi adalah *bc* dan *ing*, masih dapat digunakan.

Mahasiswa WO yang mengambil program *Master* wajib menyelesaikan 60, 90, atau 120 SKS (1; 1,5; atau 2 tahun). Dalam Jurusan Teknik, Pertanian, Matematika, dan Ilmu Alam harus menyelesaikan 120 SKS. Mahasiswa WO yang berhasil menyelesaikan program *Master* menerima gelar *Master of Arts* atau *Master of Science* (*MA/MSc*). Sedangkan gelar-gelar lama dalam bidang masing-masing seperti *drs*., *mr*., *ir*. masih bisa digunakan. Mahasiswa HBO yang mengambil program *Master* wajib menyelesaikan 60-120 SKS, dan kemudian menerima gelar sesuai dengan bidang masing-masing seperti *Master of Social Work* (*MSW*). Jenjang gelar ketiga adalah program doktor yang hanya diberikan oleh universitas, dengan peraturan yang sama seperti program yang lain

1) Persyaratan Untuk Mendaftar ke Pendidikan Tinggi

Untuk dapat masuk ke program *Bachelor* di universitas, mahasiswa harus memiliki ijazah VWO, atau sudah menyelesaikan program tahun pertama HBO (60 SKS).Sedangkan, persyaratan minimum untuk masuk HBO adalah memiliki ijazah HAVO atau ijazah level 4 MBO. Siswa yang memiliki ijazah VWO juga berhak masuk ke HBO. Karena adanya kuota untuk masuk ke

program-program tertentu, maka penerimaan mahasiswa menggunakan metode undian. Calon mahasiswa yang berusia di atas 21 tahun tetapi tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat mengikuti tes masuk. Sedangkan usia minimal untuk diterima di universitas adalah 18 tahun. Sementara itu, untuk dapat masuk ke semua program *Master*, pendaftar wajib memiliki gelar *Bachelor* dalam satu bidang atau lebih, dan dalam beberapa program ditambah dengan persyaratan lain. Apabila lulusan HBO dengan gelar *Bachelor* ingin melanjutkan pendidikannya ke WO program *Master*, ia harus mengikuti pendidikan tambahan, sesuai dengan program yang dipilih.

2) Sistem Kredit Mata Kuliah dan Penilaian

Alokasi waktu dan perkuliahan dihitung menurut SKS (*studiepunten*). Sampai dengan tahun 2002, satu SKS setara dengan satu minggu kuliah penuh-waktu (40 jam), yaitu waktu yang digunakan dalam kelas dan yang digunakan untuk belajar-mandiri dan menyelesaikan tugas. Program kuliah di universitas dan *hogescholen* memakan waktu dengan total kredit 168 SKS, atau sama dengan 42 SKS per tahun. Lamanya satu tahun akademik adalah 42 minggu. Sejak tahun 2002, beban-kuliah dihitung menurut ECTS, di mana 1 SKS ditafsirkan dalam Undang-undang di Belanda setara 28 jam, dan 60 SKS adalah waktu 1 tahun belajar penuh- waktu.

Sistem pemberian penilaian dalam beberapa dekade terakhir tidak mengalami perubahan yaitu: angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat bagus). Nilai yang menyatakan lulus satu mata kuliah adalah angka 6. Angka 9 jarang diberikan; angka 10; 1 s.d. 3 sangat jarang diberikan.

3) Persyaratan Untuk Mendaftar ke Pendidikan Tinggi

Untuk dapat masuk ke program *Bachelor* di universitas, mahasiswa harus memiliki ijazah VWO, atau sudah menyelesaikan program tahun pertama HBO (60 SKS).Sedangkan, persyaratan minimum untuk masuk HBO adalah memiliki ijazah HAVO atau ijazah level 4 MBO. Siswa yang memiliki ijazah VWO juga berhak masuk ke HBO. Karena adanya kuota untuk masuk ke program-program tertentu, maka penerimaan mahasiswa menggunakan metode undian. Calon mahasiswa yang berusia di atas 21 tahun tetapi tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat mengikuti tes masuk. Sedangkan usia minimal untuk diterima di universitas adalah 18 tahun. Sementara itu, untuk dapat masuk ke semua program *Master*, pendaftar wajib memiliki gelar *Bachelor* dalam satu bidang atau lebih, dan dalam beberapa program ditambah dengan persyaratan lain. Apabila lulusan HBO dengan gelar *Bachelor* ingin melanjutkan pendidikannya ke WO program *Master*, ia harus mengikuti pendidikan tambahan, sesuai dengan program yang dipilih.

4) Sistem Kredit Mata Kuliah dan Penilaian

Alokasi waktu dan perkuliahan dihitung menurut SKS (*studiepunten*). Sampai dengan tahun 2002, satu SKS setara dengan satu minggu kuliah penuh-waktu (40 jam), yaitu waktu yang digunakan dalam kelas dan yang digunakan untuk belajar-mandiri dan menyelesaikan tugas. Program kuliah di universitas dan *hogescholen* memakan waktu dengan total kredit 168 SKS, atau sama dengan 42 SKS per tahun. Lamanya satu tahun akademik adalah 42 minggu.

Sejak tahun 2002, beban-kuliah dihitung menurut ECTS, di mana 1 SKS ditafsirkan dalam Undang-undang di Belanda setara 28 jam, dan 60 SKS adalah waktu 1 tahun belajar penuh- waktu. Sistem pemberian penilaian dalam beberapa dekade terakhir tidak mengalami perubahan yaitu: angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat bagus). Nilai yang menyatakan lulus satu mata kuliah adalah angka 6. Angka 9 jarang diberikan; angka 10; 1 s.d. 3 sangat jarang diberikan.

5) Persyaratan Untuk Mendaftar ke Pendidikan Tinggi

Untuk dapat masuk ke program *Bachelor* di universitas, mahasiswa harus memiliki ijazah VWO, atau sudah menyelesaikan program tahun pertama HBO (60 SKS).Sedangkan, persyaratan minimum untuk masuk HBO adalah memiliki ijazah HAVO atau ijazah level 4 MBO. Siswa yang memiliki ijazah VWO juga berhak

masuk ke HBO. Karena adanya kuota untuk masuk ke program-program tertentu, maka penerimaan mahasiswa menggunakan metode undian. Calon mahasiswa yang berusia di atas 21 tahun tetapi tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat mengikuti tes masuk. Sedangkan usia minimal untuk diterima di universitas adalah 18 tahun. Sementara itu, untuk dapat masuk ke semua program *Master*, pendaftar wajib memiliki gelar *Bachelor* dalam satu bidang atau lebih, dan dalam beberapa program ditambah dengan persyaratan lain. Apabila lulusan HBO dengan gelar *Bachelor* ingin melanjutkan pendidikannya ke WO program *Master*, ia harus mengikuti pendidikan tambahan, sesuai dengan program yang dipilih.

6) Sistem Kredit Mata Kuliah dan Penilaian

Alokasi waktu dan perkuliahan dihitung menurut SKS (*studiepunten*). Sampai dengan tahun 2002, satu SKS setara dengan satu minggu kuliah penuh-waktu (40 jam), yaitu waktu yang digunakan dalam kelas dan yang digunakan untuk belajar-mandiri dan menyelesaikan tugas. Program kuliah di universitas dan *hogescholen* memakan waktu dengan total kredit 168 SKS, atau sama dengan 42 SKS per tahun. Lamanya satu tahun akademik adalah 42 minggu.

Sejak tahun 2002, beban-kuliah dihitung menurut ECTS, di mana 1 SKS ditafsirkan dalam Undang-undang di Belanda setara 28 jam, dan 60 SKS adalah waktu 1

tahun belajar penuh- waktu. Sistem pemberian penilaian dalam beberapa dekade terakhir tidak mengalami perubahan yaitu: angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat bagus). Nilai yang menyatakan lulus satu mata kuliah adalah angka 6. Angka 9 jarang diberikan; angka 10; 1 s.d. 3 sangat jarang diberikan.

7) Akreditasi dan Jaminan Mutu

Aturan legal, mutu dan standar pendidikan tinggi dijamin secara nasional. Kementerian Pendidikan, Budaya dan Sains (*Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap*/OC&W) bertanggung jawab dalam implementasi dari aspek legislatif dan penerapannya di sektor pendidikan. Sedangkan Kementerian Pertanian dan Kesehatan Masyarakat berperan penting dalam mengawasi muatan program pendidikan yang relevan dengan kedua kementerian tadi. Sampai dengan tahun 2002, VSNU (*Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten* atau Asosiasi Kerjasama Universitas Belanda), dan *HBO-Raad* (Dewan Penasehat HBO) adalah 2 instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas.

Sejalan dengan pemberlakuan ECTS sejak tahun 2002, akreditasi dan pengendalian mutu menjadi wewenang NVAO (*Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie* atau Organisasi Akreditasi Belanda dan Vlaanderen). Flandern (*Vlaams*) adalah penduduk

berbahasa Belanda yang menetap di selatan Belanda dan utara Belgia.

Menurut Undang-undang Pendidikan Tinggi Belanda (2002), semua program gelar di berbagai perguruan tinggi (universitas dan *hogescholen*) diakreditasi sesuai dengan kriteria yang ada, dan seluruh program yang memenuhi kriteria tersebut akan diakreditasi. Hanya program yang telah mendapat akreditasi yang berhak mendapatkan subsidi pemerintah dan mahasiswanya mendapatkan bantuan keuangan, serta secara sah dapat menyandang gelar akademik sesuai bidangnya apabila mendaftar dan menyelesaikan perkuliahan. Program- program yang terakreditasi terdaftar pada CROHO (*Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs* atau Pusat Pendaftaran Program Pendidikan Tinggi), dan informasi ini terbuka untuk umum. NVAO merencanakan untuk mempertimbangkan kembali semua program pendidikan pada tahun 2006. Sebelum tahun tersebut, semua program yang terdaftar di CROHO diakui oleh undang-undang.

Selain akreditasi program pendidikan tinggi, Belanda memiliki sistem di mana Kementerian OC&W membuat kategori apakah sebuah institusi pendidikan tinggi mendapat status *bekostigd* (dibiayai*)*, atau *aangewezen* (diakui). Status *bekostigd* berarti institusi tersebut memperoleh subsidi penuh dari pemerintah. Sedangkan status *aangewezen* menyatakan bahwa

institusi tersebut tidak mendapatkan subsidi pemerintah dan menggunakan biaya sendiri. Sebelum Kementerian OC&W menentukan kedua status tersebut, setiap perguruan tinggi dan programnya harus terakreditasi dan terdaftar di CROHO terlebih dahulu.

Menurut aturan akreditasi, seluruh institusi pendidikan tinggi wajib menuliskan pada ijazah yang mereka keluarkan, tanggal kapan program tersebut diakreditasi. Saat ini, hanya beberapa program yang sudah di akreditasi. Karena akreditasi ini adalah proses yang berkelanjutan, maka diperlukan perhatian terhadap gelar-gelar yang dikeluarkan perguruan tinggi di Belanda. Jika sebuah program telah diakreditasi, maka pengakuan tersebut berlaku permanen.

C. Staf Pengajar

Pendidikan guru adalah bagian dari pendidikan tinggi. Guru-guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi profesional atau fakultas-fakultas yang khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar (PABO’s). setara S1 politeknik keguruan khusus guru SD). Selain ijazah, guru juga harus memiliki onderwijs bevoegdheid (semacam sertifikat pendidik di Indonesia, atau Akta IV).

Kuliah berlangsung selama 4 tahun dan memprogramkan agar guru-guru yang mengajar di sekolah dasar mampu mengajarkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Mahasiswa

yang mendaftarkan pada lembaga keguruan ini meningkat dengan cepat (1987:3,000-4,00 orang; 1990:6,000) setelah menurun sebelum 1987. jumlah tamatan juga meningkat (1987:1,700 orang; 1989:2,600 orang).

Sedangkan untuk menjadi guru sekolah menengah (guru bidang studi) harus punya ijazah minimal S1 (lulusan politeknik keguruan dengan onderwijsbevoegdheid tweede grand untuk mengajar jenjang SMP) Guru-guru sekolah menengah harus memiliki kualifikasi Grade satu atau kualifikasi Grade dua. Guru yang berkualifikasi Grade dua boleh mengajar pada level tiga tahun pertama di VWO dan HAVO, dan di sekolah-sekolah MAVO, VBO, dan MBO. Guru-guru berkualifikasi Grade satu boleh mengajar pada semua kelompok umur pada semua jenis sekolah menengah. Kuliah penuh untuk pendidikan guru-guru Grade dua dalam mata pelajaran umum diselenggarakan pada perguruan tinggi profesional selama 4 tahun. Mahasiswa mengambil spesialisasi dalam satu mata pelajaran atau bidang studi dan hanya boleh mengajar selain bidang keahliannya, mata pelajaran pendukung pada level tertentu. Semenjak tahun 1979, diadakan kuliah eksperimen dalam mata pelajaran teknik yang berlangsung selama 5 tahun. Jumlah mahasiswa pada program ini meningkat (1987:3,148 orang; 1990:4,427 orang), walaupun jumlah

lulusannya menurun (1987:2,254 orang; 1989:1,755 orang).

Sedangkan untuk menjadi guru jenjang SMA harus memiliki ijazah S1 atau S2 (lulusan program keguruan pada universitas riset dengan onderwijs bevoegdheid eerste graad). Untuk mendapatkan guru-guru yang berkualifikasi Grade Satu, mahasiswa yang telah menyelesaikan satu program gelar non kependidikan di universitas, perlu mengikuti pendidikan satu tahun di perguruan tinggi keguruan. Pendidikan guru yang terdiri dari dua lapis pada pendidikan tinggi sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Untuk mengajar pada pendidikan khusus diperlukan mengambil pendidikan dua tahun setelah mendapatkan kualifikasi mengajar HBO. Kuliah paruh waktu juga disediakan pada perguruan tinggi profesional untuk program kualifikasi Grade Satu dan Grade Dua.

Guru-guru sekolah dasar normalnya bekerja 40 jam seminggu. Pada sekolah menengah, standar beban mengajar guru adalah 29 jam pelajaran. Tugas guru mencakup mengajar dan tugas lainnya (non teaching). Guru-guru yang dibebani tugas-tugas ekstra, dibebaskan sebagian dari tugas mengajar. Dosen-dosen perguruan tinggi diatur dengan satu bentuk peraturan sendiri didasarkan pada peraturan pegawai negeri, tetapi dimodifikasi sesuai keadaan di universitas.

Besar gaji Guru / Dosen

No	Profesi	Gaji per bulan	Gaji per jam	Gaji minimum	Gaji maximal
1.	Guru SD	€ 3.227	€ 24,41	€ 1.922	€ 4.894
2.	Kepala Sekolah	€ 5.117	€ 29,54	€ 2.877	€ 6.960
3.	Guru TK	€ 2.284	€ 13,19	€ 1.671	€ 3.254
4.	Dosen	€ 2.731	€ 15,77	€ 1.938	€ 6.614

D. Anggaran Biaya Pendidikan

Pendidikan formal dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan ilmu Pengetahuan kecuali pendidikan pertanian yang dibiayai oleh Kementerian pertanian: dana ini bersumber dari penghasilan pajak dan dalam jumlah yang sangat terbatas, dari sekolah, khusus, dan uang sekolah. Lembaga pendidikan tinggi dapat mengumpulkan uang dari pengajaran atau penelitian yang dilaksanakan atas dasar kontrak. Pendidikan yang

tidak didanai oleh pemerintah juga merupakan sektor yang cukup besar, yang dananya seluruhnya dibayar oleh peserta pendidikan, atau orang tua, atau majikan yang menyekolahkan stafnya. Dana pemerintah dialokasikan untuk pendidikan sesuai persyaratan tertentu. Peraturan yang terpisah mengatur pendanaan untuk staf, untuk investasi, untuk biaya operasional. Aspek-aspek pendanaan pendidikan mencangkup jumlah murid pada sekolah tertentu, lamanya waktu pendidikan, besarnya kelas (jumlah murid per kelas), dan skala gaji guru-guru. Peraturan tentang "kelebihan pengeluaran" (overspend) menetapkan bahwa jika dalam satu tahun ajaran kotapraja mengeluarkan biaya untuk sekolah-sekolah negeri lebih dari yang telah ditetapkan, maka kotapraja yang bersangkutan harus mengeluarkan dana yang jumlahnya sama besarnya dengan kelebihan itu kepada sekolah-sekolah swasta setempat. Peraturan ini bersumber dari persamaan keuangan antara sekolah negeri dan swasta sesuai ketentuan konstitusi. Dalam tahun 1987, pemerintah setempat mengeluarkan kira-kira 680 juta DFI. (US$340 juta) untuk fasilitas pendidikan.

E. Sistem Pengelolaan Pendidikan

Sistem pengelolaan pendidikan di Belanda melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, sekolah dan orang tua siswa. Suatu ketentuan pusat Konstitusi Belanda adalah bahwa semua sekolah, masyarakat dan

mandiri, yang didanai secara sama jika mereka mematuhi peraturan perundang-undangan. Sistem pendidikan Belanda didasarkan pada statuta (anggaran dasar/undang-undang) yang kuat dan berfungsi sebagai dasar peraturan-peraturan yang lebih rinci dalam bidang-bidang tertentu. Peraturan ini dibuat menurut urutan atau hierarki. Parlemen dapat menentukan bahwa hasil pembicaraan di dewan pendidikan harus lebih dahulu disampaikan ke parlemen sebelum peraturan itu dilaksanakan. Peraturan atau undang-undang itu berkaitan terutama dengan pendanaan dan organisasi pendidikan.

Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggung jawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hukum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Pejabat-pejabat provinsi bertanggung jawab terutama atas tugas-tugas pengawasan serta mempunyai peran juga dalam hal pelaksanaan pendidikan. Manajemen dan pengadministrasian diatur pada tingkat lokal. Pemerintah kota bertanggung jawab atas sekolah-sekolah negeri dan yayasan atau organisasi yang punya fungsi yang sama pada sekolah-sekolah swasta. Mereka juga melaksanakan berbagai tugas terhadap semua sekolah seperti pengawasan pelaksanaan peraturan wajib belajar. Mereka juga mendanai biaya-biaya fasilitas

baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Semua sekolah swasta atau negeri didanai oleh negara selama memenuhi kriteria seperti sekolah harus memiliki minimal 260 siswa, guru berlisensi dan rencana sekolah dengan target pencapaian disetujui oleh pengawas sekolah yang ditunjuk pemerintah. Mereka juga dapat menentukan kurikulum dan bahan ajar yang spesifik, meskipun materi pelajaran harus berada dalam kerangka Departemen.Pada tahun 2006, Kementerian memutuskan untuk memberikan semua dana untuk sekolah dasar dalam bentuk block grant, sehingga sekolah akan memiliki otonomi keseluruhan atas pengeluaran. Sistem ini telah di tempat untuk sekolah menengah sejak tahun 1996.

Kementerian pendidikan dan ilmu pengetahuan dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Menteri dibantu oleh seorang sekretaris Negara dengan tanggung jawab khusus atas pendidikan dasar dan menengah. Pengawasan pendidikan adalah tanggung jawab menteri pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan dilaksanakan oleh inspektorat pendidikan. Ini merupakan badan yang bersifat desentralistis. Pada tahun 1990, inspektorat pendidikan mempunyai 14 kantor di tingkat regional dengan 500 orang staf tetap, 237 orang diantaranya adalah inspektur. Tugas kantor inspektorat adalah

mengawasi pembangunan, menjaga bahwa semua peraturan berjalan sebagaimana mestinya, meningkatkan pembangunan pendidikan, dan melaporkan kepada menteri, baik diminta atau atas inisiatif sendiri. Inspektorat pendidikan tinggi, disamping tugas-tugas tersebut, juga bertanggung jawab menyusun dan memberikan dukungan terhadap tim evaluasi universitas disaat melakukan evaluasi diri. Inspektorat juga bertanggung jawab menyampaikan laporannya yang independen tentang keadaan pendidikan di parlemen.

KOREA SELATAN



SISTEM PENDIDIKAN KOREA SELATAN

A. Latar Belakang

Korea Selatan termasuk negara yang sukses dalam kemajuan pendidikan, hal ini terbukti dari negara Asia yang berhasil masuk peringkat dunia teratas dalam bidang pendidikan salah satunya adalah Korea Selatan. Dikutip dari laporan peringkat rata-rata skor PISA (*Programme for International Student Assessment)* yang menunjukkan Korea Selatan berada pada posisi ketujuh di dunia dengan skor membaca 514, matematika 526, dan sains 519 (Fatimatuzzuhroh, 2022). PISA merupakan Program Penilaian Pelajar Internasioanal dari Pusat Penilaian Pendidikan Universitas Oxford (OUCEA) yang berfokus untuk menilai pelajar Internasional.

Penilaian dilakukan oleh PISA setiap tiga tahun dengan menguji kemampuan membaca, matematika, dan sains pada anak usia 15 tahun. Selain menguji kemampuan tersebut siswa juga diberikan kuesioner yang berisi informasi mengenai latar belakang kehidupan mereka seperti orang tua, pengasuh, dan penggunaan bahasa, serta minat dalam mata pelajaran yang berbeda dan pendekatan dalam belajarnya (OUCEA, 2022). Selain melihat hasil PISA, ternyata berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh *MBC Times* dengan judul 20 Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia menyatakan lima

besar sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hongkong, dan Finlandia (Fatimatuzzuhroh, 2022; Syahrief, 2021).

Melihat pencapaian yang diperoleh oleh Korea Selatan dalam sistem pendidikan merupakan suatu hal yang luar biasa, karena latar belakang Korea Selatan atau dikenal dengan Republik Korea (Hangul: 대한민국) yang beribukotakan Seoul (Wikipedia, 2022) merupakan negara yang lama di jajah oleh Jepang yaitu dari 1910 sampai dengan 1945, ditambah adanya konflik perang saudara dengan Korea Utara yang tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat kekalahan Jepang dalam perang dunia ke II yang akhirnya menyebabkan sistem negara Korea Selatan menjadi kapitalis (Ratriani, 2021).

Di Asia Timur Korea Selatan merupakan negara yang melakukan keajaiban ekonomi, karena mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, padahal pada tahun 1950 an disebut sebagai negara termiskin di dunia, dan melalui reformasi di bidang pendidikan dengan dipimpin oleh pemerintah pusat dari periode kemerdekaan hingga tahun 1990an merubah Korea Selatan menjadi negara yang sukses dalam bidang ekonomi dan pendidikan hingga saat ini (Bank Dunia dalam (KEDI, 2021b)).

Beranjak dari latar belakang dan pencapaian yang yang telah diraih oleh Korea Selatan dalam bidang Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana Korea Selatan bisa bangkit dari masa-masa sulit sehingga akhirnya berada di posisi sekarang ini, yang tentunya tidak lepas dari bagaimana penataan atau perbaikan suatu negara yang baru bangkit dari penjajahan atau merdeka dengan berbagai komplik di dalam negaranya yang harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan ekonomi dan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahannya khususnya dalam bidang pendidikan.

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum

Semenjak Korea Selatan merdeka dari Jepang tahun 1945, negara ini mulai menata diri dengan mengembalikan pendidikan pada jalurnya, meluncurkan sistem pendidikan bangsa pada masa pemerintahan baru, hal ini dilakukan karena negara ini berfokus dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya melalui pendidikan (Mee-Ryang & Woojin, 2018). Adapun perkembangan pesat Korea di mulai dari tahun 1960 sampai dengan 1970-an yang diawali sejak menjadi anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1996.

Sistem pendidikan yang digunakan negara ini sejak akhir tahun 1949 adalah sistem tangga tunggal yaitu 6-3-

3-4. Artinya 6 tahun Sekolah Dasar/SD (*Primary*), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama/SMP (*Secondary*), 3 tahun Sekolah Menengah Atas/SMA (*Secondary*/*Higher/Special*), serta 4 tahun Perguruan Tinggi (*University*) (KEDI, 2021b; Ministry of Education, 2020). Sistem pendidikan tangga tunggal ini merupakan penggantian atau bisa dikatakan peningkatan besar atas sistem jalur ganda pada masa pendudukan Jepang dan menghapus diskriminasi yang terjadi terhadap penduduk Korea.

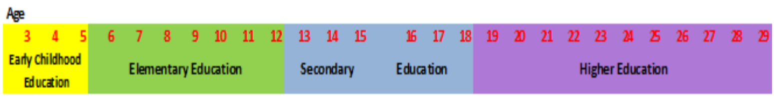
Dengan dihapusnya diskriminasi membuat penduduk Korea memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan berdasarkan kemampuan tanpa memandang status sosial ataupun kedudukan. Bahkan semua warga negaranya wajib menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama tanpa biaya atau gratis (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama). Sementara untuk sekolah menengah atas sampai universitas siswa dibebaskan memilih sekolah sendiri dan tidak gratis atau berbayar (Rahman & A'la, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga kebangsaan Korea Selatan didapat informasi bahwa saat ini lebih kurang 98% warga negara yang berusia 18 tahun ke atas sudah menamatkan sekolah menengah atas (*Secondary Education*). Bahkan banyak dari penduduknya yang bergelar sarjana atau

menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau universitas baik swasta maupun negeri.

1. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang ada di Korea Selatan sama seperti di Indonesia, yaitu dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD/*Pra-Primary*), Sekolah Dasar (SD/*Primary*), Sekolah Menengah Pertama (SMP/*Secondary*), Sekolah Menengah Atas (SMA/*Secondary/Higher/Special*), dan Perguruan Tinggi (*University*). Berikut usia setiap jenjang pendidikan yang bisa di lihat pada gambar 1 di bawah di samping:



Gambar 1. Sistem Pendidikan Tangga Tunggal Korea Selatan

Sumber: (Mee-Ryang & Woojin, 2018; Ministry of Education, 2020)

a. Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-Kanak *"Youchiwon (유치원)"*

Jenjang pendidikan anak usia dini (prasekolah/taman kanak-kanak) atau dalam bahasa Korea di sebut *Youchiwon* berada di usia 3 sampai 5 tahun. Selain TK pada jenjang ini terdapat juga pusat

penitipan anak dan bayi atau balita yang kita kenal dengan *daycare* dan *baby care* yang menyediakan pendidikan selain anak usia tersebut juga usia 0-2 tahun. Namun sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Korea kedua entitas ini beroperasi secara berbeda satu sama lain.

Di Korea untuk TK di bawah naungan Kementerian Pendidikan, dan *Daycare (Babycare/*Penitipan Anak) di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (sebagai lembaga pengasuh anak). Kurikulum yang digunakan untuk TK yaitu Nuri Kurikulum, sementara *Daycare* ada 2 kurikulum yaitu untuk anak usia 0-2 tahun memakai kurikulum dasar dan untuk usia 3-5 tahun gabungan keduanya. Nuri kurikulum merupakan penggabungan dari kurikulum nasional TK dan kurikulum nasional *childcare*. Nuri dalam bahasa Korea di artikan "Dunia" dimana diharapkan setiap anak mendapatkan kebahagian sehingga nantinya dapat meraih impian dan harapannya.

Pada tahun 2021 tercatat jumlah pendaftar di tanam kanak-kanak (TK) sebesar 98,2% yang terdiri dari anak usia 3 tahun, anak usia 4 tahun, dan anak usia 5 tahun. Pada tahun ini juga jumlah pendaftar di TK mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 26,2% meningkat menjadi 48,9% (Ministry of Education, 2020). Adanya peningkatan ini dikarenakan banyak faktor diantaranya meningkatnya

kesadaran masyarakat akan peran pendidikan anak usia dini, kesadaran ini disebabkan negara Korea percaya bahwa anak usia dini saat ini dapat menentukan kemajuan bangsa Korea di masa yang akan datang.

Hal lain yang menjadi faktor penyebab peningkatan ini adalah banyak orang tua (ibu) yang bekerja sehingga meningkatkan pendapatan keluarga (berapa persen dari penghasilan orang tua sengaja disisihkan untuk biaya pendidikan anak), pendidikan orang tua di korea rata-rata tinggi sehingga mereka sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya, serta adanya keyakinan dari orang tua yaitu salah satu cara untuk mempersiapkan anak-anaknya sukses harus dimulai dari usia dini (Kencana & Iswachyuni, 2019).

Dukungan pemerintah Korea terlihat juga dari jaminan kesempatan yang sama yang diberikan pemerintah dengan memperluas tanggung jawab negara atas pendidikan anak usia dini yaitu memberikan bantuan dana 100% untuk sekolah-sekolah negeri (sekolah milik pemerintah atau negara) dan 80% untuk sekolah swasta (Kencana & Iswachyuni, 2019; Mee-Ryang & Woojin, 2018; Ministry of Education, 2020).

Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas publik untuk taman kanak-kanak termasuk peningkatan undang-undang dalam kesempatan belajar untuk anak-anak, perluasan layanan taman kanak-kanak umum, dorongan keterlibatan orang

tua, dan sistem akuntansi baru untuk operasi taman kanak-kanak swasta (Ministry of Education, 2020).

b. Pendidikan Sekolah Dasar (*Primary*) "*Chodeung Hakkyo (초등학교*)"

Pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) atau disebut "*Chodeung Hakkyo" (*dalam bahasa Korea) untuk anak usia 6 tahun dan lulus di usia 12 tahun (KEDI, 2021b; Ministry of Education, 2020) dan berdasarkan informasi hasil wawancara ada juga siswa yang masuk SD umur 5 dan 7 tahun dan lulus umur 13 atau 14 tahun. Adapun lamanya sekolah di jenjang sekolah dasar adalah 6 tahun dengan ketentuan tidak ada istilah tidak naik kelas, serta tidak ada ujian.

Sekolah dasar merupakan program wajib belajar di Korea dan gratis (kecuali sekolah swasta). Sekolah dasar umumnya (negeri) berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, dan menggunakan kurikulum nasional sedangkan sekolah swasta atau internasional salah satu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari IB, Amerika Serikat, atau Inggris (Sudying Korea, 2022).

Pendidikan sekolah dasar mulai diwajibkan di Korea sejak tahun 1950 dan meningkat secara bertahap selama tiga puluh tahun berikutnya. Semenjak tahun 1985, pendidikan wajib sekolah menengah diperkenalkan dan diperluas secara regional, yang

dimulai dari kota-kota kecil dan menengah di daerah pedesaan, kemudian kota-kota besar, dan akhirnya Seoul, dengan implementasi nasional pada tahun 2004. Sebagian besar sekolah negeri, dan tingkat yang sama pendidikan berdasarkan kurikulum nasional diberikan secara gratis (Ministry of Education, 2020).

c. Pendidikan Sekolah Menegah Pertama *(Secondary)* *"Junghakkyo (중학교)"*

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dalam bahasa Korea disebut *"Junghakkyo"* umumnya siswa masuk sekolah ini di usia 13 tahun. Sekolah menengah ini juga wajib diikuti oleh seluruh warga Korea Selatan, sesuai dengan kewajiban belajar 9 tahun (SD sampai dengan SMP). Pendidikan jenjang ini juga gratis diberikan oleh pemerintah pada sekolah-sekolah negeri. Namun pada sekolah swasta tetap berbayar sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Persentase jumlah sekolah negeri dan swasta untuk di kota-kota besar lebih banyak sekolah swasta. Adapun lama sekolah pada jenjang sekolah menengah adalah 3 tahun.

Kurikulum yang digunakan pada jenjang ini sama seperti kurikulum umumnya yaitu kurikulum nasional yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan. Tapi untuk sekolah internasional umumnya punya kurikulum sendiri tergantung pada karakteristik dan tujuan spesifik

sekolah tersebut, diantaranya kurikulum dari IB, Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya.

d. **Pendidikan Sekolah Menengah Atas** (SMA/***Secondary/Higher/Special***) ***"Godeung hakkyo (고등학교)"***

Pelajar di Korea akan memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama berkisar di usia 16 tahun. Siswa yang lulus dari sekolah menengah atau mereka yang lulus ujian kualifikasi yang memberikan kredit yang setara memenuhi syarat untuk mengikuti sekolah menengah atas tiga tahun. Sekolah menengah atas diklasifikasikan sebagai sekolah umum, kejuruan, untuk siswa berbakat, sekolah menengah tujuan khusus (untuk sains, seni, pendidikan jasmani, dan lain-lain.), dan sekolah menengah otonom yang memiliki otonomi lebih besar atas administrasi sekolah dan kurikulum (Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia, n.d.; Ministry of Education, 2020).

Siswa bebas memilih sekolah menengah atas yang sesuai dengan tujuan karir mereka. Sementara pendidikan sekolah menengah saat ini tidak wajib, hampir keseluruhan dengan tingkat pendaftaran 99,7%. Oleh karena itu, pemerintah melembagakan pendidikan sekolah menengah atas gratis pada tahun 2019 untuk mengurangi beban keuangan orang tua (terkhusus sekolah negeri).

Pendidikan kejuruan di Korea secara teknis dimulai pada tingkat pendidikan menengah atas. Sebagian besar pendidikan kejuruan berlangsung di sekolah menengah kejuruan khusus, sedangkan sekolah menengah Meister menawarkan kursus berbasis permintaan industri, bersama dengan sejumlah sekolah menengah umum yang menyediakan program pendidikan kejuruan sebagai bagian dari kurikulum mereka. Data terbaru (per April 2020) mengungkapkan bahwa ada 576 sekolah menengah kejuruan di Korea, terhitung 24,3% dari semua sekolah menengah atas, dengan 18,5% siswa sekolah menengah terdaftar.

Sistem dukungan ketenagakerjaan pemerintah menghubungkan pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah dan sekolah dalam membantu siswa menemukan lebih banyak kesempatan kerja setelah lulus. Pusat Dukungan Ketenagakerjaan Pusat yang baru didirikan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perusahaan dengan prospek masa depan yang baik dan berbagi informasi dengan pusat dukungan ketenagakerjaan di bawah kantor pendidikan metropolitan dan provinsi.

Inisiatif "*Job First, University Later*" baru-baru ini membantu siswa mendapatkan pekerjaan pada usia lebih dini dan juga memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan tinggi kapan pun mereka mau setelah mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dukungan lain termasuk perluasan

kurikulum perguruan tinggi untuk siswa yang bekerja dan bantuan biaya kuliah untuk membantu mereka mencapai tujuan karir mereka.

e. Perguruan Tinggi *(University) "Daehakkyo (대학교)"*

Mahasiswa atau pelajar di Korea akan memasuki jenjang perguruan tinggi berkisar di usia 19 tahun. Mereka harus melewati tes masuk perguruan tinggi terlebih dahulu (di Indonesia dikenal SNMPTN), atau lebih sering disebut sebagai *"Suneung" (수능).* Jadi penerimaan mahasiswa berdasarkan skor Tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (CSAT) dan catatan sekolah. Masa pendidikan di perguruan tinggi sekitar 4 tahun. Namun ada juga perguruan tinggi yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 tahun (*junior college*) dan sekolah tinggi kejuruan (*vocational college*).

Di Korea, kebanyakan universitas adalah swasta, karena tercatat pada tahun 2019, dari 430 perguruan tinggi, 372 adalah swasta. Namun, top 10 *univeristy* di Korea sudah merupakan gabungan dari universitas nasional dan swasta, jadi tidak ada perbedaan yang mutlak antara negeri dan swasta (Ministry of Education, 2020).
Program master dan program doktoral dapat didirikan di universitas, dan lama studi masing-masing dua tahun atau lebih. Sekolah pascasarjana d ibagi

menjadi sekolah pascasarjana umum, sekolah pascasa rjana profesional, dan sekolah pascasarjana khusus (KEDI, 2021b).

Lulusan universitas tertentu (almamater universitas) juga kerap kali menjadi indikator penentu dalam rekrutmen atau lowongan pekerjaan di Korea. Program beasiswa nasional sudah ditetapkan sejak tahun 2012, yang bertujuan membantu semua orang yang membutuhkan setelah menyelesaikan sekolah menengah, serta perluasan asrama dan langkah-langkah untuk meringankan beban perumahan. Sebagai titik sentral untuk menumbuhkan individu yang kreatif dan inovatif, perguruan tinggi didorong untuk menyediakan kursus yang dibuat khusus yang mencerminkan kebutuhan konsumen pendidikan.

2. Kurikulum dan Pendidikan Ekonomi

Kurikulum yang digunakan di Korea Selatan adalah Kurikulum Nasional. Kurikulum ini akan mengalami perubahan (direvisi) setiap 5-10 tahun yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan. Secara administrasi pendidikan nasional diatur oleh organisasi pusat dan provinsi. Sebagai informasi sejak tahun 1991 di Korea berlaku Undang-Undang Otonomi Pendidikan Daerah. Adapun untuk administrasi pusat diatur oleh Presiden, Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan serta organisasi afiliasi. Di Korea Selatan Menteri Pendidikan juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri.

Kementerian Pendidikan di Korea merupakan sebuah organisasi administrasi pusat yang membawahi dan mengatur semua urusan pendidikan di tingkat nasional, termasuk perumusan kebijakan di bidang pengembangan SDM, pendidikan sekolah, pembelajaran sepanjang hayat, dan urusan akademik pada umumnya. Administrasi provinsi berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan yang dipercayakan kepada dinas pendidikan provinsi. Komite pendidikan di bawah dewan daerah, yang merupakan badan musyawarah dan pengambilan keputusan pendidikan provinsi, bersama dengan dinas pendidikan provinsi, organisasi administrasi pendidikan provinsi, memainkan peran sentral dalam tata kelola pendidikan daerah (Ministry of Education, 2020; So & Kang, 2014).

Pengawas pendidikan provinsi dipilih langsung oleh warga provinsi tersebut. Selama masa jabatan empat tahun, pengawas pendidikan bertanggung jawab atas pendidikan, seni, sains, serta urusan administrasi pendidikan provinsi pada umumnya. Sementara bahasa yang digunakan di sekolah nasional atau negeri adalah Hanegul, namun untuk sekolah internasional tergantung dari kurikulum yang digunakan sekolah tersebut, salah satunya adalah bahasa Inggris.

Penentuan semester dalam satu tahun terdiri dari dua semester, dengan tahun ajaran berlangsung dari Maret sampai dengan Februari tahun berikutnya.

Semester pertama dimulai dari Maret sampai dengan Juni dan diikuti libur satu bulan (bulan Juli sampai dengan Agustus), sementara semester kedua dimulai dari September sampai dengan Februari dengan diselingi libur pertengahan Desember sampai akhir Januari (libur akhir tahun dan tahun baru), untuk penentuan libur pada hari pertama dan terakhir ditentukan oleh kepala sekolah selama jumlah hari sekolah per tahun diperhatikan (KEDI, 2021b).

Pada sekolah menengah diharuskan untuk menetapkan 1 atau 2 semester sebagai semester bebas, dan pada semester bebas ini, kurikulum beroperasi dengan fokus pada kelas partisipasi siswa dan berbagai kegiatan pengalaman untuk eksplorasi karir siswa. Di Korea tidak ada ujian nasional untuk anak sekolah dasar dan menengah pertama. Penentuan lulusan berdasarkan kehadiran selama sekolah.

Untuk pendidikan ekonomi di Korea lebih dikenal dengan Ekonomi Rumah Tangga. Pelajaran ini tidak diberikan pada sekolah dasar apalagi pendidikan usia dini tapi diberikan pada siswa sekolah menengah dan masuk pada mata pelajaran pilihan atau tambahan. Namun untuk sekolah kejuruan ada jurusan khusus ekonomi, yang difokuskan pada bidang bisnis dan teknologi.

Korea menerapkan kurikulum teknologi secara menyeluruh ke dalam pendidikan jenjang menengah,

selain itu juga negara ini menetapkan kebijakan kerjasama melalui penelitian-penelitian dan magang antara industri dan para Profesor yang ada di perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi dan teknologi modern sesuai dengan kolaborasi yang saling menguntungkan antara keduanya dimana perguruan tinggi dapat menyusun program belajar untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan terampil sedangkan dunia industri memanfaatkan SDM tersebut untuk perusahaan masing-masing, sehingga wajar saja negara ini terkenal dengan kecanggihan teknologi dan industri teknologinya seperti yang kita ketahui industri teknologi merek Samsung, Hyundai dan lain-lain.

Hasil dari kemajuan teknologi ini membuat ekonomi negara ini meningkat dengan pesat dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Dengan demikian perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan merupakan keputusan yang bijak dalam perbaikan negara melalui kualitas SDM, karena SDM yang unggul sangat dibutuhkan di di dunia usaha atau industri yang akhirnya bukan saja ekonomi yang meningkat tetapi juga taraf sosial dan budaya masyarakat. Selain bidang pendidikan perbaikan yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dengan tujuan untuk mempermudah akses distribusi ekonomi yang modalnya didapat melalui pinjaman dari

Amerika Serikat dan Jepang setelah beberapa tahun merdeka.

C. Staf Pengajar "Seonsaeng-nim (선생님) "

Berdasarkan Pasal 21.1 dan 21.2 Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah, seorang pendidik mengacu pada kepala sekolah, asisten kepala sekolah, guru master, dan guru. Diklasifikasikan menjadi guru penuh waktu (kelas 1, 2), guru asosiasi, konselor (kelas 1, 2), pustakawan (kelas 1, 2), guru untuk kegiatan langsung, perawat (kelas 1, 2), dan ahli gizi (kelas 1, 2). Guru harus memenuhi kriteria tertentu untuk setiap kategori dan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh Menteri Pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 22.1 dan 22.2 Undang-Undang Pendidikan Anak Usia Dini, seorang pendidik taman kanak-kanak mengacu pada kepala sekolah, asisten kepala sekolah, dan seorang guru. Diklasifikasikan menjadi guru penuh waktu (kelas 1, 2) dan guru pendamping. Guru harus memenuhi kriteria tertentu untuk setiap kategori dan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh Menteri Pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden. Namun untuk guru pendidikan usia dini tidak ada ujian lagi menjadi gruru ketika sudah memenuhi kriteria (biasanya cukup lulusan S1).

Meskipun calon guru pendamping dan guru untuk kegiatan praktik pada prinsipnya harus mengikuti tes, namun sejak tahun 1980 belum ada tes. Sertifikasi yang mensyaratkan pengalaman kerja dilakukan oleh pengawas dinas pendidikan dan sertifikasi kotamadya yang mensyaratkan latar belakang akademis oleh kepala lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan bagi calon guru bisa didapat dengan kuliah di perguruan tinggi khusus dan melalui gelar pendidikan atau program sertifikasi di perguruan tinggi regular. Adapun keluaran dari pendidikan calon guru ini merupakan tanggung jawab dari sekolah pascasarjana khusus pendidikan dan sekolah pascasarjana pendidikan yang telah ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.

Guru atau pengajar merupakan salah satu profesi terbaik di Korea, karena profesi ini dapat mengangkat status sosial dan memberikan penghasilan yang tinggi, sehingga tidak heran profesi ini menarik setiap masyarakat Korea yang berprestasi, dan rasio persaingan mengikuti ujian rekrutmen guru (Pegawa Negeri Sipil) setiap tahun semakin meningkat (Ministry of Education, 2020; So & Kang, 2014). Selain itu masyarakat di Korea Selatan sangat menghormati guru bahkan orang tua siswa sangat menghormati guru-guru.

Sama seperti di Indonesia guru atau pengajar sekolah nasional atau negeri dianggap sebagai pegawai tetap negara. Sementara untuk sekolah swasta

penerimaan guru melalui proses terbuka, yang sama dengan sekolah nasional dan negeri, dimana mengikuti tes tertulis yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota dan tes sekunder, seperti kelas demonstrasi *(microteaching)* serta wawancara.

Dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru di Korea beberapa lembaga pelatihan mengadakan pelatihan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu juga untuk meningatkan kinerja guru dan meningkatkan kompetensinya maka diadakan evaluasi guru. Evaluasi ini terdiri dari penilaian dari teman sejawat dan survei kepuasan siswa dan orang tua. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi tolak ukur untuk pengembangan dan perbaikan praktik mengajar guru tersebut.

Kompensasi dari kinerja guru ini umumnya adalah diberikan gaji. Gaji dari setiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda begitupun juga dengan fasilitas yang diberikan kepada guru, perbedaan ini ditentukan dari lamanya bekerja dan kualifikasi pendidikan dari guru tersebut. Untuk guru sekolah dasar sampai menengah gaji yang diberikan berkisar Rp19.000.000,- perbulan, angka ini akan naik seiring lamanya bekerja. Untuk gaji pengajar pendidikan tinggi (dosen) berkisar Rp100.000.000,-/bulan, dan ini belum termasuk fasilitas yang diterimanya.

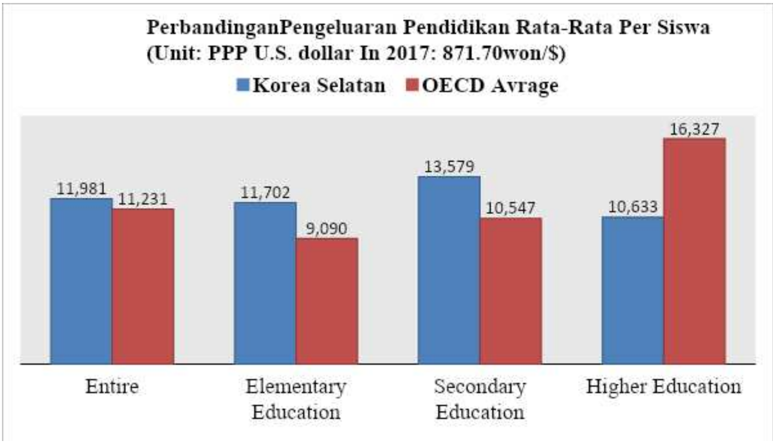
Selain gaji ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada guru, namun untuk guru sekolah menengah itu lebih banyak dibandingkan dengan sekolah dasar. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada guru nasional atau negeri adalah adanya apartemen tempat tinggal guru dengan keluarga, tapi fasilitas apartemen ini hanya diberikan untuk guru di luar kota Seoul. Alasan ini dikarenakan untuk menghindari kepadatan di kota Seoul.

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara

Negara Korea Selatan memiliki kebijakan dan tujuan pemerintahan yaitu menumbuhkan bakat masa depan dengan pendidikan kreatif. Adapun penjabaran dari kebijakan dan tujuan pemerintah yang dikutip dari *Ministry of Education (MOE)* Republik Korea yaitu: 1) menumbuhkan satu juta bakat digital yang kuat; 2) belajar inovasi untuk membina semua sebagai bakat masa depan; 3) otonomi perguruan tinggi mengarah ke pusat inovasi dinamis; 4) tanggung jawab pemerintah yang lebih besar atas pendidikan untuk menyelesaikan kesenjangan pendidikan; dan 5) era universitas dan kolase lokal (Ministry of Education, 2020).

Melihat kebijakan dan tujuan pemerintahan tersebut tidak heran jika Korea Selatan mengalokasikan anggaran pendidikan merupakan anggaran yang bersifat substansial, dimana anggaran biaya pendidikan yang dialokasikan setiap tahun oleh negara ini adalah 15-20%

dari total anggaran. Bahkan anggaran biaya ini tertinggi dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mereka (lihat Gambar 1 di bawah ini). Selain itu pajak nasional dan pendidikan mendanai anggaran pendidikan, dan pemerintah daerah menerima pendapatan dari subsidi yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pajak daerah (KEDI, 2021; Ministry of Education, 2020).



Gambar 2. Perbandingan Pengeluaran Pendidikan Per Siswa Korea dan Negara OECD

Sumber: (Ministry of Education, 2020)

Pada tahun 2020, dana dari pemerintah pusat menyumbang 72,6% dari anggaran pendidikan daerah, dan pendapatan dari pajak daerah menyumbang 17,3%,

yang meningkatkan keuangan pendidikan daerah dan memastikan siswa menerima pendidikan yang berkualitas di mana pun mereka tinggal. Anggaran pendidikan pemerintah mendanai dinas pendidikan yang mengawasi pendidikan sekolah dasar dan menengah, mengoperasikan universitas nasional dan organisasi administrasi/penelitian pendidikan, dan memberikan subsidi sebagian untuk universitas swasta yang sebagian besar bergantung pada biaya masuk dan uang sekolah untuk memenuhi biaya operasional mereka. Bahkan pemerintah Korea membuat Undang-Undang untuk membebaskan sekolah swasta dari pajak real estate.

E. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran di Korea Selatan masing-masing jenjang pendidikan memiliki sistem pembelajaran sendiri. Adapun penjelasannya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak

Untuk jenjang pendidikan anak usia dini setiap sekolahnya baik negeri maupun swasta memiliki program serta kualitas yang setara. Pendidikan ini lebih banyak mengajarkan tentang kemandirian, kreatifitas, bersosialisasi, dan mengajarkan tentang norma dan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kencana & Iswachyuni, 2019).

Metode pembelajaran yang digunakan adalah bermain sambil belajar. Dijenjang ini juga siswa diberikan kesempatan memilih kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka yang pembelajarannya dapat dilakukan *indoor* maupun *outdoor*. Waktu belajar PAUD/TK berkisar dari jam 08:00 sampai 10:00 pagi. Namun jika orang tuanya bekerja, mereka ada di sana dari jam 07:00 pagi sampai jam 05:00 sore, bahkan ada yang kadang-kadang sampai jam 08:00 malam.

Aspek pengembangan anak terdiri dari 5 yaitu olahraga, komunikasi, seni, bermain dan berbaur dengan alam. Sementara untuk bidang keagamaan tidak diajarkan, hal ini sesuai dengan kurikulum Nuri, namun untuk sekolah swasta atau internasional mereka punya kurikulum sendiri sehingga bidang keagamaan bisa ditemukan di sekolah ini. Uniknya di Korea pembelajaran baca tulis dan berhitung bukanlah materi wajib untuk anak usia dini, bahkan pada sekolah negeri dilarang mengajarkan ini. Hal ini disebabkan mereka memfokuskan anak-anak bermain sambil belajar sesuai dengan minat masing-masing anak-anak sehingga visi kebahagian anak tercapai. Adapun materi khusus membaca dan berhitung akan diberikan pada sekolah dasar.

Untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua dan untuk mengetahui perkembangan anak di Korea sangat terjaga, komunikasi bisa dilakukan melalui

tatap muka saat antar jemput anak, dan melalui aplikasi (salah satu aplikasinya adalah *Kidz Note*). Sehingga dengan adanya ini orang tua dapat mengetahui perkembangan dan kegiatan anak setiap hari di sekolah (Dwi, 2021).

2. Pendidikan Sekolah Dasar

Pada sekolah dasar jam belajar dimulai pukul 8.40 atau 9 pagi sampai pukul 1 atau 2 siang, kemudian dilanjutkan dengan kursus/bimbingan belajar (akademik), kalau dalam bahasa Korea di sebut *"Hagwon"* sampai pukul 5 sore bahkan bisa sampai 8 malam. Selama belajar di sekolah siswa mendapatkan makan siang secara gratis (Kim, 2016).

Mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar untuk kelas 1 dan 2 yaitu Bahasa Korea, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Seni dan Bahasa Inggris, sedangkan untuk kelas 3-6 ditambah IPA, Pendidikan Moral, Seni Praktis dan Musik, serta Pendidikan Jasmani.

3. Pendidikan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi

Pada jenjang sekolah menengah pertama mata pelajaran inti yang diberikan yaitu Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Studi Sosial atau Pendidikan Moral, dan IPA. Untuk mata pelajaran tambahan ada Musik, Seni, PA, Sejarah, Etika, Teknologi, dan Ekonomi Rumah Tangga. Untuk jenjang sekolah menengah atas ada dua yaitu sekolah umum dan kejuruan.

Sekolah umum hampir sama dengan di Indonesia yaitu SMA, sedangkan sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, Teknik atau Teknologi. Untuk mata pelajaran baik sekolah umum maupun kejuruan wajib mempelajari: Bahasa Korea, Matematika, Bahasa Inggris, Sejarah Korea, Penelitian Sosial, Ilmu Eksplorasi dan Eksperimen Sains, Pendidikan Jasmani dan Seni.

Adapun mata pelajaran pilihan tergantung dari sekolahnya kalau sekolah umum ada Teknologi, Ekonomi Rumah Tangga, Karakter Cina, Seni Liberal dan lain-lain. Sementara sekolah kejuruan tergantung jurusannya, namun umumnya pada sekolah kejuruan siswa mengambil 40% mata pelajaran umum dan 60% mata pelajaran kejuruan, selebihnya mata pelajaran pilihan. Jam belajar pada jenjang menengah masuk di mulai pukul 9 pagi dan pulang pukul 5 sore, dan kemudian dilanjutkan dengan kursus *"Hagwon"* yang bisa selesai sampai pukul 11 malam.

Untuk perguruan tinggi atau universitas pembelajaran dilakukan sesuai dengan universitas atau perguruan tinggi masing-masing yang tetap mengacu pada kurikulum nasional. Jam belajar mulai pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore, namun mahasiswa tidak pergi ke kampus setiap hari, hal ini dikarenakan mahasiswa dapat dengan bebas memilih pendaftaran kursus, sehingga mereka dapat mengatur waktu sesuai keinginan mereka.



AMERIKA SERIKAT

SISTEM PENDIDIKAN AMERIKA SERIKAT

A. Latar Belakang

Di Jenjang perguruan tinggi sejumlah universitas di amerika serikat dan eropa selalu bertengger menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia. Dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Ranking menilai universitas terbaik dunia dalam kategori pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, serta komponen internasional. Peringkat tersebut menilai lebih dari 1500 institusi Pendidikan tinggi di 93 negara dan kawasan .

Sejumlah universitas terbaik di Amerika serikat yang berfokus pada sains, teknologi, Teknik dan matematika (STEM) masuk dalam jajaran universitas dengan peringkat tertinggi. Tetapi dengan formula peringkat yang kini menyertakan penerbitan buku dan bab buku sebagai hasil penelitian selain artikel universitas yang berfokus pada seni dan kemanusiaan kini menjadi terwakili. Beberapa universitas terbaik AS dengan fokus STEM yang kuat antara lain : Stanford University (Peringkat 2), Harvard University (Peringkat 3), Massachusetts Institute of Technology (Peringkat 5). Selain itu MIT juga memperoleh nilai tertinggi dalam bidang seni dan humaniora.

Lebih dalam dapat memahami pendidikan di Amerika maka di bawah ini adalah data identitas negara tersebut sebagai berikut:

Mengutip dari Wikipedia (2022: Akses 21 November) Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan bahwa penduduk negara AS sekarang berjumlah 315.585.000 jiwa, termasuk 11,2 juta warga negara asing yang diperkirakan menetap secara ilegal. Populasi AS membengkak hampir empat kali lipat di sepanjang abad ke-20, dari sekitar 76 juta jiwa pada tahun 1900.[234] Jumlah ini menjadikan AS sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia setelah RRC dan India. Di antara ketiga negara ini, AS adalah satu-satunya negara industri yang peningkatan besar-besaran populasinya dapat diproyeksikan., terdiri dari 50 negara bagian, dan Washington, D.C. Luas daerahnya kurang lebih 9,4 juta km persegi, yang secara fisik sangat bervariasi pula sehingga keadaan flora dan faunanya juga beragam.Wikipedia (2022: Akses 21 November) juga mengutarakan "Peta Negara bagian di Amerika" sebagai berikut:



Sumber : Wikipedia (2022 : Akses 21 November)

B. Sejarah Pendidikan di Amerika

Amerika Serikat mulai dihuni manusia sekitar tahun 40.000 tahun yang lalu. Penduduk aslinya orang Indian. Mereka tidak diganggu musuh dari luar hingga Colombus menemukan Amerika pada tahun 1492. Pada tahun 1581, misionaris Spanyol sampai di Meksiko. Mereka menyebarkan agama dan mengajarkan berbagai keterampilan kepada suku bangsa Indian seperti keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan irigasi. Bangsa Perancis memasuki Amerika dari bagian utara. Sejumlah bentrokan terjadi antara kedua pendatang ini dalam merebutkan daerah kekuasaan. John Cabot, seorang berkebangsaan Inggris, memasuki Amerika tahun 1947. Ia diikuti sejumlah penjelajah Inggris berikutnya yang segera meluaskan daerahnya ke

seluruh benua ini. Kedatangan Inggris ini mengakibatkan timbulnya berbagai pertempuran melawan Perancis dan Spanyol. Namun orang Inggris akhirnya paling berhasil membentuk kolonial di Amerika Serikat (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 353-354).

Dalam perjalanannya maka masyarakat Amerika tulen ialah mereka yang disebut WASP (*White* atau berkulit putih, *Anglo Saxon* dan beragama *Protestan*). Masyarakat di luar itu adalah masyarakat kelas dua yang mengalami diskriminasi seperti kelompok etnis Negro. Perbudakan kaum Negro di AS telah mulai berlangsung sejak tahun 1600-an. Perbudakan ini timbul pertama kali di perkebunan tembakau dan kapas. Tahun 1700 pemimpin AS mulai mengecam perbudakan karena dianggap tidak perikemanusiaan. Menurut sensus tahun 1790, ada sekitar 59.000 orang Negro bebas di AS. Setelah Revolusi Amerika, perbudakan ini mulai menurun. Pemerintah mulai menetapkan larangan bagi perbudakan abad ke-19. Presiden Abraham Lincoln merupakan presiden yang sangat membela hak para budak. Tetapi Negara-negara bagian tidak setuju. Timbullah perang saudara yang berlangsung dari tahun 1860-1863. Pada tanggal 1 Januari 1863, Abraham Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi yang menghapus perbudakan secara resmi (3 Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 60-361).

1. Zaman Kolonial

Pendidikan di Amerika Serikat diawali di bawah kolonialisme Inggris. Pranata sosial dan koloni Spanyol dan Prancis yang terbentuk di wilayah Amerika telah runtuh sepenuhnya atau berasimilasi dengan perkembangan yang berasal dari Inggris.

I.N. Thut dan Don Adams (2005: 255) mengatakan bahwa Pemerintah Inggris menuntut hak teritorial untuk semua daerah yang diserahkan kepada tiga belas kolonial induk menyusul Perang Kemerdekaan. Berdasarkan "*The Acts of Uniformity and Supremacy*" (UU Keseragaman dan Supremasi) raja Inggris tidak hanya bertindak sebagai pelindung kepercayaan yang sah tetapi juga beranggapan bahwa dirinya mempunyai otoritas mengelola Negara bagian yang dikuasainya. Inggris tidak menjalankan sekolah, tidak menyediakan dukungan sistematis dan teratur untuk pihak-pihak yang mengelolanya. Pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab keluarga dan setiap orang bebas membuka usaha pada bidang pendidikan sesuai yang mereka inginkan selama upaya itu tidak bertentangan dengan raja. Prinsipnya sekolah adalah milik rakyat. Pola ini mempengaruhi sistem politik dan pendidikan di Amerika Serikat hingga kini.

Selanjutnya, I.N. Thut dan Don Adams (2005: 363), mengatakan bahwa Perang Kemerdekaan menandai putusnya keterkaitan budaya dan politik Amerika

dengan Inggris. Perang itu berkobar karena gagasan-gagasan politik liberal yang telah membangkitkan Revolusi Perancis dan mendorong gerakan liberal besar-besaran yang mencapai klimaksnya di Eropa Utama pada 1848. Godaan tanah murah di Amerika Utara dan situasi politik, maka terjadi imigran besar-besaran dari Eropa ke Amerika. Peristiwa ini membuat keuntungan bagi dunia pendidikan karena pendidikan menjadi hak milik rakyat jelata. Tahun 1880, berdatangan imigran besar-besaran dari Eropa khususnya Jerman dengan membawa serta ajaran politik liberal, pendidikan dan ajaran agama. Teori mereka tentang persamaan sosial, metode rasional dalam penyelidikan filsafat dan metode ilmiah mempengaruhi pergeseran pola pendidikan di sana.

Pada awal perkembangannya persekolahan di Amerika telah dimulai sejak zaman penjajahan. Persekolahan ketika itu bersifat elitis dan berorientasi pada agama. Masyarakat yang berada pada lapisan sosial-ekonomi bawah hanya boleh mengenyam pendidikan di “sekolah ibu”, yaitu suatu sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung dan agama. Sedangkan masyarakat pada lapisan sosial-ekonomi atas dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, ataupun pemimpin negara melalui sekolah Latin dan colleges. Pada masa itu anak wanita tidak mempunyai kebebasan untuk bersekolah —suatu

bentuk nyata diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara yang sedang terjajah(Dimyati, 1988).

2. Gerakan *Public School*

Rakyat Amerika berhasil memperoleh kemerdekaannya dan membentuk negara Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Iklim kemerdekaan ini berdampak pada perubahan pola pendidikan di Amerika. Pendidikan yang bersifat elitis diubah. Pada masa ini muncullah gerakan "Public School" yang bersifat terbuka untuk semua anak kulit putih baik pria maupun wanita. "Public School" dibentuk dan dirancang untuk *membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara*. Upaya pengembangan "Public School" telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengembangan "Public School", tetapi sebagian lagi menolaknya. Kelompok masyarakat yang kontra tersebut berpendapat bahwa campur tangan pemerintah justru akan menghambat perkembangan "Public School" itu sendiri.

"Public school" dibiayai oleh pemerintah lokal (pemerintah negara bagian atau pemerintah federal). Pembiayaan itu diambil dari pajak. Mengingat kegiatan pendidikan dibiayai dari pajak, maka para pembayar pajak akan mempengaruhi bagaimana dan untuk apa saja yang digunakan dalam kegiatan pendidikan(Dimyati, 1988:71-73).

Kegiatan pendidikan di Amerika tidak terhenti sampai disini saja. Sejarah panjang mewarnai kegiatan pendidikan di negeri Paman Sam tersebut. Tiga periode reformasi pendidikan berikut ini akan mengisi catatan panjang sejarah pendidikan Amerika. Ketiga periode reformasi pendidikan tersebut adalah gerakan sekolah umum pada tengah abad 19, alam progressive pada awal abad 20, dan gerakan fermentasi generasi terakhir.

3. Pendidikan Pertengahan Abad 19: Periode Reformasi

Pada abad 19 “Public School” tersebar luas di seluruh Amerika, tetapi ironisnya tenaga pendidik dan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan ketika itu sangat minim. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah reformasi di bidang pendidikan yang berhasil memunculkan gerakan yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Keberhasilan gerakan tersebut mendukung perkembangan “Public School”. Pada tengah abad 19 “Public School” dirancang untuk memberikan pendidikan dasar umum sehingga lulusannya diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat memasuki dunia kerja.

4. Pendidikan Awal Abad 20: Periode *Progressive*

Pada zaman progressive terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam sistem pendidikan “Common School”. Para ahli pendidikan menggunakan

kekuatan negara untuk memperkuat posisi, misalnya untuk memperoleh sertifikasi, dana, standarisasi fasilitas dan kurikulum. Pada masa ini muncul pemikiran bahwa “Common School” tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan dasar di bidang 3R (*reading, writing, arithmetic*) dan pendidikan moral saja, tetapi juga diharapkan mampu menyiapkan siswa secara langsung agar dapat melakukan peranan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian sekolah merupakan suatu lembaga yang menjadi pintu gerbang untuk mengarahkan siswa ke arah dunia kerja.

5. Periode Fermentaso

Pada tahun 1950-an masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang religius. Gerakan fermentaso generasi terakhir dalam sejarah pendidikan Amerika diawali pada 1958 sampai tengah tahun 1970-an. Pada masa ini terjadi reformasi di bidang pendidikan yang berciri lebih menekankan fungsi daripada tujuan pendidikan. Sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi guru tumbuh, makin berpengaruh, dan memperoleh kekuatan politik. Hal itu menyebabkan guru bersatu untuk menuntut perbaikan ekonomi dan sosial.

Kondisi tersebut terus berlangsung hingga tahun 1980-an. Kelompok-kelompok agama dan para

pemimpin agama tetap mendukung gaya kapitalisme masyarakat Amerika dan mengecam humanisme sekuler. Terbukti bahwa agama masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam memberikan dukungan sosial dan mekanisme kontrol sosial(Dimyati, 1988:64). Dalam kondisi ini, maka pada awal *tahun 1980-an peminat public school merosot*. Ketika itu public school menghadapi suatu krisis kepercayaan umum dan moral profesional yang rendah. Masyarakat menghendaki terjadinya perubahan-perubahan pada "public school", tetapi para pengambil keputusan seringkali kurang memahami public education itu sendiri, sehingga mereka tidak dapat menentukan prioritas untuk memperbaiki lembaga ini (*public school*). Reformasi datang dan pergi silih berganti, tetapi pemecahan rasional yang dilakukan tidak menggarap masalah yang sebenarnya(Dimyati, 1988).

C. Politik Pendidikan Amerika

Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi.Sejak lama kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sejak tahun 1872 Pemerintah Pusat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik,membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan

Pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang Kembali ke kampus untuk menempuh Pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian,pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memb erikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.

Tetapi, sejak masa Pemerintahan Ronald Reagan menurut Usinfo (2004: 417-418) mengatakan Pemerintahan Pusat AS mengurangi intervensi terhadap pendidikan.Pemerintah mengurangi: (1) program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus" pemborosan, penipuan dan penyalahgunaan",(2) bantuan dana. (3) mengurangi campur tangan pemerintah federal terhadap pendidikan, (4) dan menyerahkan tanggung jawab dan inisiatif kepada Negara bagian.

Agustiar Syah Nur (2001: 14) mengatakan bahwa selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik(setingkat Kabupaten/Kota) yang jumlahnya adalah: 50 Negara

Bagian dan 15.358 Distrik. Jadi Lembaga Yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

Karena itu, sistem pendidikan Amerika Serikat adalah sangat menonjolnya desentralisasi.Pemerintah federal, Negara bagian, dan pemerintah daerah memiliki aturan dan tanggung jawab administratif masing-masing yang sangat jelas. Pemerintah federal Amerika serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Hal ini disebabkan soal pendidikan tidak disebutkan dalam konstitusi Amerika, dan para penyusun konstitusi menyebutkan bahwa semua kekuasaan yang tidak tersebut diberikan kepada pemerintah federal menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian.

Ada ketentuan dan aturan pemerintah federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat.Pemerintah federal juga mendukung penelitian pendidikan.Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat nasional.Tetapi, ini tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pendidikan. Sesungguhnya, ketiga badan legislative, yudikatif, dan eksekutif federal sangat aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai pendidikan, terutama sesudah perang Dunia II. Pemerintah federal ikut mengupayakan menghilangkan sistem sekolah yang memisah-misah sekolah

berdasarkan ras, khususnya antara anak-anak dari ras kulit hitam dan ras kulit putih; menyamakan lokasi pendanaan sekolah; menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat, dan juga berupaya memenuhi tuntutan atas pendidikan yang berkualitas serta tuntunan atas akuntabilitas sekolah. Partisipasi ini tidak berarti bahwa ada sistem pendidikan federal. Itu hanya berbagai cara bagaimana pemerintah federal bisa memberikan pengaruhnya dalam menentukan kebijakan pendidikan.

D. Penanggung Jawab Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan, yaitu "federal dengan desentralisasi" melalui pemerintahan negara-negara bagian (*states*).Penanggung Jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan Pemerintah Federal Washington D.C, tetapi kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada Kantor Pendidikan Distrik(*Public School District*),dan kepada badan-badan penyantun *college* dan universitas (Wulandari: 2008).

Karena desentralisasi maka Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian Dan Pemerintah Daerah(Distrik).Meskipun Amerika Serikat

tidak mempunyai sistem Pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional.

E. Sistem Pendidikan

Setiap Negara bagian menyediakan kependidikan secara gratis bagi anak-anak sekolah negeri mulai dari Tamat Kanak-kanak ditambah 12 tahun pada jenjang-jenjang berikutnya. Sungguh pun undang-undang tidak sama di antara Negara-negara bagian, tetapi pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi anak-anak dan remaja dari umur 6 atau 7-16 tahun.

Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat, akan tetap jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap Negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikan dari jenjang *Kindergarten* (usia 5-6 tahun) hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 (usia 18 tahun). Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar $500 triliun untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah.

Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah, maupun pada tingkat

pendidikan tinggi.Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola (Agustiar Syah Nur: 2001, 15)sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak + Pendidikan Dasar “grade” 1-8 + 4 tahun SLTA
2. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar grade 1-6+3 tahun SLTP+3 tahun SLTA;
3. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar “grade” 1-4/5+ 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman Kanak-Kanak + 12tahun, pada beberapa buah Negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (*Junior/ Community College*) sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah.

Dengan mengikuti empat pola pertama, pada umumnya, seorang siswa menamatkan pendidikannya pada umur 17-18 tahun.

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari *Kindergarten* hingga *Fifth grade* (Kelas 5), tetapi terkadang juga berjenjang hingga *Fourth grade* (kelas 4), *Sixth grade* (kelas 6) atau *eighth grade* (kelas 8) tergantung sistem kurikulum pada *school district* tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh *school district* mengacu pada standar pembelajaran di Negara

bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh *School district* yang harus mengacu *pada AYP (Adequate yearly program)*.

2. Pendidikan Menengah

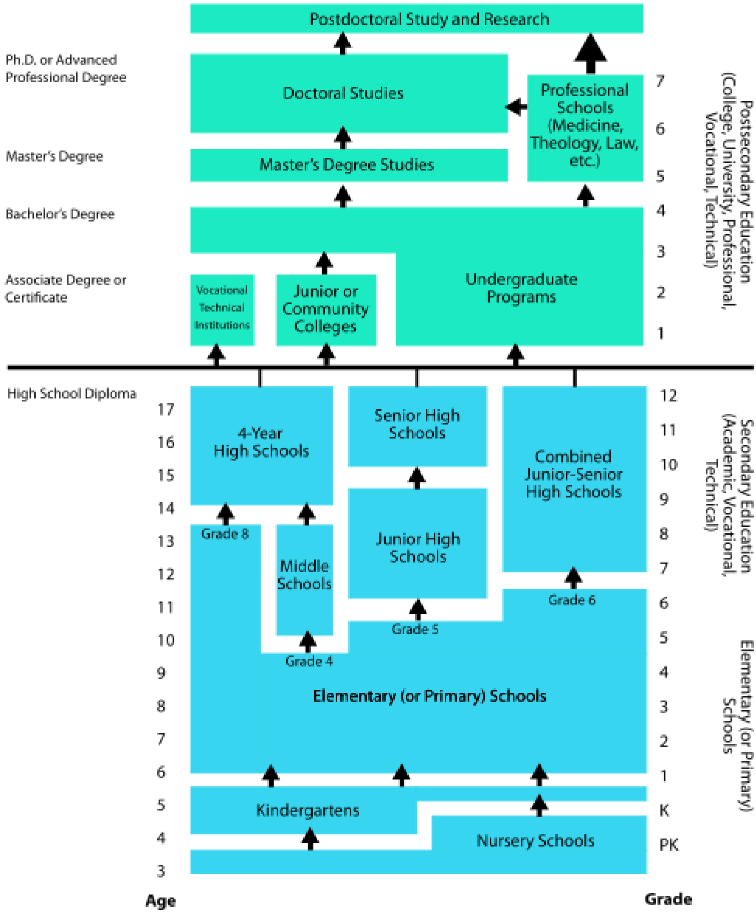
Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi dua tahap (*middle school/ junior high*) mulai pada jenjang *sixth, seventh*, eighth *and ninth* grade (kelas 6, 7, 8, 9) sebagai berikut:

Jenjang pendidikan pada *middle school/ junior high* (*grade*/kelas) ditentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah *(moving class*).

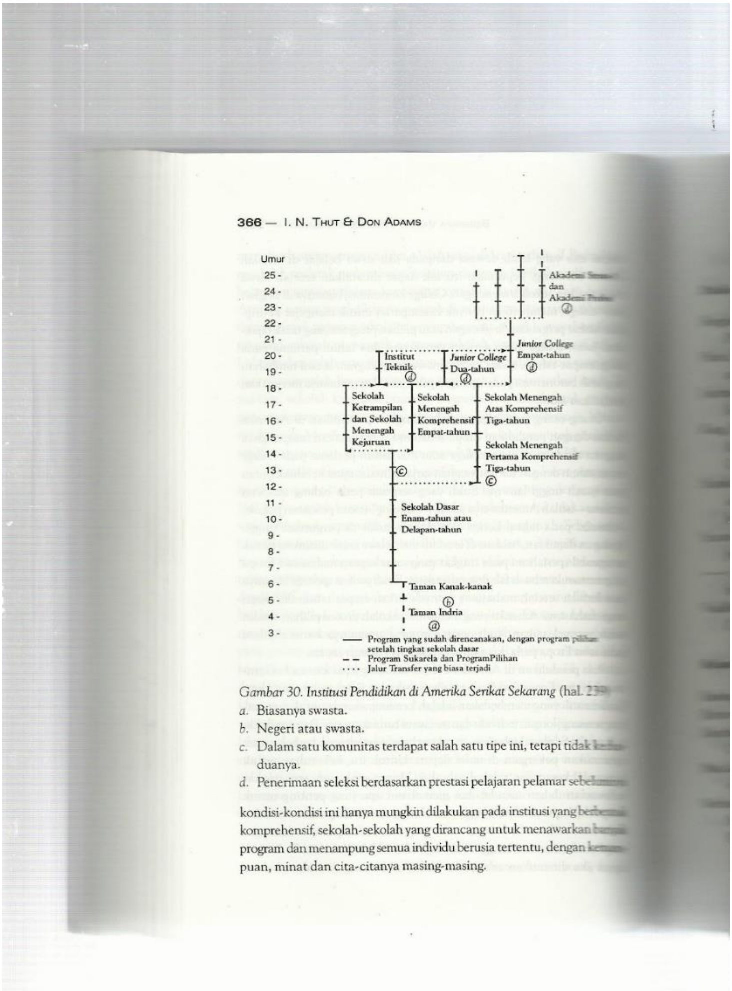
Senior High (kelas 9,10,11,12) adalah jenjang lanjutan setelah *middle school/ junior high*, biasanya Jenjang ini dimulai dari *ninth grade (freshman), tenth grade(sophomores), eleventh grade(Juniors), twelfth grade(seniors)*. Perlu diketahui bahwa jenjang middle school (Junior high) dan Senior high berbeda-beda di setiap Negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di Negara bagian tersebut.

Lebih jelas sistem pendidikan Amerika dapat dilihat dalam "Skema Sistem Pendidikan Dasar,

Menengah dan Lanjutan di Amerika Serikat" (en.wikipedia.org) sebagai berikut:



Lebih dalam I.N. Thut dan Don Adams (1984: 336) membuat skema "Institusi Pendidikan Amerika" sebagai berikut:

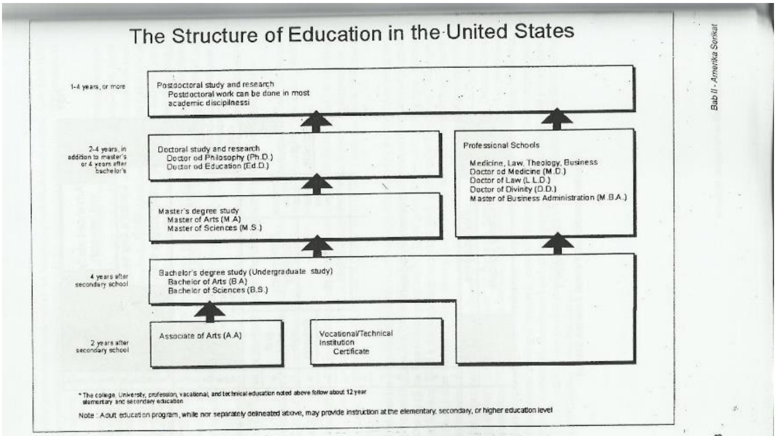


Gambar 30. Institusi Pendidikan di Amerika Serikat Sekarang (hal. 23

a. Biasanya swasta.
b. Negeri atau swasta.
c. Dalam satu komunitas terdapat salah satu tipe ini, tetapi tidak duanya.
d. Penerimaan seleksi berdasarkan prestasi pelajaran pelamar sebel

kondisi-kondisi ini hanya mungkin dilakukan pada institusi yang ber komprehensif, sekolah-sekolah yang dirancang untuk menawarkan program dan menampung semua individu berusia tertentu, dengan puan, minat dan cita-citanya masing-masing.

Selanjutnya dalam "The Structure of Education in the United States" (Agustiar Syah Nur: 2001, 18) sebagai berikut:



Gambar 2

Struktur Pendidikan Tinggi Amerika Serikat

3 Pendidikan Tinggi

1. College/Community College/Technical School : Associate Degree (berlangsung selama 2 tahun)
2. University/ Community College : Bachelor's Degree < 4 tahun
3. Under Graduate School = 4 tahun
4. Graduate School : Master Degree (berlangsung selama 2 tahun)

5. Post Graduate School :Doctor Degree (berlangsung selama 4 tahun)

Menamatkan program S-1 biasanya butuh 120 sampai 128 SKS dan sekitar 60 SKS bisa diambil di community college. Setelah 60 SKS terkumpul, mahasiswa akan mendapatkan gelar Associate Degree dan bisa melanjutkan studi ke universitas di AS selama dua tahun untuk S1

F. Kurikulum

Siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib (*mandatory subjects*) dan memiliki mata pelajaran pilihan (*electives*) adalah:

Pertama, Mata Pelajaran Wajib*(mandatory subjects)* meliputi: (1) *Science*(Ilmu pengetahuan alam) meliputi: Biologi, Kimia dan Fisika. (2) *Mathematics* (Matematika) meliputi: aljabar, geometri, precalculus dan statistika. (3) *English* (pelajaran bahasa inggris) meliputi: sastra, humaniora, mengarang dan verbal(praktek). (4) *Physical education* (Olahraga).

Kedua, Mata Pelajaran Pilihan(*electives*) meliputi: (1) *Atletik* meliputi: cross country, football, basketball, track and field, swimming, tennis, gymnastics, water polo, soccer, softball, wrestling, cheerleading, volleyball, lacrosse, ice hockey, field hockey, crew, boxing, skiing/snowboarding, golf, mountain biking dan marching band. (2) *Career and Technical Education*

meliputi: *agriculture (agriscience), Business (Marketing), Family and Consumer Science, Health languages.* (3)*Computer word processing* meliputi: *Languages And design.* (4) *Foreign Languages* meliputi: bahasa Spanyol dan Perancis (umum), Cina, Latin, Yunani, Jerman, italia dan Jepang (tidak umum). (5) *Performing Arts (Visual Arts)*meliputi: paduan suara, band, orchestra, drama, seni rupa, fotografi, *ceramics* dan *dance.* (6) *Publishing meliputi: Journalisme (Koran siswa), buku tahunan dan majala siswa.*

1. Ilmu Ekonomi dalam Pendidikan di AS

Negara Amerika Serikat menjadi pusat perekonomian dunia, dimana banyak sekali perusahaan kelas dunia yang berasal dari negara AS. Dengan begitu perkembangan ilmu ekonomi di AS tentunya cocok sebagai bahan pembelajaran untuk kuliah ekonomi. Salah satu universitas yang direkomendasikan adalah Massachusetts Institute of Technology dan Harvard University. Universitas ini bahkan menjadi ranking 1 dan 2 berdasarkan QS rankings untuk the world economics di tahun 2017. Universitas ini menawarkan program studi sarjana dan pascasarjana untuk gelar sarjana ekonomi.

Alasan utama para calon mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang memilih kuliah ekonomi di Amerika adalah agar kehidupan mereka di masa depan lebih sejahtera. Lulusan ekonomi Amerika dianggap memiliki peluang yang besar untuk bisa bekerja dengan

penghasilan yang cukup tinggi. Selain itu, rupanya ada beberapa alasan lainya yang membuat mereka ingin kuliah ekonomi di Amerika, yaitu:

1. Kuliah Ekonomi Lebih Terjangkau

Kuliah di Amerika memang identik dengan biaya kuliah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Namun, jika memilih kuliah ekonomi di Amerika, tentu biaya kuliahnya lebih terjangkau dibandingkan kuliah Kedokteran atau kuliah teknik di Amerika Kuliah Ekonomi Aplikatif dalam Keseharian Manusia. Kuliah ekonomi tidak hanya mengajarkan mengenai teori –teori ekonomi, namun kuliah ekonomi juga sangat aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satu cabang ilmu ekonomi seperti akuntansi, akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti oleh para pedagang hingga perusahaan.

2. Lulusan Ekonomi Memiliki Peran Strategis

Memilih kuliah ekonomi untuk menjadi tujuan kuliah kita dalam meraih gelar sarjana, tentunya akan memegang peranan penting serta strategis di dunia kerja nantinya. Beberapa bidang penting seperti banker, pengusaha, akuntan, manajer dalam suatu perusahaan adalah salah satu komponen perusahaan yang penting dan prospek kerja yang menjanjikan di kancah internasional.

3. Lulusan Ekonomi Dibutuhkan dalam Perdagangan Global

Perkembangan dunia perdagangan saat ini ternyata tidak hanya melibatkan manusia saja, tapi juga dengan perusahaan yang terkait denganya pada suatu wilayah atau Negara tertentu. Cakupan yang luas ini, membuat ekonomi global dan perdagangan dunia harus mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia dari negara yang menjadi subjeknya. Dalam hal ini, lulusan ekonomi tentu dibutuhkan untuk lingkup global.

4. Memiliki *International Networking*

Dengan kuliah ekonomi di Amerika, sudah jelas, Anda akan sering bertemu dengan beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi lainya yang berasal dari mancanegara. Anda akan memiliki international networking yang penting untuk masa depan, terutama dalam meningkatkan karir di bidang terkait.Biaya kuliah ekonomi di Amerika tentunya akan cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kuliah ekonomi di Indonesia.

Walau begitu, biaya kuliah yang lebih mahal ini tentunya sebanding dengan kualitas pendidikan yang didapatkan dan pengalaman kuliah terbaik saat kuliah ekonomi di Amerika. Untuk lebih jelasnya, berikut ini estimasi biaya kuliah ekonomi rata-rata di beberapa negara:

Negara Tujuan Kuliah	Biaya Kuliah	Biaya Dalam Rupiah
Universitas Swasta Top	$ 46.340	Rp. 725 jutaan per tahun
Universitas Swasta	$ 42.336	Rp. 663 jutaan per tahun
Universitas Negeri Top	$ 49.800	Rp. 779 jutaan per tahun
Community College	$ 2.355	Rp. 36 jutaan per tahun
Institusi	$ 1809	Rp. 28 jutaan per tahun

*Sesuai nilai kurs Februari 2022

Umumnya, biaya kuliah yang tertera di tabel belum termasuk biaya sehari-hari, akomodasi, serta biaya buku kuliah dan praktikum khusus. Untuk keringanan biaya kuliah di beberapa Negara tersebut, Anda dapat mencari informasi seputar beasiswa dari pemerintah Negara yang dipilih. Informasi tersebut dapat diakses di situs universitas masing-masing.

G. Guru/ Tenaga Kependidikan

Satu kelas terdiri dari 20-30 siswa. Guru Sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan *cognitive and psychological development.* Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan Sarjana dan atau

Pasca Sarjana (*Bachelors and/or Masters degree*) dalam bidang *Early Childhood and Elementary Education*.

H. Manajemen

Manajemen Pendidikan di dikembangkan berdasarkan "aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat". Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan sistem desentralisasi. Di Tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu **Departemen Pendidikan Federal**. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika ,sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam Pendidikan Amerika(DeliAS,2000:62-63).

Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet.Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerinta h federal dalam sektor Pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan.

1. *Otorire Pendidikan*

Lebih dalam lagi pemahaman manajemen dapat dijelaskan dengan melihat "Otorite Pendidikan" sebagai berikut:

Dalam sejarah pendidikan Amerika Serikat, pendidikan sudah lama menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian (State) dan masyarakat setempat.

1. Pemerintah Federal (Pusat)

Sejak 1872 Pemerintah Federal (Pemerintah Pusat) telah ikut campur tangan mulai dengan memberikan adalah:

a. Tanah Negara kepada Negara bagian guna pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik. Perguruan tinggi ini lazim disebut "land-grant college".
b. Pemerintah federal membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana bagi para veteran yang kembali kekampus untuk pendidikan lanjutan, dan menyediakan pinjaman bagi mahasiswa.
c. Pemerintah federal juga menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing serta berbagai kebutuhan mahasiswa yang lainnya.Walaupun bantuan langsung kepada sekolah- sekolah agama dilarang oleh undang-undang, tetapi secara tidak langsung bantuan itu diberikan dalam bentuk buku-buku teks dan berbagai laboratorium.

Semejak tahun 1979, dibentuklah Departemen Pendidikan Federal yang dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet dengan mengemban tugas melaksanakan semua kebijakan pemerintah mengenai pendidikan.

2. Pemerintah Daerah (Negara Bagian)

Di tingkat Negara bagian, pada umumnya kebijakan pendidikan dasar dan menengah dipegang oleh sebuah badan disebut "*Board of Education*" (BE). Pemimpin bagian pendidikan ini sering disebut "*Commissioner*" *atau "Superintendent*" biasanya ditunjukan oleh "*Board of Education"* atau oleh Gubernur, tetapi pada beberapa Negara bagian pemimpin itu dipilih, pada dasarnya, operasional sekolah dilaksanakan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan langsung oleh sesudah sekolah dasar. Mereka pada prinsipnya memiliki kebebasan atau otonomi yang luas.

BE bertanggung jawab sebagai berikut:

a. Berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan.

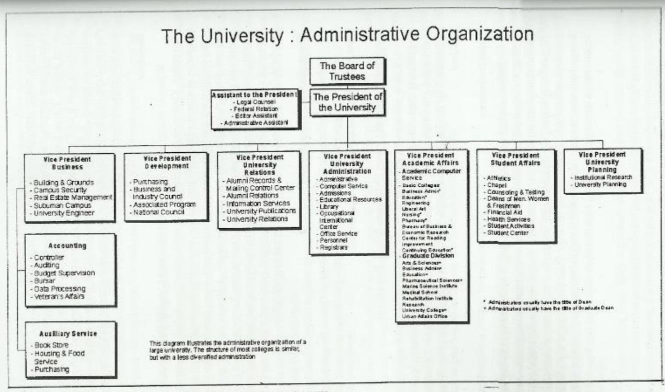
b. Departemen Pendidikan Negara bagian bertanggung jawab atas semua pendidikan pada semua tingkat dan kadang juga mencakup pendidikan tinggi.

c. Kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru dan pembiayaan sekolah menjadi tanggung jawab badan ini.

3. Anggota BE

Hampir semua Negara bagian memisahkan antara badan yang memberi Izin pendirian perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Badan tertinggi yang merumuskan kebijakan, seperti: kebijakan akademik dan keuangan adalah "*Board of Trustees*". Anggota badan ini perguruan tinggi negeri ditunjuk oleh gubernur Negara bagian, atau dipilih oleh kelompok yang akan diwakili, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta dipilih dari perguruan tinggi mereka sendiri. Walaupun Board of Trustees merupakan badan yang tertinggi, tetapi pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Presiden (Chancellor atau Rektor) beserta pembantu-pembantunya dan Senat.

Lebih lengkapnya dapat dilihat dari skema "Struktur Organisasi Universitas di Amerika" sebagai berikut (Agustiar Syah Nur: 2001, 22):



Sumber : American Council on Education: An International Visitor's Guide to Higher Education in the Unitor States (1999)

Gambar 3

Organisasi Universitas Amaerika Serikat

2. Personalia

Personalia dibagi menjadi dua adalah personalia dosen perguruan tinggi dan guru sebagai berikut:

1. Personalia Dosen

Pertama, kualifikasi dan Pengangkatan: Doktor atau kualifikasi Master (S-2) yang dapat dianggap memadai.Pada pengangkatan pertama, pangkat seorang dosen ditetapkan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, reputasi mengajar, penelitian dan publikasi.

Kedua, kepangkatan:Pangkat dosen perguruan tinggi Amerika Serikat yang lazim diberikan oleh institusi di mana ia mengajar. Urutan kepangkatan sebagai berikut: Instructor (dosen tetap tetapi bukan doctor),

Assistant Professor (doctor tapi belum pengalaman mengajar), Associate Professor (doctor yang telah bertugas 5-6 tahun), Profesor (doctor yang berpengalaman) dan Professor Emeritus. Lecturer (dosen tidak tetap), Adjunct Professor (dosen tidak tetap yang memberi kuliah dalam waktu tertentu misalnya satu atau dua semester) dan Professor Emeritus.

2. Personalia Guru.

Tahun 1990 tercatat 1.680.000 guru sekolah dasar dan 1.072.000 guru sekolah menengah. Pengangkatan guru dilakukan oleh Negara bagian dan masing-masing Negara bagian. Tahun 2000 dibutuhkan guru 35% lebih dari jumlah guru yang ada.

3. Pendanaan

Sumber keuangan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah pemerintah (*public schools*) terutama berasal dari daerah kabupaten dan sumber-sumber lokal lainnya, yang sebagian besar bersumber dari pajak bumi dan pajak-pajak Negara bagian.Secara nasional, dari kedua jenis sumber ini rata-rata 45% diperuntukkan bagi sekolah-sekolah.Akhir ini semakin meningkat, terutama untuk daerah-daerah yang tergolong miskin.

National Center of Education Statistics, U.S. Department of Education yang dimuat dalam "The World Almanac 2000 and Book of Fact", tercatat besarnya

anggaran yang tersedia: (1) untuk pendidikan dasar dan menengah pemerintah, termasuk Taman kanak-kanak, adalah USA$ 96, 881 juta 1980. Dalam tahun 1997 anggaran ini meningkat menjadi US$ 305,055 juta, yang berarti naik kurang lebih menjadi 315%. (2) untuk pendidikan tinggi meningkat, terutama bagi orang-orang yang kembali ke kampus untuk belajar (*continuing education*). Kontribusi pemerintah federal kepada pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta kurang 13,7%; pemerintah Negara bagian menyumbang 1/3 dari keseluruhan biaya, dan dari sumber-sumber lain (uang kuliah mahasiswa, bantuan swasta, sumbangan sukarela, dan lain-lain) kurang lebih 50%.

Pada umumnya, beban biaya pendidikan yang diperuntukan bagi mahasiswa negeri lebih berat dibanding beban biaya untuk mahasiswa swasta, kurang lebih 2:1 dan biaya itu naik kira-kira 10% setiap tahun. Diperkirakan 50% dari mahasiswa yang masuk perguruan tinggi memperoleh bantuan keuangan dalam bentuk beasiswa, penghapusan sebagian atau seluruhnya pembayaran di sekolah, atau pemberian pinjaman berjangka panjang dengan bunga rendah.

Bantuan financial yang disediakan pemerintah bagi mahasiswa dikelola dalam bentuk Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Pelamar biasanya dilakukan awal Januari untuk bantuan tahun ajaran yang

dimulai September.Jenis bantuan dan pinjaman itu cukup banyak tersedia.

Gaji seorang guru di AS mengutip dari https://edukasi.sindonews.com/ (2022: Akses 21 November) sebesar $60.000/ Tahun jika dirupiahkan sekitar Rp. 858.000.000/tahun. Ini menempatkan AS sebagai negara di peringkat ke-7 dengan standar gaji guru tertinggi di dunia Pendidikan. Sementara untuk dosen yang mengajar di perguruan tinggi, mengutip dari https://www.pilihprofesi.com/gaji-dosen-harvard/ (2022: akses 21 November) seorang dosen yang mengajar di Harvard University memperoleh penghasilan $ 6.054/Bulan atau sekitar Rp. 55.3 Juta rupiah per bulan. Ini belum ditambah dengan tunjangan profesi, Kesehatan,. Prestasi dan tunjangan-tunjangan lainnya.

4. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Pemerintah yang memberi kurikulum yang resmi tetapi tidak ada kurikulum nasional yang resmi.Pemerintah pusat mengijinkan negara bagian mengembangkan kurikulum dengan tingkat variasi kebutuhan masing-masing. Tetapi, para profesor,organisasi guru profit bidang studi tertentu dan Badan Testing Pendidikan yang berstatus swasta mendorong adanya penyeragaman kurikulum secara nasional. Para ahli mata pelajaran, administrator

sekolah, dan guru-guru semuanya terlibat dalam proses pengembangan kurikulum.

Pada awalnya sekolah-sekolah Amerika sangat dipengaruhi oleh agama dan sangat berfokus pada keterampilan dasar menulis baca. Semenjak pertengahan abad ke 19, dengan berlakunya sekularisasi sekolah, perhatian terhadap masalah-masalah sosial makin menonjol, terutama pada penyatuan para imigran yang berpindah-pindah dan bertebaran dengan cara mengajarkan nilai-nilai budaya Amerika dan bahasanya.

Pada akhir abad ke-19, muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan murid yang berbeda-beda (yang bersifat intelektual, sosial, fisik, dan emosional), serta perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan individu. Pada awal tahun 1980-an ada kecenderungan untuk kembali pada lama, “back to basics”, serta kebutuhan baru atas pendidikan karir.

5. Kenaikan Kelas, Ujian, dan Sertifikasi

Kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan kelas murid-murid sekolah ditentukan oleh daerah setingkat kecamatan atau Negara bagian.Dalam prakteknya, anak-anak boleh tinggal kelas dan mengulang lagi apabila performasinya memang tidak memuaskan.Mereka ditahan dengan maksud agar keberadaannya di sekolah, dari pendidikan dasar sampai SLTA, sesuai dengan

umurnya.Sistem ini menimbulkan kebijakan kenaikan otomatis setelah masing-masing anak yang mengulang sudah mencapai umur yang sesuai dengan kelasnya.Hal ini dilakukan karena banyak murid yang lambat di sekolah karena faktor umur yang terlalu muda.Namun praktek seperti ini kelihatannya juga memberi hasil yang memuaskan.

Tidak ada ujian nasional. Untuk memperoleh diploma SLTA tidak dituntut suatu ujian resmi, tetapi kehadiran murid atau siswa serta raportnya yang baik memang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh negara bagian.Tamat dari SLTA pada dasarnya sudah cukup sebagai syarat untuk memasuki perguruan tinggi negeri, walaupun ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan ujian masuk.Dalam hubungan ini, dua badan non-profit memainkan perannya, yaitu Dewan Ujian Masuk Perguruan Tinggi (The College Entrance Examination Board) dan Dewan Testing Pendidikan (Education Testing Service) yang melaksanakan ujian terhadap para pelamar yang ingin masuk perguruan tinggi, dan tes ini bisa dipakai secara nasional.

6. Penelitian Pendidikan

Pemerintah federal sudah sejak lama mendukung berbagai penelitian pendidikan, walaupun hanya kira-kira 25% dana yang disediakan. Dukungan dana lain sebagian besar diberikan oleh badan-badan swasta,

perguruan tinggi, dan bagian pendidikan pemerintah Negara bagian.

7. Akreditasi

Akreditasi bukan dilaksanakan oleh Pemerintah melainkan otonom yang mencakup adalah: sukarelawan, non-pemerintah dan independen. Bagian Pendidikan Pemerintah Amerika Serikat tidak bertanggung jawab dalam hal akreditas, pengontrolan mutu atau standar pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak menteri pendidikan di Negara-negara lain. Proses akreditasi dikoordinasikan oleh badan akreditasi pendidikan tinggi (Council for Higher Education Accreditation, CHEA). CHEA membantu menjaga kemandirian serta otonomi proses akreditasi regional, komisi pendidikan tinggi, dan kelompok-kelompok bidang studi yang mengakreditasi bidang profesi tertentu. Tetapi,karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian Dan Pemerintah Daerah,maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja (Wulandari: 2008).

Jenis-jenis akreditasi sebagai berikut:

(1) Akreditasi institusional. Akreditasi ini disepakati oleh komisi akreditasi regional dan nasional untuk sekolah dan perguruan tinggi yang secara bersama-sama melayani hampir seluruh lembaga baik yang swasta

maupun negeri di Amerika Serikat. Sungguhpun akreditasi pada umumnya diberikan untuk waktu tertentu, biasanya 10 tahun, badan akreditasi boleh melakukan pemeriksaan atas institusi anggota ataupun program kapan saja.Akreditasi institusional, walaupun sifatnya sukarela penting artinya bagi kelangsungan hidup lembaga.Ini berguna bagi orang tua, calon mahasiswa, dan konselor untuk mempertimbangkan perguruan tinggi mana yang sebaiknya dimasuki.

(2) Akreditasi bidang studi. Akreditasi ini disepakati komisi yang menetapkan oleh organisasi profesi secara nasional untuk mendapatkan jaminan atas kesiapan program studi tertentu. Badan akreditasi ini memiliki kewenangan, kriteria akreditasi serta prosedur pelaksanaannya.Banyak yang beranggapan bahwa permohonan untuk diakreditasi hanya datang dari program-program yang telah berafiliasi dengan institusi yang telah memiliki status terakreditasi.Tetapi banyak badan-badan yang melakukan akreditasi oleh program studi tertentu pada perguruan tinggi-perguruan tinggi independent.Oleh karena akreditasi ini sering dipakai oleh pihak pemerintah dalam hal pemberian izin-izin, maka tamat dari program studi yang terakreditasi menjadi sangat penting.Khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan izin-izin praktek, seperti mahasiswa arsitektur, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa kedokteran, perawat dan sebagainya.

AFRIKA SELATAN



SISTEM PENDIDIKAN REPUBLIK AFRIKA SELATAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Afrika Selatan diatur oleh dua departemen nasional, yaitu *Department of Basic Education* (DBE) yang bertanggung jawab atas sekolah dasar dan menengah, dan *Department of Higher Education and Training* (DHET) yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dan pelatihan. Sebelum tahun 2009, kedua departemen ini hanya berada dalam satu Departemen yaitu Departemen Pendidikan. Hal ini terbukti baik dilaksanakan di Afrika Selatan dimana diketahui bahwa Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki indeks literasi yang tinggi di Benua Afrika. Menurut *The World Factbook - Central Intelligence Agency* dengan data yang diambil pada tahun 2019, 95% masyarakat Afrika Selatan dengan usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis. (*Literacy - the World Factbook*, t.t.)

Departemen DBE sendiri diketahui menangani beberapa kelompok institusi. Adapun institusi dibawah DBE yaitu sekolah negeri, sekolah swasta (juga disebut oleh departemen sebagai sekolah mandiri), pusat pengembangan anak usia dini (PAUD), dan sekolah kebutuhan khusus. Sekolah negeri dan sekolah swasta

secara umum dikenal sebagai sekolah biasa yang jumlahnya paling banyak dari seluruh sekolah yang ada di Afrika Selatan. Sementara Departemen DHET meliputi *Department of Higher Education and Training* (FET) yang sekarang dikenal sebagai *Technical and Vocational Education and Training* (TVET), *adult basic education and training* (ABET), dan *higher education* (HE).

Pada tahun 2010, DBE mengorganisir 12.644.208 peserta didik, 30.586 sekolah, dan 439.394 guru (South Africa. Department of Basic Education., 2010). Di tahun yang sama DHET mengorganisir 837.779 siswa di HE, 420.475 siswa di lembaga FET dan 297.900 di pusat ABET (South Africa. Department of Basic Education., 2010). *The Human Rights Measurement Initiative* (HRMI) menemukan bahwa Afrika Selatan telah memenuhi 71,4% hak atas pendidikan masyarakat dengan *Gross Domestic Products* (GDP) Per Kapita ("South Africa - HRMI Rights Tracker," t.t.). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Afrika Selatan telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan di Negaranya dengan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan.

Selain itu Warisan Apartheid, pengelompokkan ras dan bahasa masih kuat terasa di Afrika Selatan. Hal ini diperparah juga dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat pengelompokkan ras yang berlarut-larut. Sistem Pendidikan memiliki peran penting untuk menyembuhkan perpecahan yang terjadi dan

menumbuhkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Afrika Selatan. Dalam hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Afrika Selatan dalam mengakses Pendidikan diharapkan dapat meruntuhkan ketidaksetaraan mendalam yang melingkupi masyarakat Afrika Selatan.

Pendidikan apartheid ditandai tidak hanya oleh adanya tekanan rasial kepada peserta didik, tetapi juga adanya pendidikan yang terpisah untuk peserta didik penyandang cacat dimana pendidikan yang mereka dapat peroleh hanya sampai dengan Kelas 7 (Department of Basic Education Republic of South Africa, 2018). Pemisahan program Pendidikan ini juga terlihat di dalam pelatihan yang diberikan kepada guru di mana kelompok guru 'ras' yang berbeda mendapatkan pelatihan yang berbeda dalam hal sumber daya, kualitas, dan dorongan ideologisnya. Guru individu, serikat guru, universitas, LSM dan pemerintah telah melakukan banyak pekerjaan selama bertahun-tahun untuk mengikis warisan ketidaksetaraan ini melalui program pelatihan *in-service* dan promosi nilai-nilai bersama. Namun warisan ini tetap ada dan perlu dipertimbangkan dalam desain pelatihan dalam jabatan dan dalam program pelatihan yang menargetkan guru selama bertahun-tahun yang akan datang.

Pengeluaran untuk mendapatkan Pendidikan yang dilakukan oleh negara dengan politik apartheid sangat

tidak setara dan dibedakan berdasarkan ras dan etnis. Bahkan menjelang akhir apartheid, pada tahun 1994, pengeluaran pemerintah untuk mensubsidi setiap pelajar kulit putih masih sekitar 4,5 kali lebih tinggi daripada pelajar kulit hitam (Statistics South Africa, 2022). Pengeluaran pemerintah untuk membantu peserta didik baru sepenuhnya diterapkan sekitar tahun 2000 (Department of Basic Education Republic of South Africa, 2018). Namun, warisan ketidaksetaraan sebagai akibat dari subsidi yang tidak merata selama bertahun-tahun tetap masih terasa, baik dalam hal modal fisik (seperti gedung sekolah) maupun modal sumber daya manusia (sebagian besar karena ketidaksetaraan warisan pelatihan guru yang disebutkan di atas) yang bersangkutan. Memang kalau kita melihat standar negara berkembang, ukuran sektor sekolah swasta di Afrika Selatan termasuk kecil. Namun, membolehkan sekolah swasta membebankan biaya terhadap siswa di sekolah telah menguntungkan kelas menengah dan memperkuat ketidaksetaraan yang terlihat dalam sistem sekolah negeri dan swasta. Faktor-faktor historis ini membuat sistem pendanaan sekolah Afrika Selatan menjadi kompleks dan dalam banyak hal menjadi sangatlah unik. Tantangan utama bagi Pendidikan di Afrika Selatan adalah mengenai bagaimana meningkatkan kesetaraan dalam sistem Pendidikan di sekolah yang beroperasi dalam masyarakat yang sangat tidak setara. Mengurangi ketidaksetaraan dalam

pendidikan dasar, terutama yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki siswa saat menyelesaikan program pendidikan merupakan hal mendasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih setara. Prioritas juga untuk menyediakan pendidikan inklusif yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas.

Selain itu warisan kolonialisme juga bertahan di Afrika Selatan melalui dominasi bahasa kolonial. Bahasa Inggris meskipun hanya dituturkan oleh sekitar 4% pelajar di sekolah negeri sebagai bahasa rumah, Bahasa inggris tetap merupakan bahasa utama buku teks yang digunakan di dalam kelas dan dokumen-dokumen kebijakan sistem(Department of Basic Education Republic of South Africa, 2018). Walaupun begitu pemerintah Afrika Selatan melakukan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tidak sepenuhnya menggunakan Bahasa Inggris, tetapi juga menggunakan Bahasa Rumah atau Bahasa daerah setempat. Hal ini agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan.

Dengan berbagai latar belakang yang telah dibahas di atas sangat menarik bagi kita untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya sistem Pendidikan di Afrika Selatan dan bagaimana mereka dapat terlepas dari politik apartheid yang berkembang di sana.

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum

1. Jenjang Pendidikan

DBE secara resmi mengelompokkan jenjang menjadi dua "band" yang disebut Pendidikan dan Pelatihan Umum (GET), yang mencakup kelas 0 plus kelas 1 hingga 9, dan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (FET), yang mencakup kelas 10-12. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

BEFORE GET	GET FOUNDATION PHASE	GET INTERMEDIATE PHASE	GET SENIOR PHASE	FET	AFTER FET
Grade 000	Grade 0/R	Grade 4	Grade 7	Grade 10	
Grade 00	Grade 1	Grade 5	Grade 8	Grade 11	
	Grade 2	Grade 6	Grade 9	Grade 12	
	Grade 3				

Tabel 1. Grade Sekolah pada Sistem Pendidikan di Afrika Selatan

GET (Gerakan Pendidikan dan Pelatihan Umum) dibagi lagi menjadi "fase" yang disebut Fase Dasar (kelas 0 ditambah kelas 1 hingga 3), Fase Menengah (kelas 4 hingga 6), dan Fase Senior (kelas 7 hingga 9) . Lalu setelah menyelesaikan fase menengah, siswa dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan ke Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan pada kelas 10 hingga kelas 12. Adapun kelas 10 ke 12 ini merupakan kelas pilihan dimana siswa dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti kelas. Hal ini dikarenakan di negara Afrika

Selatan, setelah siswa menyelesaikan Pendidikan sampai pada kelas 9, mereka diperbolehkan untuk langsung mendaftar di tingkat perguruan tinggi. Selain itu terdapat juga kelas *Reception* (Penerimaan) sebelum siswa memasuki kelas reguler. Namun kelas ini merupakan kelas pilihan dan tidak wajib diikuti oleh seluruh siswa. Terdapat kelas 000 sampai dengan kelas 0 yang dapat diikuti oleh masyarakat Afrika Selatan.

Namun, struktur jenjang sebagian besar sekolah biasa di Afrika Selatan tidak mencerminkan pembagian kelompok dan fase yang seperti digambarkan di dalam tabel. Hal ini dikarenakan pembagian ini baru dimulai semenjak tahun 2009 setelah Departemen Pendidikan Afrika Selatan dibagi menjadi DBE dan DHET. Sebelum itu Afrika Selatan menggunakan kelas R ditambah kelas 1 hingga 7 sebagai sekolah dasar dan kelas 8 hingga 12 sebagai kelas menengah. Sehingga daerah masih terbawa dengan jenjang Pendidikan yang lama. Namun secara administrasi kependidikan tetap mengikuti arahan dari DBE.

2. Kurikulum

Adapun kurikulum yang digunakan dalam Pendidikan di Negara Afrika Selatan adalah kurikulum R-12. Dimana kurikulum ini diharapkan dapat mengarahkan siswa pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang layak dipelajari di sekolah-sekolah Afrika Selatan. Kurikulum ini bertujuan untuk

memastikan bahwa anak-anak Afrika Selatan memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang mereka miliki dengan cara yang berarti bagi kehidupan mereka sendiri. Dalam hal ini, kurikulum Afrika Selatan mengajarkan pengetahuan dalam konteks lokal namun tetap peka terhadap imperatif global.

Adapun kurikulum R-12 berfungsi untuk (South Africa. Department of Basic Education., t.t.):

a. membekali peserta didik, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, ras, jenis kelamin, kemampuan fisik atau kemampuan intelektual, dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk pemenuhan diri, dan partisipasi yang berarti dalam masyarakat sebagai warga negara bebas;
b. menyediakan akses ke pendidikan tinggi;
c. memfasilitasi transisi peserta didik dari lembaga pendidikan ke tempat kerja; dan
d. menyediakan pengusaha dengan profil kompetensi pelajar yang memadai.

Pelaksanaan Kurikulum Nasional R-12 di Afrika Selatan juga harus melalui beberapa prinsip yaitu (South Africa. Department of Basic Education., t.t.):

a. Transformasi sosial: memastikan bahwa ketidakseimbangan pendidikan di masa lalu

diperbaiki, dan bahwa kesempatan pendidikan yang sama disediakan untuk semua bagian dari populasi;

b. Pembelajaran aktif dan kritis: mendorong pendekatan pembelajaran yang aktif dan kritis, daripada pembelajaran hafalan dan tidak kritis dari kebenaran yang diberikan;

c. Pengetahuan tinggi dan keterampilan tinggi: standar minimum pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai di setiap kelas ditentukan dan ditetapkan standar tinggi yang dapat dicapai dalam semua mata pelajaran;

d. Perkembangan: isi dan konteks setiap kelas menunjukkan perkembangan dari sederhana ke kompleks;

e. Hak asasi manusia, inklusivitas, keadilan lingkungan dan sosial: menanamkan prinsip dan praktik keadilan sosial dan lingkungan dan hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi Republik Afrika Selatan. Pernyataan Kurikulum Nasional Kelas R12 sensitif terhadap isu-isu keragaman seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ras, jenis kelamin, bahasa, usia, kecacatan dan faktor lainnya;

f. Menilai sistem pengetahuan adat: mengakui kekayaan sejarah dan warisan negara ini sebagai kontributor penting untuk memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi; dan

g. Kredibilitas, kualitas dan efisiensi: menyediakan pendidikan yang sebanding dalam kualitas, luas dan kedalaman dengan pendidikan negara lain.

Kurikulum R12 juga memiliki tujuan dalam pembentukannya yang diantaranya adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat (South Africa. Department of Basic Education., t.t.):

a. mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta membuat keputusan dengan menggunakan pemikiran kritis dan kreatif;

b. bekerja secara efektif sebagai individu dan dengan orang lain sebagai anggota tim;

c. mengatur dan mengelola diri sendiri dan kegiatannya secara bertanggung jawab dan efektif;

d. mengumpulkan, menganalisis, mengatur, dan mengevaluasi informasi secara kritis;

e. berkomunikasi secara efektif menggunakan keterampilan visual, simbolik dan/atau bahasa dalam berbagai mode;

f. menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan kritis menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan orang lain; dan

g. menunjukkan pemahaman tentang dunia sebagai satu set sistem terkait dengan mengakui bahwa konteks pemecahan masalah tidak ada dalam isolasi.

C. Staf Pengajar

Mengajar adalah profesi mulia yang dimana sangat membutuhkan semangat, komitmen, toleransi, ketekunan, karakter, dan dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Profesi ini akan memberikan kesempatan untuk memelihara dan membentuk pikiran-pikiran muda dalam rangka mengembangkan berbagai keterampilan penting yang digunakan seumur hidup oleh masyarakat. Oleh karena itu tentu dalam pelaksanaannya haruslah dengan memilih guru yang baik dan memenuhi beberapa persyaratan dasar. Adapun persyaratan dasar pertama untuk menjadi guru di Afrika Selatan adalah telah mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (B.Ed.) ataupun diploma yang dilengkapi dengan Sertifikat Pascasarjana dalam Pendidikan (PGCE) yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun (*Initial Teacher Education*, t.t.). Setelah menyelesaikan kedua hal tersebut barulah seorang calon guru dapat dianggap berkualifikasi profesional untuk menjadi seorang guru. Setelah itu seorang calon guru mendaftarkan dirinya ke Dewan Pendidik Afrika Selatan (SACE). Adapun untuk mendaftarkan diri, seorang calon guru di Afrika Selatan juga harus menyesuaikan program pendidikannya dengan pekerjaan yang ingin diambil (*National Recruitment Database*, t.t.). Hal ini dilakukan pemerintah Afrika Selatan demi menyelaraskan latar belakang

pendidikan guru dengan tujuan tempat guru tersebut bekerja.

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara

DBE saat ini sedang berfokus kepada peningkatan infrastruktur sekolah; menyediakan bahan pendukung berkualitas tinggi untuk pelajar dan guru; memfasilitasi peningkatan pasokan guru yang berkualitas sambil mempersiapkan guru yang melayani untuk mengajar mata pelajaran baru yang akan mempersiapkan peserta didik untuk dunia yang terus berkembang; mengambil alih fungsi PAUD dari sektor pembangunan sosial; dan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik melalui program gizi sekolah nasional.

Alokasi dana ke DBE selalu meningkat pada tingkat tahunan rata-rata 3,3 persen, dari R28,5 miliar pada 2021/22 menjadi R31,4 miliar pada 2024/25. Transfer dan subsidi menyumbang sekitar 84 persen dari pengeluaran departemen, meningkat pada tingkat tahunan rata-rata 4,2 persen, dari R23,6 miliar pada 2021/22 menjadi R26,6 miliar pada 2024/25 (Department of Basic Education Republic of South Africa, t.t.).

Peningkatan ini dikarenakan DBE berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur fisik dan lingkungan di setiap sekolah umum di sektor pendidikan dasar. Untuk tujuan ini, pengeluaran untuk hibah infrastruktur

pendidikan dan hibah backlog infrastruktur sekolah dalam program Perencanaan, Informasi dan Penilaian menyumbang sekitar 51,8 persen (R47,4 miliar) dari total anggaran departemen selama periode KPJM (Department of Basic Education Republic of South Africa, t.t.). Hibah infrastruktur pendidikan dialokasikan R38,8 miliar selama periode ini, termasuk tambahan R470,5 juta untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak akibat badai di KwaZulu-Natal. Dana dari hibah ini ditransfer ke provinsi sebagai hibah bersyarat tambahan untuk membantu mempercepat pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur baru dan yang ada di sektor pendidikan dasar.

Dana dari hibah backlog infrastruktur sekolah dimaksudkan untuk menyediakan air dan sanitasi bagi sekolah, dan untuk menggantikan sekolah yang dibangun dengan bahan yang tidak sesuai seperti lumpur. Dalam jangka menengah, R6,7 miliar dialokasikan untuk hibah untuk membangun 30 sekolah baru, menyediakan air untuk 50 sekolah, dan menyediakan sanitasi yang aman bagi 450 sekolah. Proyek-proyek ini direncanakan akan selesai pada akhir 2022/23, setelah itu hibah backlog infrastruktur sekolah akan dimasukkan ke dalam hibah infrastruktur pendidikan.

Departemen memastikan bahwa semua pelajar memiliki akses ke materi pendukung berkualitas dalam

bahasa, matematika dan keterampilan hidup dengan mencetak dan mendistribusikan ke semua sekolah umum yang memintanya; menargetkan 65 juta buku kerja untuk 9 juta pelajar di kelas R sampai 9 setiap tahun selama periode KPJM. Untuk tujuan ini, R3,7 miliar dialokasikan selama periode mendatang dalam subprogram Kurikulum dan Program Peningkatan Kualitas dalam program Kebijakan, Dukungan dan Pemantauan Kurikulum.

Skema beasiswa Funza Lushaka yang diusung oleh Afrika Selatan mengatasi kekurangan pendidik kritis di bidang mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains dan teknologi di berbagai fase sekolah dengan memberikan beasiswa kepada calon guru. Selama periode KPJM, R4,1 miliar dialokasikan untuk skema dengan tujuan menyediakan lebih dari 36.000 beasiswa. Dalam beberapa waktu ke depan, departemen berencana untuk memperkenalkan mata pelajaran baru seperti coding, robotika, dan analisis data di sekolah dasar. Untuk tujuan ini, R78,5 juta diprioritaskan dari skema beasiswa Funza Lushaka untuk melatih guru dalam mata pelajaran ini.

Mulai April 2022, DBE akan secara penuh mengambil alih fungsi PAUD dari Departemen Pembangunan Sosial. Departemen juga mengambil alih tanggung jawab untuk hibah pengembangan anak usia dini, yang dialokasikan R3,7 miliar selama periode KPJM.

Pada 2022/23, R1,1 miliar dialokasikan untuk subsidi PAUD untuk menyediakan dan meningkatkan jumlah anak yang mengakses layanan PAUD bersubsidi; dan R97,9 juta dialokasikan untuk peningkatan pemeliharaan guna mendukung penyedia PAUD dan untuk percontohan pembangunan pusat PAUD baru yang berbiaya rendah.

E. Sistem Pembelajaran

Pengelolaan Pendidikan di Afrika Selatan dilakukan oleh dua Departemen yaitu DBE dan DHET. DBE dipimpin oleh Mrs Angelina Matsie Motshekga sebagai Menteri dengan bantuan Dr Makgabo Regina Mhaule selaku wakil Menteri dan Mr Hubert Mathanzima Mweli selaku Direktur Jenderal. Sementara DEATH dipimpin oleh Dr Blade Nzimande selaku menteri dengan bantuan Mr Bhuti Manamela selaku wakil menteri. Kedua departemen ini mendapat pendanaan dari pemerintah pusat Afrika Selatan melalui Pajak Negara. Namun dalam pelaksanaannya DBE hanya membayar sebagian dari gaji guru di sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta secara penuh dibiayai oleh yayasannya sendiri. Sekolah negeri dalam keadaan tertentu dapat menambah dana mereka melalui kontribusi orang tua. Terdapat *School Governing Body* (SGB) yang bertanggung jawab untuk penggalangan dana di sekolah. Di sekolah dasar SGB sendiri terdiri dari orang tua, guru dan staf pendukung.

Sementara untuk sekolah menengah SGB terdiri dari orang tua, guru, staf pendukung dan peserta didik.

1. *Department of Basic Education*

Department of Basic Education (DBE) terbentuk ketika mantan Departemen Pendidikan Nasional dibagi menjadi dua departemen. Salah satu departemen yang dibentuk adalah DBE. DBE saat ini mengelola semua sekolah dari Prasekolah sampai Kelas 12. Selain itu juga ada program keaksaraan untuk orang dewasa. Tujuan dari adanya DBE adalah untuk mengembangkan, memelihara dan mendukung sistem pendidikan di Afrika Selatan untuk abad ke-21.

Visi dari DBE adalah mengusahakan agar semua masyarakat Afrika Selatan memiliki akses kepada pembelajaran seumur hidup serta pendidikan dan kesempatan pelatihan yang pada gilirannya mereka akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan Afrika Selatan yang damai, sejahtera dan demokratis (*About DBE*, t.t.). adapun Misi DBE yaitu mewujudkan kepemimpinan yang stabil dalam sistem pendidikan Afrika Selatan di abad ke-21.(*About DBE*, t.t.)

a. Sekolah *Inclusive*

NDP membayangkan sistem pendidikan yang akan membangun “masyarakat inklusif, memberikan kesempatan yang sama dan membantu semua orang Afrika Selatan untuk mewujudkan potensi penuh

mereka, khususnya mereka yang sebelumnya dirugikan oleh kebijakan apartheid, yaitu orang kulit hitam, perempuan dan penyandang disabilitas" (NDP, hal.296). DBE menyelaraskan dirinya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dari akses, ganti rugi, kesetaraan, efisiensi, kualitas dan inklusivitas. Kewajiban kebijakan kami mencakup penetapan kapasitas manajemen, kebijakan, perencanaan dan pemantauan yang efektif untuk memandu dan mendukung pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan inklusif. Ini termasuk memastikan bahwa kesulitan belajar tidak hanya dirasakan berada di dalam diri seorang pelajar, tetapi juga dalam berbagai aspek sistem. Tabel 4 menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam memastikan inklusivitas dalam sistem pendidikan dasar. Kehilangan pembelajaran akibat COVID-19 mengancam peningkatan gambaran pemerataan dalam sistem persekolahan.

Kriteria	**2002**	**2018**
Jumlah Sekolah Khusus	295	501 (447 Publik, 54 Swasta)
Jumlah Peserta Didik di Sekolah Khusus	64000	93699
Jumlah Sekolah dengan layanan penuh	30	848

Jumlah peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum biasa	77000	121461
Jumlah anak dengan disabilitas intelektual berat hingga berat yang didukung di pusat perawatan khusus	Dimulai pada tahun 2018	6654

Sumber: (Department of Basic Education, 2020)

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD saat ini dikelola juga oleh DBE walau masih baru berumur pendek. Afrika Selatan saat ini menjadikan subsektor ini sebagai prioritas utama untuk lima tahun ke depan. Penting untuk dicatat bahwa perluasan akses ke PAUD menjadi timbal balik terhadap apa yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya dimana akses terhadap Pendidikan masih sulit bagi warga lokal. Kehadiran Kelas R berbasis sekolah meningkat dari 13% menjadi 72% dari kelompok usia lima tahun antara 1999 dan 2017 (Department of Basic Education, 2020). Namun, lebih banyak pekerjaan jelas perlu dilakukan di provinsi-provinsi tertentu, terutama KwaZulu-Natal dan Northern Cape, untuk meningkatkan akses ke peluang PAUD di antara anak usia 3 sampai 4 tahun. Selain infrastruktur, pemerintah juga harus memperkirakan hilangnya pendapatan rumah tangga dan pekerjaan sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini

diperlukan karena dapat mengurangi jumlah peserta didik yang mengikuti PAUD.

Namun masih terdapat kekhawatiran mengenai kualitas dari Kelas R dan pra-sekolah. Evaluasi Kelas R berbasis sekolah seperti yang ada pada periode 2005 hingga 2011 telah ditugaskan oleh Pemerintah dan diterbitkan. Evaluasi ini mengungkapkan dampak rendah dari Kelas R di sekolah yang berada di daerah kurang mampu (Department of Basic Education Republic of South Africa, 2018). Kualitas Kelas R berbasis sekolah kemungkinan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya setelah adanya rencana kerja nasional dan materi lainnya di tingkat ini. Meskipun begitu kualitas dari Kelas R tetap menjadi prioritas pemerataan yang penting bagi pemerintah Afrika Selatan untuk kedepan.

Adapun kelas R berjalan selama 1 tahun. Sebelum kelas R terdapat kelas 0, 00, dan 000 dimana kelas itu berlaku untuk anak-anak Usia dini dalam bentuk kelompok bermain. Kelas 0 sendiri sering disamakan dengan kelas R dikarenakan proses pembelajaran yang hampir sama. Adapun waktu yang ditempuh untuk setiap tingkatan adalah 1 tahun. Adapun fokus pembelajaran di kelas 000, 00, 0, dan R adalah pengenalan angka, membaca, dan memahami makna kalimat (Department of Basic Education Republic of South Africa, 2010).

c. Sekolah Dasar

Partisipasi dalam Sekolah Dasar sudah terlaksana hampir di keseluruhan Afrika Selatan. Sekitar 99% anak-anak berusia 7 hingga 13 tahun sudah bersekolah menurut data dari *General Household Survey* (Statistics South Africa, 2022). Adapun tingkat penyelesaian sekolah dasar diperkirakan sekitar 95%. Pencapaian ini dapat dikaitkan dengan sejumlah kebijakan dan program sekolah yang berpihak pada masyarakat miskin, seperti sekolah gratis dan Program Gizi Sekolah Nasional (NSNP). Sejak 2010, persentase peserta didik yang memperoleh manfaat dari NSNP telah meningkat dari sekitar 70% pada tahun 2010 menjadi sekitar 82% pada tahun 2018. Proporsi peserta didik yang memperoleh manfaat dari NSNP tertinggi ditemukan di provinsi-provinsi yang dianggap kurang mampu dimana kebutuhan akan peningkatan Gizi masih tergolong besar.

Fokus pengembangan pada sekolah dasar di Afrika Selatan saat ini berfokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Secara khusus, diakui bahwa pembelajaran dasar dalam literasi dan numerasi masih sangat minim di banyak sekolah, dan penting untuk pembelajaran selanjutnya. PIRLS 2016 dan TIMSS 2015 memberikan ukuran tren pembelajaran yang dihormati secara internasional dari waktu ke waktu dan studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak Afrika Selatan dapat mencapai Kelas 4 tanpa harus belajar

membaca dan memaknai bahan bacaan serta dapat mencapai Kelas 5 tanpa mencapai kemampuan berhitung dasar (Department of Basic Education, 2020). Hasil ini memberikan tantangan bagi pemerintah Afrika Selatan untuk meningkatkan kualitasnya pada Pendidikan dasar.

Telah banyak hal yang membuktikan tentang pentingnya kemampuan membaca pada anak-anak di sekolah dasar, dan saat ini Afrika Selatan masih mencari formula yang paling baik untuk memperbaiki situasi. Penelitian terobosan di Afrika Selatan untuk memperbaiki hal ini adalah EGRS yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh DBE. Adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa organisasi mitra untuk menghasilkan pengetahuan khusus tentang kemampuan membaca pada siswa Pendidikan dasar di Afrika Selatan. Studi tersebut menegaskan bahwa keterampilan membaca yang lebih baik di kalangan pelajar dapat dicapai melalui materi yang lebih baik (khususnya rencana pelajaran dan materi bacaan berjenjang dalam bahasa Afrika) dan pelatihan guru tentang cara menerapkan kurikulum. Yang penting, EGRS menguji berbagai metode pelatihan guru dalam jabatan dan menyimpulkan bahwa pendekatan tertentu yang melibatkan beberapa pembinaan individual lebih disukai namun harus dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Semua hal yang terbukti berhasil dalam EGRS akan

dimasukkan ke dalam rencana pengembangan lebih lanjut.

Kombinasi dari peningkatan pendaftaran siswa dan kenaikan upah di atas inflasi dalam beberapa tahun terakhir telah menempatkan sektor pendidikan dasar berada di bawah tekanan keuangan yang luar biasa. Salah satu efeknya adalah memperburuk rasio pelajar-pendidik, yang menyebabkan ukuran kelas menjadi lebih besar. Perlu diketahui pemerintah memberikan bantuan biaya untuk sekolah di daerah yang kurang sejahtera. Selain itu hal ini diperparah dengan tingkat pengulangan kelas yang tinggi, bahkan di Fase Dasar. Di Kelas 1 sekitar 15% peserta didik mengulang, sedangkan angkanya sekitar 10% untuk Kelas 2 dan 3. Ini berkontribusi secara signifikan terhadap ukuran kelas yang lebih besar (Department of Basic Education, 2020). Beberapa pakar pendidikan Afrika Selatan berpendapat bahwa membuat peserta didik mengulang di Fase Dasar lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Oleh karena itu pemerintah perlu mempersiapkan solusi yang dapat mengurangi masalah ini kedepannya dengan cara menganggarkan biaya lebih untuk membantu siswa dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu.

Adapun pada tahap sekolah dasar dapat ditempuh selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namun dalam realisasinya, 6 kelas tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas

4 sampai dengan kelas 6. Adapun pembahasan fokus pembelajaran masih terdapat pada peningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Adapun pada kelas 4 sampai kelas 6, siswa dituntut untuk dapat memaknai setiap pembelajaran yang ada dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Fase Menengah Keatas

Partisipasi dalam Sekolah Menengah dan atas di Afrika Selatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan ini telah berfungsi untuk mengurangi ketidaksetaraan historis sebagai akibat dari adanya politik apartheid. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan Kelas 9 terus meningkat sejak tahun 2009 dengan mempersempit kesenjangan antar kelompok penduduk.

Seperti yang telah disebutkan ketika membahas Sekolah Dasar, jantung pembangunan yang berada di sektor Pendidikan harus berfokus pada apa yang dipelajari peserta didik. Adapun indikator keberhasilannya dapat dilihat dari hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik. Indikator ini sangat penting bagi Afrika Selatan untuk mengetahui perkembangan Pendidikan di masyarakatnya. Meskipun angka perkembangannya masih tergolong rendah, peningkatan hasil belajar sudah dapat terlihat dari tahun ke tahun.

Ketika DBE menetapkan target TIMSS dalam hal literasi numerik menjadi sektor prioritas yang dilakukan untuk sampai tahun 2014, ada harapan bahwa target yang lebih tinggi dapat dicapai. Harapan ini ada karena hasil TIMSS 2011 dan 2015 terdapat peningkatan yang signifikan untuk literasi numerik masyarakatnya. Adapun peningkatan ini sebanding dengan negara-negara dengan peningkatan tercepat di dunia (misalnya, peningkatan PISA6 Brasil antara tahun 2000 dan 2012). Ini menempatkan Afrika Selatan di jalur yang tepat untuk mencapai target TIMSS jangka panjangnya. Jika tren peningkatan ini berlanjut, Afrika Selatan akan mencapai tingkat kinerja yang baik untuk memajukan tingkat kemampuan literasi penduduknya. Keberhasilan peningkatan kemampuan literasi di Afrika selatan memberikan tahu kita mengenai beberapa kemungkinan pendorong perubahan di sektor ini (Department of Basic Education Republic of South Africa, 2018): (1) peningkatan akses ke Grade R dan pra-sekolah di bawah Kelas R; (2) perangkat CAPS yang dirancang untuk memfasilitasi implementasi kurikulum di kelas; (3) akses siswa yang lebih baik ke buku-buku berkualitas tinggi, seperti buku kerja nasional; (4) praktik penilaian yang lebih terfokus; dan (5) peningkatan pengetahuan mata pelajaran di kalangan guru yang masih baru menyelesaikan studi (*fresh graduate*).

Adapun fase menengah ke atas pada Pendidikan di Afrika Selatan terbagi dua bagian yaitu kelas 7, 8, dan 9 serta kelas 10, 11, dan 12. Dalam sistem Pendidikan Afrika selatan, kelas 7, 8, dan 9 wajib diikuti oleh masyarakat Afrika Selatan jika ingin mengikuti studi lanjutan. Namun berbeda dengan kelas 10, 11, dan 12 yang tidak wajib diikuti. Masyarakat dapat memilih mengikuti kelas 10, 11, dan 12 maupun mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendukung kemampuan mereka. Siswa yang telah lulus dari kelas 9 dapat langsung mengikuti jenjang perkuliahan.

e. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan

DBE berencana untuk membuat semua pemuda memperoleh *National Senior Certificate* (NSC) atau kualifikasi yang setara, baik dari sekolah atau lembaga TVET. Rencana strategis ini juga menekankan pencapaian NSC yang memungkinkan para pemuda Afrika Selatan untuk mengikuti studi tingkat Sarjana di universitas yang mereka inginkan serta memperoleh nilai minimal 50% dalam Matematika dan Ilmu Fisika (Department of Basic Education, 2020). Dalam bidang Matematika, ambang batas 50% ini adalah batas nilai terendah yang diterapkan oleh Universitas untuk masuk ke dalam program universitas yang berorientasi matematis seperti akuntansi dan ekonomi.

Masyarakat yang mendapatkan NSC bertambah secara konsisten sebesar 2.2% per tahunnya

(Department of Basic Education, 2020). Namun yang perlu diketahui adalah sebagian besar pelajar yang telah memperoleh NSC kebanyakan tidak lulus di tingkat sarjana. Mereka hanya lulus pada tingkat Diploma ataupun strata yang lebih rendah.selain itu peningkatan kelulusan di tingkat Sarjana mendapatkan angka sebesar 4,3% per tahun(Department of Basic Education, 2020). Walaupun terlihat lebih banyak, tetapi perlu diketahui berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa jumlah pemuda yang telah mendapatkan NSC berjumlah 2x lebih banyak daripada yang telah menyelesaikan/mengikuti studi Sarjana. Namun walaupun begitu, dengan meningkatkan 4.3% per tahun secara konsisten, pemerintah Afrika Selatan yakin bahwa masyarakatnya kedepan akan mendapatkan akses yang cukup kepada Pendidikan di tingkat Universitas agar jumlah masyarakatnya yang mendapatkan NSC dan Sarjana akan bertambah.

Adapun Target pemerintah yaitu mendapatkan 270.000 kelulusan NSC tingkat Sarjana pada tahun pada 2019 (sedang proses penghitungan) dan meningkat menjadi 435.000 pada 2030. NDP menetapkan target 425.000 lulusan universitas yang dihasilkan setiap tahun pada 2030. Sementara peningkatan tahunan 4,3% dalam jumlah NSC tingkat Sarjana membawa negara lebih dekat ke target ini, kira-kira dua kali lipat peningkatan yang

diperlukan antara 2019 dan 2030 jika target 2030 ingin dicapai.

2. *Department of Higher Education and Training (*DHET*)*

Rencana untuk penerimaan mahasiswa pada tahun 2020 hingga 2025 yang dirancang oleh pemerintah mencakup lulusan untuk program studi Kesehatan Hewan dan Manusia (Ilmu Hewan, Ilmu Kedokteran Hewan dan Kesehatan Manusia), Pendidikan Guru, Teknik, Ilmu Pengetahuan Alam dan Fisika. Target ini akan dilakukan pemantauan setiap tahun demi keberhasilan program dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang diinginkan pada tahun 2030.

Namun terdapat tantangan untuk melakukan pembukaan lapangan kerja di bidang yang telah direncanakan. Universitas yang terkait dengan Teknologi dan Komprehensif memang memiliki kemitraan industri sebagai sarana penempatan kerja. Namun peluang itu sangat terbatas dikarenakan iklim ekonomi yang dimana masih terdapat kesenjangan yang diakibatkan apartheid. Pada tahun 2020, Universitas Afrika Selatan (USAf), mengembangkan "Pedoman pelaksanaan universitas terkait *Work Integrated Learning* (WIL) dalam konteks pandemi COVID-19".(Department of Higher Education and Training, 2022) Pedoman tersebut merupakan kontrak sosial untuk memastikan WIL yang bermakna dapat terjadi. Dalam hal ini, pedoman bertujuan untuk

memastikan bahwa siswa dapat lulus dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

DHET saat ini bekerja sama dengan USAf dalam program Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi (EDHE). Program EDHE berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan mahasiswa, akademisi dan pimpinannya. Tujuannya adalah agar mahasiswa menjadi aktif dan berhasil dalam segi ekonomi baik pada saat menjalani perkuliahan maupun setelah lulus. Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan selama studi memungkinkan mahasiswa untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan mempercepat proses kemapanan ekonomi mereka. Diharapkan dengan adanya hal ini setelah mereka lulus, mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja sebagai wirausahawan. Terutama ketika mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Demi menunjukkan keseriusannya dalam hal meningkatkan jiwa wirausaha mahasiswa, pemerintah Afrika Selatan melakukan penelitian pengembangan ekosistem kewirausahaan sebagai proyek utama dalam Program EDHE pada tahun 2019 (Department of Higher Education and Training, 2022). Penelitian ini dilakukan oleh *Pivot Global Education*, untuk DHET dan USAf serta British Council. Studi ini dinilai dapat berkontribusi pada tujuan program EDHE, yaitu untuk mendukung

pengembangan universitas berbasis kewirausahaan. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada pembentukan dasar-dasar kewirausahaan di universitas bagi seluruh civitas akademikanya. Memahami ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang relevan dengan universitas merupakan titik tolak utama untuk pengembangan strategi kewirausahaan universitas.



MESIR





SISTEM PENDIDIKAN MESIR

A. Latar Belakang

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km^2 Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km^2). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramida Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politik utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.

Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Diantara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sistem Pendidikan di negara Mesir meliputi:

1. Pendidikan (Riyadul Atfal)
2. Sekolah Dasar (Ibtida'i).
3. Sekolah Menengah Pertama (I'dadi).
4. Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah 'Ammah).
5. Pendidikan Tinggi (Universitas)

Negara mesir menjadi salah satu primadona mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi belajarnya, yakni salah satunya di Al-Azhar dan Cairo University, banyaknya minat mahasiswa di Negara Mesir didukung dengan banyak beasiswa yang ditawarkan di negara tersebut, dan banyaknya lulusan mahasiswa mesir yang memiliki peran penting di Indonesia seperti KH. Abdus Shomad, KH. Zainul Majdi, KH Abdurrahman Wahid dll. Namun perlu di garis bawahi bahwasannya

pemberi beasiswa tersebut bukan dari pemerintahan negara Mesir yang mana notabene perekonomian mesir masih cukup rendah, melainkan dari Al-azhar langsung. Uniknya beasiswa yang ditawarkan oleh Al-azhar hanya dalam bidang keagamaan, seperti ilmu tafsir hadis, filsafat islam, ilmu al-qur'an dan lain-lain. Namun di tahun 2022 Indonesia mendapatkan jatah 50 penerima beasiswa untuk melanjutkan studi umum, seperti kedokteran, perdagangan, tekhnik dll. Hal tersebut berkat kerjasama diplomasi yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Al-azhar untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut di kemudian hari untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum

1. Jenjang Pendidika

a. Sistem Pendidikan Formal

Sistem pendidikan mesir mempunyai dua struktur parallel:struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler diatur oleh Kementrian Pendidikan. Struktur Al-Azhar dilaksanakan oleh kementrian Agama di negara- negara lain.Selain dari kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang diikuti sejumlah kecil anak-anak. Misalnya, anak cacat masuk ke sekolah-sekolah khusus, bagi yang ingin menjadi militer

masuk ke sekolah militer, dan ada pula generasi muda yang meninggalkan sekolahnya dan mendaftar pada program-program nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai badan atau lembaga.

b. Sistem Sekolah Al-Azhar

Sistem sekolah ini hampir sama dengan sistem sekolah sekuler ada tingkatan sekolah dasar. Perbedaannya ialah bahwa pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan. Tetapi, untuk mata pelajaran kurikulumnya seperti pada sistem sekolah sekuler.Grade 10 dan Grade 11 sama untuk semua murid. Pada akhir Grade 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum dua tahun lagi atau masuk ke sekolah agama selama dua tahun. Pada level universitas fakultas-fakultasnya sama dengan yang ada pada pendidikan sekuler tetapi kuri kulumnya lebih menekankan kepada keagamaan. Selanjutnya, seluruh pendidikan guru untuk pendidikan keagamaan hanya diselenggarakan dalam lingkungan sistem Al-Azhar.

c. Pendidikan Vokasional

Teknik Upaya untuk memperluas pendidikan tujuan (Vokasional) dan pendidikan teknik dimulai tahun 1950 an. Jumlah sekolah vokasional dan teknik meningkat dari 134 (dengan 310.800 siswa) dalam tahun 1952 menjadi 456 buah (dengan siswa 115.600) dalam tahun 1960. Antara 1970 dan 1988 jumlah siswa ada dua

jenis sekolah ini naik dari 275.300 orang menjadi 978.800. ini berarti kenaikan 19% dan 40% ada kedua periode tersebut. Dalam tahun 1988, Mesir memiliki 563 buah sekolah vokasional dan teknik yang berarti 48,7% dari seluruh sekolah yang ada. Jumlah murid pada sekolah-sekolah ini melampaui jumlah sekolah menengah umum. Pada sekolah vokasional dan teknik pada tahun 1988 jumlah murid adalah 759.700 orang, sedangkan jumlah murid sekolah menengah umum 564.688 orang

d. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana diluar sistem pendidikan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu apakah itu anak-anak,generasi muda, atau orang dewasa; apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang, atau pengrajin; apakah mereka dari keluarga orang kaya atau keluarga miskin. Di Mesir, pendidikan nonformal terutama dikaitkan dengan penghapusan literasi. Dengan demikian, kebanyakan program lebih dikonsentrasikan pada pendidikan nonformal ada dalam aspek tersebut.

e. Sistem Sekolah Sekuler Pendidikan

Sistem Sekolah Sekuler Pendidikan wajib di mesir berlaku sampai Grade 8 yang ingin dikenal sebagai

pendidikan dasar. Ada pendidikan taman kanak-kanak dan playgroup yang mendahului pendidikan dasar, tapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan berada di kota-kota. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang dikenal dengan "Sekolah Dasar" mulai dari "Grade" 1 sampai "Grade"5, dan jenjang kedua, yang dikenal dengan "Sekolah Persiapan", mulai dari "Grade 6" sama "Grade" 8. Sekolah persiapan ini baru menjadi pendidikan wajib dalam tahun 1984, sehingga nama"Sekolah Persiapan" tidak tepat lagi. Setelah mengikuti pendidikan dasar selama delapan tahun, murid-murid punya empat pilihan: tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah menengah umum,memasuki sekolah teknik menengah tiga tahun, atau memasuki sekolah teknik lima tahun. Pada sekolah umum tahun pertama (Grade 9) adalah kelas pertama pada Grade 10 murid harus memilih murid harus memilih antara bidang sains dan non sains (IPA vs Non IPA) untuk Grade 10 dan 11.

Pendidikan tinggi di Universitas institusi spesialisasi lainya mengikuti pendidikan akademik umum. Pendidikan pada sebagian lembaga pendidikan tinggi berlangsung selama dua, empat atau lima tahun tergantung pada program dan bidang yang dipilih. Semenjak tahun 1951 sebagian tamatan sekolah teknik dibolehkan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada level pendidikan tinggi, struktur sekuler mempunyai 220

fakultas dan institusi pendidikan lainnya dengan 16.000 staf pengajar dan 695.736 mahasiswa.

Dari perkembangan waktu sistem pendidikan di Mesir mengalami perubahan dari mata pelajaran yang diajar sistem pembelajaran maupun kurikulum pembelajaran. Hal ini sesuai dengan sumber resmi dari kementrian pendidikan negara Mesir sebagai berikut.

1. mata pelajaran yang sama di seluruh jurusan
    a. Bahasa Arab
    b. Bahasa Asing pertama (biasanya bahasa Inggris)
    c. Bahasa Asing kedua (Perancis, Italia, Jerman, dll)
2. Mata pelajaran yang sama antara siswa jurusan ilmu Alam dan ilmu
    a. MTK
    b. Fisika
    c. Kimia
3. Mata pelajaran siswa ilmu IPA
    a. biology
    b. geology
4. Mata pelajaran siswa ilmu MTK
    a. MTK murni: aljabar, arsitektur
    b. MTK terapan: estetika, dinamika
5. Mata pelajaran siswa kesusastraan

a. sejarah

b. geografi

c. psikologi

d. filsafat dan logika.

6. Ditambah dengan mata pelajaran yang tidak termasuk dalam pengelompokan tapi siswa dituntut untuk lulus di jurusan manapun:

a. Pendidikan Agama

b. pendidikan kebangsaan

c. statistik dan ekonomi.

7. Jenis-jenis Sekolah yang ada di negara Mesir

Secara umum, ada dua jenis sekolah pemerintah yaitu Sekolah Arab dan Eksperimental Language Schools.

a. Sekolah Arab

Pemerintah menyediakan kurikulum nasional dalam Bahasa Arab. Sebuah kurikulum pemerintah bahasa Inggris diajarkan mulai pada tahun keempat Primer dan Perancis ditambahkan sebagai bahasa asing kedua di Pendidikan Menengah.

b. Eksperimental Language Schools,

Guru mengajar sebagian besar kurikulum pemerintah (Sains, Matematika dan Komputer) dalam bahasa Inggris, dan menambahkan Perancis sebagai

bahasa asing kedua di Persiapan Pendidikan. Advanced kurikulum bahasa Inggris disediakan dalam semua tahap pendidikan. Pelajaran sosial diajarkan dalam bahasa Arab. Siswa diterima ke dalam kelas pertama pada umur tujuh; satu tahun lebih tua dari sekolah-sekolah Arab. Secara umum, terdapat empat jenis sekolah swasta:

1. Sekolah Ordinary, kurikulum mereka sangat mirip dengan sekolah-sekolah pemerintah, tetapi sekolah-sekolah swasta lebih memperhatikan siswa kebutuhan pribadi dan fasilitas sekolah.
2. Sekolah Bahasa, sebagian besar mengajarkan kurikulum pemerintah dalam bahasa Inggris, dan menambahkan Perancis atau Jerman sebagai bahasa asing kedua Mereka diharapkan menjadi lebih baik daripada sekolah-sekolah lain, karena fasilitas yang tersedia, namun biaya mereka jauh lebih tinggi. Beberapa sekolah tersebut menggunakan bahasa Perancis atau Jerman sebagai bahasa pengantar utama, tetapi mungkin sulit bagi siswa untuk belajar di universitas pemerintah dalam bahasa Arab atau Inggris sesudahnya.
3. Sekolah Agama, adalah sekolah yang berorientasi religius sebagai sekolah Azhar.
4. Sekolah Internasional, adalah sekolah swasta yang mengikuti kurikulum negara lain, seperti

Inggris, Amerika, atau sistem Perancis, dan gelar yang diterima dari mereka mendapatkan sertifikasi resmi dari Departemen Pendidikan, untuk dapat memenuhi syarat untuk mendaftar ke universitas-universitas Mesir, seperti sekolah menawarkan bahkan lebih baik daripada fasilitas & kegiatan reguler sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi, tapi dikritik akan menyediakan tingkat pendidikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum umum, dan beberapa universitas Mesir memerlukan nilai lebih tinggi daripada siswa sekolah reguler sebagai minimum untuk pendaftaran, atau ekstra ijazah sekolah tinggi seperti SAT. Banyak sekolah swasta yang dibangun oleh misionaris, saat ini berafiliasi dengan gereja-gereja dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan tambahan, bersama dengan kurikulum nasional, seperti *American High School Diploma, sistem IGCSE Inggris, Perancis baccalauréat, Abitur Jerman dan International Baccalaureate.*

2. Pengembangan Kurikulum di Negara Mesir.

Kementerian pendidikan Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan untuk guru-guru pada semua jenjang pendidikan mulai dari guru taman kanak-kanak sampai dengan guru sekolah

menengah. Sistem yang dikembangkan berupa training jarak jauh (distance training) melalui video conference yang sekali tayang dapat melibatkan lebih dari 9000 guru diberbagai daerah yang sudah dibangun fasilitas training secara interaktif. Training model ini diselenggarakan oleh pusat pengembangan teknologi untuk training guru atau yang disebut technology development centre (TDC) dengan melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai perguruan tinggi, TDC sangat berperan dalam menyediakan layanan training untuk guru yang melalui perangkat teknologi yang diciptakan dan mempercepat akses pelatihan dan kuliah bagi guru didaerah terhadap sistem pelatihan yang lebih bermutu dan terkontrol.

Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar pendidikan nasional berdasarkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir. Standar nasional ini berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun demikian pada tingkat implementasi kurikulum, kementerian pendidikan mesir lebih bertanggung jawab untuk pengembangan pendidikan di tingkat secondary education dan tanggung jawab juga sampai pada penyelenggaraan ujian nasional. Sementara itu untuk pengembangan dan implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan Pre-School dan Elementary Education menjadi tanggung jawab tingkat distrik, dan pada tingkat Preparatory Education pada tingkat Kota atau tingkat Provinsi.

Untuk pegembangan evaluasi pendidikan NCEEE (National Center For Examination and Education Evalution) atau pusat pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan yang terletak di al-madina al-munawara street, Cairo juga memiliki peranan penting. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan yang bersifat otonomi oleh kementrian Pendidikan Mesir yang didirikan untuk menyelenggarakan kebutuhan kajian saintifik untuk kebutuhan pengujian data, evaluasi pendidikan agar kurikulum yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target, membangun karakter siswa dan mempromosikan kemampuan, kreativitas dan kecakapan siswa dalam berbagai bidang budaya, ilmu dan teknologi. NCEEE dilengkapi dengan fasilitas komunikasi informasi dengan internet yang konek ke semua departemen yang dioperasikan dengan menggunakan satelit.

Pengembangan evaluasi dilakukan secara serempak pada siswa semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang menjadi fokus pengembangan mencakup semua mata pelajaran. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum yang juga menjadi tanggung jawab NCEEE, semua mata pelajaran sudah dikembangkan dalam bentuk buku pelajaran, yang disebarkan ke setiap sekolahan. Untuk menunjang efektifitas penggunaan buku, NCEEE juga

mengembangkan sejumlah CD interaktif yang dapat digunakan pada proses pembelajaran siswa dan training guru.

3. Isu Penting dalam Pendidikan Ekonomi di Negara Mesir

Berdasarkan hasil wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan ananda Zainal Fanani salah seorang mahasiswa dari Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, dan wawancara langsung dengan guru besar Universitas Islam Negeri Surabaya Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said M.A beliau adalah alumni Universitas Al-azhar, dapat dijelaskan bahwa pendidikan ekonomi secara praktek sudah diajarkan sejak kelas paling bawah yakni di jenjang pendidikan Riyadul Atfal, karena anak- anak sudah diajarkan bagaimana pentingnya menabung, bagaimana memanfaatkan barang bekas dan lain-lain. Namun secara materi pendidikan ekonomi diajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah 'Ammah) yakni dengan nama mata pelajaran statistik dan ekonomi.

Mata pelajaran tersebut wajib ditempuh oleh semua jurusan yang ada di negara Mesir,mengingat di negara Mesir memiliki 3 jurusan yaitu (1) jurusan ilmu IPA (2) jurusan ilmu Matematika (3) kesusastraan. Dari ketiga jurusan tersebut memiliki bidang spesifikasi ilmu yang dikaji. Namun dari ketiga jurusan tersebut diwajibkan untuk menempuh mata pelajaran pendidikan

agama, pendidikan kebangsaan, statistik ekonomi. Sedangkan pada pendidikan tinggi atau tingkat Universitas terdapat fakultas *Iqtishad* (ekonomi) dan fakultas Attijaroh (perdagangan), fakultas ekonomi lebih mendalami ilmu ekonomi sedangkan fakultas perdagangan lebih mendalami ke praktek nya, seperti bisnis wirausaha dll. Dan juga terdapat

C. Staf Pengajar

Berdasarkan hasil wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan ananda Zainal Fanani salah seorang mahasiswa dari indonesia yang saat ini menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar mendapatkan hasil jabaran sebagai berikut, proses kualifikasi guru formal yang diterapkan di tingkat dasar (*al-asasi)* dan menengah (*al-tsanawi*), di mana guru diharuskan menyelesaikan 4 tahun di universitas sebelum bergabung dengan profesi guru. Pada spesifiknya sehubungan dengan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan tingkat pengajaran matematika dan ilmu teknologi, Akademi Guru Kejuruan menawarkan beberapa program, seperti guru profesional juga berpartisipasi dalam program pelatihan kejuruan internasional. Secara keseluruhan persyaratan untuk menjadi guru di negara Mesir tidak jauh beda dengan persyaratan yang ada di Indonesia.

1. Syarat-syarat dan ketentuan menjadi guru di negara Mesir

a. Tingkat pendidikan Ijazah universitas
b. Sertifikasi profesional diperlukan sebagai penunjang
c. Mampu mengoperasikan komputer
d. Mampu berbahasa resmi yakni Bahasa Arab
e. Pengalaman kerja jika diperlukan dan akan berdampak pada rata-rata gaji
f. Hari kerja minggu- kamis
g. Umur pensiun usia 60 tahun

2. Besaran gaji di negara Mesir

Ada perbedaan gaji guru matematika dengan gaji guru umum umum yang besarnya kurang lebih sebagai berikut:

a. Guru matematika menerima gaji rata-rata sebesar USD 285
b. Guru non matematika menerima gaji rata-rata sebesar USD 282
c. Besaran gaji tersebut belum termasuk tunjangan yang diterima oleh –masing-masing guru.
d. gaji tersebut di bayar dalam mata uang lokal (Pound Mesir).

D. Anggaran Biaya Pendidikan Negara

Berdasarkan data dari website resmi Bank Dunia (2022) pada tahun 2020 Mesir tercatat memberikan persentase pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah sebesar 2,5%. Dimana anggaran ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 2,6. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia yang mengeluarkan dana pendidikan yakni sebesar 20%.

Namun pada anggaran tahun 2022- 2023 Menteri Perencanaan Hala El Said memaparkan rencana pembangunan berkelanjutan pemerintah untuk TA 2022-2023 dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat anggaran yang akan datang, Pendidikan menyumbang 26,8% dari hampir 2,1 triliun yang direncanakan untuk dibelanjakan tahun depan, dengan sekitar 555,6 juta EGP dialokasikan untuk investasi dan pengeluaran di bidang pendidikan, pendidikan tinggi, dan penelitian akademik hal tersebut mengalami kenaikan kurang lebih naik hampir 22,8% dari tahun fiskal saat ini.

Hal tersebut dilakukan pemerintah agar lebih fokus pada mengisi kekurangan guru dan ruang kelas dan mengembangkan infrastruktur sekolah. Lebih rincinya Pendidikan Riyadul Atfal - Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah 'Ammah). Mendapatkan sebesar EGP 317 miliar dari total alokasi anggaran untuk pendidikan,

yang setara dengan 15,3% dari seluruh anggaran. Pendidikan tinggi mendapatkan EGP 159,2 miliar, atau sekitar 7,7% dari total pengeluaran negara. Sementara EGP 79,3 miliar didedikasikan untuk penelitian ilmiah, terhitung hampir 4% dari seluruh anggaran, dan menandai peningkatan sebesar dari tahun fiskal saat ini .Peningkatan dalam penelitian ilmiah sangat penting untuk meningkatkan banyak potensi bagi peneliti akademis negara untuk berkembang ke kancah internasional. (Enterprise.press : 2022).

E. Sistem Pendidikan dan Pembelajaran di Negara Mesir

Sistem pendidikan Mesir terdiri dari tiga jenjang: jenjang pendidikan dasar (*marhalah al-ta'lim al-asasi)* dari usia 4-14 yaitu pendidikan anak (*riyadul atfal)* selama dua tahun, kemudian enam tahun jenjang dasar (*ibtidaiyah*), tiga tahun jenjang persiapan (*I'dadiyah*). Setelah itu diikuti jenjang menengah *(tsanawiyah*) selama tiga tahun dari umur 15-17 tahun kemudian jenjang perguruan tinggi. Mesir mewajibkan wajib belajar selama Sembilan tahun sekitar usia 9-14, di samping itu pendidikan tersebut gratis di seluruh jejang bagi sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Menurut bank dunia (*bank al-dauli)* terdapat perbedaan signifikan antara capaian pendidikan (*al-tahshil al-dirasi*) antara kaya dan miskin, yang juga dikenal dengan istilah kesenjangan kekayaan (*fajwah al-tsarwah).* Rata-

rata tahun yang diselesaikan dalam pendidikan oleh orang miskin dan kaya sampai satu atau dua tahun, kesenjangan kekayaan hingga 9-10 tahun. Dalam kasus Mesir, kesenjangan kekayaan mencapai tingkat moderat sampai 3 tahun pada tahun sembilan puluhan abad terakhir. *World Bank* : 2022 menjelaskan hasil untuk pencapaian pendidikan di Mesir.dari 14 negara Afrika yang dianalisis, Mesir telah mencapai tingkat yang diinginkan untuk menyediakan pendidikan dasar inklusif untuk semua dan mengurangi kesenjangan gender di semua tingkat pendidikan, tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara Mesir, tes di Mesir sekarang sedang dilakukan di semua tingkatan untuk melanjutkan ke kelas berikutnya kecuali untuk kelas tiga dasar (*ibtidai*), kelas enam dasar (*ibtida'i*), dan ketiga persiapan *(al-I'dai)*, dimana ujian standar diterapkan di tingkat kabupaten atau di tingkat kegubernuran. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang sistem pendidikan dengan bantuan 3 pusat: Pusat Nasional untuk Pengembangan Kurikulum, Pusat Nasional untuk Penelitian Pendidikan dan Pusat Nasional untuk Ujian dan Evaluasi Pendidikan. Masing-masing pusat ini memiliki fokus tersendiri untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan komite.lain di tingkat Negara. Di sisi

lain, Kementerian Pendidikan Tinggi mengawasi sistem pendidikan tinggi.

Proses kualifikasi guru formal yang diterapkan di tingkat dasar (*al-asasi)* dan menengah (*al-tsanawi*), di mana guru diharuskan menyelesaikan 4 tahun di universitas sebelum bergabung dengan profesi guru. Pada spesifiknya sehubungan dengan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan tingkat pengajaran matematika dan ilmu teknologi, Akademi Guru Kejuruan menawarkan beberapa program, seperti guru profesional juga berpartisipasi dalam program pelatihan kejuruan internasional. Tingkat melek huruf di Mesir adalah 71 persen pada tahun 2005, dengan 59 persen perempuan dan 83 persen laki-laki. Perhatian khusus diberikan oleh Pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium pendidikan dasar universal pada tahun 2015 yang diperhitungkan Sistem pendidikan Mesir sangat terpusat, dibagi menjadi tiga tahap: Pendidikan Dasar (*ta'lim al-asas*), tingkat Dasar (*marhalah al-ibtidaiyah)*, Pendidikan Menengah Persiapan (*marhalah al-I'dadiyah al-ta'lim al-tsanawi*).

Pendidikan dasar terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.Di Mesir, Kementerian Pendidikan mengkoordinasikan taman kanak-kanak. Pada tahun 1999-2000, total tingkat

pendaftaran taman kanak-kanak adalah 16 persen, meningkat menjadi 24 persen pada tahun 2009. Terlepas dari apakah sekolah taman kanak-kanak itu swasta atau dikelola negara, mereka semua tunduk pada Kementerian Pendidikan, dan itu adalah tugas Kementerian untuk memilih dan mendistribusikan buku teks dan sesuai dengan instruksi dan peraturan Kementerian, kepadatan maksimum taman kanak-kanak tidak boleh melebihi 45 siswa dan Kementerian Pendidikan juga menerima dukungan dari badan-badan internasional seperti Bank Dunia untuk memperkuat sistem pendidikan. Diwakili oleh Bank Dunia untuk memperkuat sistem pendidikan anak usia dini dengan meningkatkan pendaftaran sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun kapasitas guru, di tingkat dasar, siswa dapat terdaftar di sekolah swasta, agama atau negeri dan sampai tahun 2007 tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai 7,8 di sekolah swasta dan partisipasi total di sekolah dasar adalah 1,5 persen sampai 2007. Ujian diadakan di kelas tiga dasar berdasarkan level administrasi pendidikan

Bagian kedua dari pendidikan dasar adalah tingkat persiapan atau pra-sekolah menengah yaitu hingga 3 tahun. Setelah menyelesaikan tahap ini, siswa menerima sertifikat penyelesaian pendidikan dasar. Pentingnya menyelesaikan tahap ini adalah untuk melindungi siswa dari buta huruf karena putus sekolah sejak dini pada

tahap ini menyebabkan buta huruf dan kemiskinan pada akhirnya.


TURKEY

SISTEM PENDIDIKAN TURKI

A. Latar Belakang

Turki adalah negara yang menegakkan prinsip-prinsip republik konstitusional, demokrasi, dan sekulerisme, menghuni wilayah yang mencakup semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya serta sebagian dari daerah Balkan di Eropa tenggara. Ibu kota negara ini adalah Ankara, yang berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan dan menjadi tempat berlangsungnya banyak kegiatan politik. Sementara itu, Istanbul, kota yang penuh warna dan sejarah panjang, berdiri sebagai pusat budaya dan ekonomi yang memikat.

Sejak berdirinya Republik Turki Modern pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, negara ini telah mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Ataturk, yang menjabat sebagai presiden pertama Turki, memimpin perubahan mendalam dengan tujuan menciptakan negara yang sekuler, modern, dan terbuka. Salah satu fondasi yang dibangun adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil dan produktif, serta individu yang kreatif di tengah era yang semakin dipenuhi dengan informasi.

Namun, sepanjang sejarahnya, sistem pendidikan di Turki telah menjadi medan pertempuran politik dan filosofis antara dua kepentingan utama: kelompok sekularis yang didukung oleh aparat militer, dan kelompok konservatif agama yang menemukan wadah dalam Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Perubahan politik yang signifikan terjadi pada tahun 2012 ketika AKP mendorong reformasi undang-undang pendidikan, meskipun langkah-langkah ini menuai berbagai kritik dan perdebatan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penambahan dua tahun dalam wajib belajar, sebuah langkah yang disetujui oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.

Reformasi undang-undang pendidikan yang diinisiasi oleh AKP pada tahun 2012 telah mencatat perubahan yang cukup mencolok dalam sistem pendidikan Turki. Walaupun langkah-langkah yang diambil dalam reformasi ini telah menimbulkan kontroversi dan mendapat kritik dari berbagai pihak, salah satu perubahan paling signifikan adalah perpanjangan masa wajib belajar menjadi empat tahun. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara ini dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam era informasi yang berkembang pesat.

Meskipun langkah-langkah ini telah diambil, perdebatan tentang arah pendidikan di Turki tetap menjadi salah satu topik utama dalam dinamika sosial dan politik negara ini. Isu-isu seperti kurikulum pendidikan, peran agama dalam sistem pendidikan, dan persaingan antara kelompok sekuler dan konservatif terus mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan. Sehingga, transformasi dalam pendidikan Turki tetap menjadi titik fokus yang memengaruhi arah masa depan pendidikan di negara ini, sekaligus mencerminkan tantangan global dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan adaptif.

Dengan latar belakang sejarah yang kompleks dan perkembangan politik yang dinamis, sistem pendidikan di Turki menjadi salah satu aspek kunci dalam membahas dinamika sosial dan politik negara ini. Dalam buku ini, akan dilakukan tinjauan lebih mendalam tentang perkembangan terkini dalam sistem pendidikan Turki, peran politik dalam mengubah pendidikan, serta dampak dari reformasi pendidikan yang telah diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Turki.

B. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum

Dalam kerangka sistem pendidikan Turki, terdapat dua lembaga utama yang memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Lembaga pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional, yang memiliki tanggung jawab luas dalam mengatur dan

mengelola berbagai aspek pendidikan di negara ini (Sembiring 2022). Kementerian ini mengurusi jenjang pendidikan dasar formal dan menengah, serta pendidikan nonformal, sehingga mencakup beragam tahap perkembangan siswa dari pra-sekolah hingga pendidikan menengah atas.

Lembaga kedua yang memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan Turki adalah Dewan Pendidikan Tinggi. Dewan ini bertugas mengelola dan mengawasi satuan pendidikan tinggi di seluruh negeri, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan pendidikan tinggi, akreditasi program-program studi, serta mengawasi standar pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi (Önez Çetin 2021).

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pendidikan di Republik Turki. Sistem pendidikan ini terbagi menjadi beberapa tahap, dengan setiap tahap memiliki karakteristik dan durasi tertentu. Siklus pendidikan di Turki terdiri dari beberapa jenjang, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, yang bersamaan diwajibkan dengan Pendidikan Dasar dan Menengah Bawah untuk individu yang membutuhkan pendidikan khusus. Kemudian, tahap pertama dalam siklus pendidikan adalah Pendidikan Dasar, yang berlangsung selama 4 tahun, mencakup kelas 1 hingga 4. Selanjutnya,

tahap kedua adalah Pendidikan Menengah Bawah, yang juga berlangsung selama 4 tahun, melibatkan kelas 5 hingga 8. Terakhir, tahap ketiga adalah Pendidikan Menengah Atas, yang memiliki durasi 4 tahun dengan kelas 9 hingga 12.

Sejak tahun ajaran 2012-2013, sistem pendidikan di Turki telah mewajibkan belajar selama 12 tahun, yang dibagi menjadi tiga tahap sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih komprehensif dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka selama periode belajar yang lebih lama.

1. Jenjang Pendidikan

Di Turki, sistem pendidikan mencakup beberapa jenjang pendidikan yang mencerminkan berbagai tahap perkembangan siswa. Berikut adalah gambaran umum tentang jenjang pendidikan di Turki:

a. Pendidikan Pra-sekolah (Okul Öncesi Eğitim):

Pendidikan Anak Usia Dini di negara ini mencakup berbagai jenis fasilitas, termasuk Taman Penitipan Anak dan Tempat Penitipan Anak yang dirancang untuk anak-anak usia 0-36 bulan. Fasilitas ini dioperasikan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pelayanan Anak yang merupakan bagian dari Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Sosial.

Selain itu, negara ini juga menawarkan pusat pendidikan anak usia dini yang berlokasi di taman kanak-kanak pendidikan khusus. Pusat-pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Layanan Pendidikan dan Bimbingan Khusus, dan mereka khususnya menyediakan pendidikan dan layanan untuk anak-anak usia 0-36 bulan yang membutuhkan perhatian khusus.

Jenjang pendidikan ini merupakan tahap pertama dalam sistem pendidikan formal yang berperan penting dalam membantu perkembangan anak-anak usia 3 hingga 6 tahun. Pada tingkat ini, pendidikan difokuskan pada pengembangan beragam aspek, termasuk kemampuan sosial, emosional, kognitif, dan fisik anak-anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah melalui bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna. Tujuannya adalah membantu anak-anak membangun dasar yang kokoh dalam perkembangan mereka sambil menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan dan mendidik (Çalik and Çan 2012; Erişen, Kaya, and Bay 2022).

Sejarah pendidikan anak usia dini, atau “Okul Öncesi Eğitim” mencerminkan evolusi penting dalam sistem pendidikan negara ini. Pada awal abad ke-20, pendidikan anak usia dini masih belum terstruktur

secara resmi, dengan pendidikan formal lebih berfokus pada tingkat dasar dan menengah. Namun, setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, pentingnya pendidikan anak usia dini semakin diakui. Pemerintahan Ataturk dan masa awal republik sangat menekankan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang modern.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1940-an dan 1950-an ketika pemerintah mulai mengenalkan program-program pendidikan anak usia dini yang lebih terstruktur dengan membuka lembaga pendidikan prasekolah di kota-kota besar. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak pada literasi dan matematika dasar serta membantu perkembangan sosial dan kognitif mereka. Pada tahun 1990-an, reformasi pendidikan yang melibatkan pendidikan anak usia dini dilakukan, dengan fokus pada pembaruan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih berorientasi pada permainan, eksplorasi, dan pengalaman sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini yang berlaku internasional.

Seiring perkembangan waktu, Turki terus meningkatkan pendidikan anak usia dini untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas sejak dini. Negara ini juga memperhatikan pelatihan dan sertifikasi guru-guru prasekolah untuk

memastikan metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini di Turki saat ini dianggap sebagai langkah awal yang sangat penting dalam perkembangan anak, dengan tujuan memberikan dasar yang kokoh dalam berbagai aspek perkembangan anak, termasuk keterampilan sosial, kognitif, emosional, dan fisik. Seiring dengan perkembangan global dalam pendidikan anak usia dini, Turki terus berusaha untuk memastikan bahwa pendidikan ini sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks (Erişen, Kaya, and Bay 2022).

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar, yang dalam bahasa Turki dikenal sebagai "İlköğretim" atau SD/*İlk Okulu*, merupakan fondasi penting dalam sistem pendidikan Republik Turki. Pendidikan dasar adalah tahap awal yang diikuti oleh siswa selama empat tahun, dan pada tahun 1997, Turki mengambil langkah signifikan dengan memperpanjang wajib belajar menjadi 8 tahun, dimulai bagi setiap anak sejak usia 6 tahun. Akibatnya, pada tahun 2004, sekitar 90% anak usia tersebut sudah mengenyam pendidikan dasar.

Sistem pendidikan dasar di Turki melibatkan hampir 10 juta anak yang tersebar di sekitar 35.000 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta, yang didukung oleh 375.000 guru. Sebagaimana di Indonesia,

penting untuk dicatat bahwa sekolah dasar negeri di Turki tidak memungut biaya, sehingga pendidikan dasar dapat diakses oleh semua anak tanpa hambatan ekonomi.

Kurikulum pendidikan mencakup berbagai mata pelajaran umum seperti bahasa Turki, matematika, ilmu sosial, sains, seni, olahraga, dan bahasa Inggris di tingkat tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar pendidikan yang kokoh kepada siswa, mempromosikan literasi, dan mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Dengan pendidikan dasar yang kuat, siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat menengah dengan pondasi yang kuat dalam pemahaman dasar dan keterampilan yang mereka butuhkan.

c. Pendidikan Menengah

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama 8 tahun, siswa di Turki melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat menengah, yang dalam bahasa Turki disebut "*Ortaöğretim*". Pendidikan menengah ini mencakup dua tingkat, yaitu SMP atau "*Orta Okulu*" selama 4 tahun, dan SMA atau "*Lise*" juga selama 4 tahun. Dengan demikian, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Turki adalah 12 tahun.

Selain jalan tradisional melalui SMP dan SMA, ada alternatif lain bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Mereka dapat memilih pendidikan kejuruan dan sekolah menengah teknik yang menawarkan keterampilan khusus. Jenis sekolah ini mengakomodasi sekitar 820.000 siswa, yang setara dengan sekitar 23% dari usia wajib belajar. Terdapat sekitar 3.428 sekolah vokasi dan teknik dengan dukungan dari 68.176 guru. Tingkat ketersediaan sekolah-sekolah kejuruan dan teknik ini mencapai 60% dari jumlah penduduk.

Pendidikan menengah di Turki memberikan siswa kesempatan untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Program-program ini mencakup berbagai bidang seperti ilmu alam, ilmu sosial, seni, dan olahraga. Kurikulum pendidikan menengah juga mencakup mata pelajaran umum yang meliputi mata pelajaran seperti bahasa Turki, matematika, dan ilmu sosial, serta mata pelajaran yang lebih spesifik sesuai dengan program studi yang dipilih oleh siswa.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Turki merupakan langkah penting setelah menyelesaikan pendidikan menengah, dan persaingannya sangat ketat. Proses seleksi ketat ini menentukan siswa yang akan diterima di perguruan tinggi dan mengejar gelar sarjana, yang biasanya memerlukan waktu 4,5 atau 6 tahun.

Di samping program sarjana, terdapat juga perguruan vokasi dan Universitas Terbuka yang membutuhkan sekitar 4 tahun. Minat terhadap pendidikan tinggi terus meningkat, dengan sekitar 1,5 juta siswa yang mengikuti seleksi, yang meningkat menjadi hampir 1,9 juta pada tahun 2004. Sayangnya, hanya 400 ribu siswa yang diterima, dan jumlah calon mahasiswa ini mencakup sekitar 40% dari jumlah penduduk, dengan persyaratan minimal berusia 18 tahun.

Turki memiliki 53 perguruan tinggi negeri dan 19 perguruan tinggi swasta, dengan tambahan Universitas Terbuka yang menyediakan pendidikan jarak jauh. Keseluruhan, terdapat sekitar 1,5 juta siswa yang mendaftar di berbagai perguruan tinggi ini, dengan dukungan dari sekitar 60.000 tenaga pendidik. Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah di Turki dapat mengikuti ujian nasional yang dikenal sebagai *Yükseköğretim Kurumları Sınavı* (YKS) untuk mendapatkan akses ke perguruan tinggi. Program-program studi yang ditawarkan di perguruan tinggi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, humaniora, teknik, dan kedokteran, sehingga memberikan siswa banyak pilihan untuk mengejar minat dan karir akademis mereka (Paling Lengkap, Begini Sistem Pendidikan Turki! 2021).

2. Kurikulum

Departemen Pendidikan Nasional Turki memiliki tanggung jawab untuk mengawasi administrasi semua tingkatan dan jenis pendidikan pra-sekolah. Perencanaan dan koordinasi pendidikan dilakukan di bawah wewenang *Yükseköðretim Kurulu* (Dewan Pendidikan Tinggi, atau biasa disebut YOK). Dewan ini bertanggung jawab atas pengawasan anggaran universitas, baik secara keseluruhan maupun tingkat institusi, serta menetapkan pedoman kurikulum inti untuk tingkat sarjana.

Pada awal tahun 1970-an, lembaga pendidikan tinggi swasta dilarang beroperasi di Turki, namun pada tahun akademik 1981-1982, mereka diizinkan untuk beroperasi kembali, dengan syarat harus bersifat non-profit. Kurikulum yang digunakan oleh lembaga-lembaga swasta ini harus mendapatkan persetujuan dari YOK, memastikan bahwa standar pendidikan tetap terjaga.

Dalam beberapa provinsi, urusan pendidikan diatur oleh Direktorat Pendidikan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, meskipun mereka bekerja di bawah arahan gubernur provinsi. Hal ini mencerminkan struktur dan tata kelola pendidikan yang berpusat pada tingkat nasional, dengan peran penting yang dimainkan oleh YOK dalam mengatur dan mengawasi perguruan tinggi serta kurikulum pendidikan tinggi di Turki.

Kurikulum Umum Sekolah Menengah Atas di Turki

General Academic High School Weekly Curriculum				
Mata Pelajaran	Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12
Bahasa	2	2	2	2
Sastra Turki	3	3	3	3
Agama dan Etika	1	1	1	1
Sejarah	-	-	-	-
Sejarah Revolusi Turki dan Kemalisme	2	2	2	-
Geografi	2	-	-	-
Matematika	4	-	-	-
Geometri	2	-	-	-
Fisika	2	-	-	-
Kimia	2	-	-	-
Biologi	1	-	-	-
Kesehatan	1	-	-	-

Filsafat	-	-	2	-
Bahasa Asing	3	2	2	2
Pendidikan Jasmani	2	2	2	2
Seni Visual/Musik	1	1	1	1
Keamanan Nasional	-	1	-	-
Lalu Lintas dan Pertolongan Pertama	-	1	-	-
Total	29	16	15	12

Dalam skala penilaian yang digunakan di Turki pada tingkat sekolah menengah, umumnya sekolah-sekolah menggunakan rentang angka dari 1 hingga 5. Proses penilaian dalam pendidikan menengah di Turki dijalankan dengan ketat. Angka 4 dan 5 keduanya akan setara dengan nilai A, namun biasanya pemberian nilai 5 sangat jarang diberikan kepada siswa di sekolah.

Secara kualitatif, dapat diamati bahwa sistem pendidikan di Turki memiliki kinerja yang kurang baik jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) lainnya. Hasil dari Program PISA (*Program for International Student Assessment*) yang dilakukan oleh OECD menunjukkan bahwa prestasi rata-rata siswa di Turki jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD dalam bidang Literasi, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh karena itu, karena berbagai tantangan terkait dengan kualitas pendidikan di Turki, siswa-siswa Turki cenderung lebih memilih untuk mengejar pendidikan tinggi di luar negeri.

Menurut data terbaru dari OECD, lebih dari 65.000 mahasiswa Turki memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka di luar negeri pada tahun 2010. Lima negara tujuan utama mereka adalah Jerman (37,8% dari total mahasiswa internasional), Amerika Serikat (15,6%), Britania Raya dan Irlandia Utara (5,6%), Austria (3,7%), dan Perancis (2,9%). (Education Policy Outlook Highlights n.d.)

Pendaftaran mahasiswa Turki di institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat tetap relatif stabil, berkisar antara 10.000 hingga 12.500 mahasiswa. Data dari Institut Pendidikan Internasional menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2011, terdapat 12.184 mahasiswa Turki di pendidikan tinggi AS, dengan

mayoritas dari mereka mengambil program pascasarjana (52%), diikuti oleh program sarjana (29%), program lainnya (10%), dan program non-gelar (8%).

Selain itu, Turki memiliki etnis minoritas terbesar di Jerman, yang berasal dari migrasi besar-besaran dari Turki ke Jerman pada tahun 1960-an sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja di Jerman. Meskipun sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan Turki, banyak di antara mereka yang lahir di Jerman atau telah melewati sistem pendidikan di sana. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 1.629.000 warga Turki yang tinggal di Jerman, dan perkiraan menunjukkan bahwa sejumlah 30.000 hingga 70.000 orang Turki mengambil kewarganegaraan Jerman setiap tahunnya. Pada tahun yang sama, ada sekitar 26.089 orang Turki yang belajar di perguruan tinggi di Jerman.

Sebagai salah satu tujuan bagi mahasiswa internasional, pada tahun ajaran 2010-2011, terdapat 31.170 mahasiswa dari luar negeri yang belajar di Turki. Jumlah ini mengalami peningkatan lebih dari 100 persen sejak tahun 2005-2006, ketika hanya ada 15.481 mahasiswa asing yang mengejar pendidikan di perguruan tinggi Turki. Selama tahun 2010-2011, jumlah mahasiswa dari negara-negara mayoritas Muslim yang belajar di Turki mencapai lebih dari 18.000 orang.

Negara Azerbaijan menduduki peringkat teratas dalam jumlah mahasiswa asing di Turki dengan lebih

dari 4.200 siswa, diikuti oleh Turkmenistan dengan 4.110 siswa, dan Siprus Utara dengan 3.800 siswa. Iran dan Bulgaria berada di peringkat keempat dan kelima dalam hal jumlah mahasiswa asing. Selain itu, sebanyak 1.552 siswa dari 44 negara di Afrika belajar di Turki pada tahun 2011-2012, yang merupakan peningkatan empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 2005-2006.

Universitas Anadolu di Eskişehir menjadi institusi pendidikan tinggi yang menarik paling banyak mahasiswa internasional, diikuti oleh Universitas Istanbul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Universitas Ankara, dan Universitas Marmara. Penggunaan bahasa Inggris di banyak universitas Turki juga menjadi salah satu daya tarik bagi mahasiswa asing, terutama ketika dikombinasikan dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau. Dalam dekade terakhir, sistem pendidikan tinggi di Turki telah mengalami perkembangan yang pesat.

C. Staf Pengajar

Kebijakan pendidikan di Turki yang sangat sentralistis, bahkan menjadi salah satu yang paling terpusat di antara negara-negara anggota OECD. Sistem ini terstruktur dalam hierarki yang ketat, di mana Kementerian Pendidikan dibagi menjadi fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab tertentu.

Setiap fungsi dalam Kementerian memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam jalur komando yang terstruktur. Secara umum, tugas utama Kementerian Pendidikan di Turki mencakup beberapa aspek kunci:

1. Kementerian Pendidikan memiliki wewenang untuk menunjuk kepala sekolah, yang bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau tingkat provinsi. Sekolah negeri dilarang untuk melakukan perekrutan guru secara independen.
2. Kementerian Pendidikan mengelola proses rekrutmen guru secara terpusat melalui sistem seleksi nasional. Mereka juga menentukan penempatan guru berdasarkan kebutuhan daerah atau melakukan mutasi guru ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.
3. Kementerian merancang sistem gaji bagi tenaga pendidik. Namun, karena rentang gaji yang ditawarkan relatif rendah, profesi guru di Turki mungkin kurang menarik. Gaji rata-rata berkisar antara US $ 300 hingga US $ 500 per bulan, yang merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota OECD. Selain itu, para guru diwajibkan mengajar sekitar 830 jam per tahun.

4. Kementerian Pendidikan juga bertanggung jawab untuk merancang kurikulum pendidikan, yang mencakup tujuan pembelajaran dan sistem evaluasi tertentu. Mereka juga memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk pengembangan diri

Program pelatihan guru untuk pendidikan pra-sekolah dasar, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Turki dijalankan melalui universitas. Saat ini, lembaga utama yang menyelenggarakan pelatihan guru adalah fakultas-fakultas pendidikan. Semua program pelatihan guru memiliki durasi empat tahun. Selain itu, ada Program Magister Pengetahuan Profesi Keguruan tanpa Tesis yang juga tersedia untuk memberikan pendidikan keguruan kepada mereka yang lulus dari jurusan selain fakultas pendidikan, yang merupakan sumber daya untuk menjadi pendidik melalui berbagai kegiatan seperti konferensi, kursus, dan seminar.

Untuk memahami evolusi pendidikan pengajar/guru di Turki, penting untuk membagi sejarahnya menjadi dua periode utama. Periode pertama berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Nasional, berlangsung dari tahun 1923 hingga 1982. Sementara itu, periode kedua terjadi setelah tahun 1982 dan terkait dengan peran universitas dalam pelatihan guru. Selama periode yang terikat dengan Kementerian Pendidikan

Nasional, pendidikan guru disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda, sementara dalam periode universitas, semua tingkat pendidikan guru diperlakukan secara seragam. Selain itu, pelatihan staf pengajar untuk pendidikan tinggi yang diatur oleh undang-undang akan dilaksanakan melalui peraturan yang berbeda yang mengatur aspek-aspek khususnya (Teachers and education staff n.d.).

1. Pendidikan Guru Anak Usia Dini

Sejarah pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Turki mencerminkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun ajaran 1923-1924, terdapat 80 sekolah pendidikan anak usia dini di negara ini, yang menggaji 136 guru dan melayani 5.880 murid. Hasilnya adalah rasio 43 murid per guru. Dari jumlah guru tersebut, 9 berasal dari Darulmuallimats, 57 dari cabang induk, 1 dari sekolah asing, dan sisanya (59 orang) direkrut dari berbagai sumber (Ozturk, 1998).

Kemudian, pada tahun ajaran 1927-1928, Ana Muallim Mektebi (Sekolah untuk mendidik guru PAUD) didirikan di Ankara, dan pada tahun 1932-1933, sekolah ini dipindahkan ke Istanbul dengan nama baru, “Istanbul Kiz Muallim Mekteb” (Sekolah Guru Anak Perempuan

Istanbul). Sekolah ini memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik guru-guru untuk sekolah-sekolah PAUD.

Perubahan signifikan terjadi ketika undang-undang dasar Kementerian Pendidikan Nasional, No: 1979, menugaskan pendidikan guru pendidikan anak usia dini ke program tersier. Pada tahun 1979, sebuah program dua tahun dengan nama 'Program Guru Anak Usia Dini' dikembangkan dan kemudian diterapkan pada tahun ajaran 1980-1981. Pada tahun 1991-1992, program ini mengalami restrukturisasi menjadi program sarjana empat tahun dan dimasukkan ke dalam lingkup fakultas pendidikan.

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Sejarah pelatihan guru mencapai masa Reformasi (1839-1876) dalam Kekaisaran Ottoman (Akyüz 1982). Sekolah Pelatihan Guru Pertama untuk Pria didirikan pada tanggal 16 Maret 1848 dan disebut Darülmuallimin. Sekolah ini penting karena merupakan institusi pendidikan pertama yang melatih guru selain madrasah selama proses modernisasi Kekaisaran.

Di Ankara, pada tanggal 15 Juli 1921, sebelum deklarasi Republik Turki (dinyatakan pada 29 Oktober 1923) dan selama Perang Kemerdekaan, Kongres Pendidikan diselenggarakan. Mustafa Kemal membuka Kongres ini, datang dari medan perang, dan memberikan pidato pembukaan. Dalam Kongres ini, tuntutan untuk

menyusun "kurikulum nasional" sesuai dengan karakteristik nasional dan sejarah Turki diungkapkan. Mustafa Kemal menggambarkan guru-guru sebagai 'pemimpin terhormat kemerdekaan Turki di masa depan' dan menyatakan harapannya kepada guru-guru dengan kata-kata, "Guru-guru! Generasi baru akan menjadi pengabdian Anda. Nilai pengabdian akan sejalan dengan tingkat keterampilan dan pengabdian diri Anda."

Dalam beberapa tahun awal periode Republik, İlköğretmen Okulu (Muallim Mektebi) di berbagai provinsi (Sekolah Pertama untuk Anak Laki-laki dan Perempuan) dialihkan dari administrasi provinsi swasta pada tanggal 1 September 1923 dan di bawah kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı-MEB). Selama periode ini, ada 20 İlköğretmen Okulu, dengan 80% kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah ini melibatkan mata pelajaran budaya umum, sedangkan hanya 20% sisanya terkait dengan pendidikan kejuruan (Osmanlıdan Günümüze Eğitim Tarihi, hlm. 224). Awalnya, masa pendidikan di sekolah-sekolah ini ditingkatkan dari 5 tahun menjadi 6 tahun pada tahun ajaran 1932-1933. Tiga tahun pertama dari 6 tahun tersebut terdiri dari mata pelajaran tingkat sekolah menengah dan 3 tahun sisanya mencakup kurikulum yang juga mencakup mata pelajaran kejuruan.

Pada tanggal 17 April 1940, lembaga pendidikan asli bernama Village Institutions (Köy Enstitüsü)

dibentuk sesuai dengan undang-undang no. 3803 dalam rangka pelatihan guru. Tujuan pendirian lembaga-lembaga ini didasarkan pada pemahaman filosofi pendidikan pragmatis, yaitu untuk memberikan pendidikan dasar kepada penduduk pedesaan yang merupakan bagian besar dari populasi Turki pada periode tersebut, serta memberikan informasi dasar dan keterampilan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan negara. Namun, pada Februari 1954, sekolah-sekolah tersebut digabungkan menjadi İlköğretmen Okulu.

İlköğretmen Okulu awalnya berlangsung selama 3 tahun setelah sekolah menengah rendah (seperti sekolah menengah atas yang disebut lise) hingga tahun ajaran 1970-1971, kemudian ditingkatkan menjadi 4 tahun. Undang-undang Dasar Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Temel Kanunu) No. 1739 yang diberlakukan pada tahun 1973 menyertakan ketentuan bahwa "mengajar adalah pekerjaan khusus yang melibatkan pendidikan dan tugas administrasi terkait dengan negara," dan menetapkan bahwa guru-guru harus memiliki pendidikan tinggi tanpa memandang tingkat instruksi.

Mulai tahun ajaran 1974-1975, beberapa İlköğretmen Okulu diubah menjadi status 2 Years Eğitim Enstitüsüs. Status ini berlanjut hingga tahun 1982 ketika universitas mulai bertanggung jawab. Pada tahun 1997, sekolah dasar yang disebut "İlkokul" digabungkan

dengan sekolah menengah pertama yang disebut "ortaokul" dalam struktur tunggal sekolah pendidikan dasar yang disebut “İlköğretim Okulu” (Akyüz 1982).

3. Pendidikan Guru Sekolah Menengah Pertama

Sumber daya dasar untuk pelatihan guru sekolah menengah pertama adalah Eğitim Enstitüsü selama 3 tahun hingga regulasi pada tahun 1982. Sumber daya dari perguruan tinggi guru tersebut adalah “Gazi Teachers’ College and Training Institute for Lower Secondary Education,” yang didirikan pada tahun ajaran 1926-1927. Pada awalnya, periode pendidikan sekolah tersebut adalah selama 3,5 tahun. Sementara periode pendidikan semua jurusan diatur menjadi 3 tahun sejak tahun ajaran 1967-1968. Fungsi Egitim Enstitüsü sebagai tempat pelatihan guru cabang untuk sekolah menengah pertama berlanjut hingga tahun ajaran 1978-1979. Sejak tahun tersebut, sekolah-sekolah ini dikenal sebagai Yüksek Öğretmen Okulu (sekolah pelatihan guru untuk pendidikan sekunder), jumlahnya berkurang dan kurikulumnya diubah menjadi empat tahun sehingga dapat melatih guru untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah menengah atas. Sekolah-sekolah ini terafiliasi dengan universitas-universitas yang sudah ada atau universitas yang baru didirikan pada tahun 1982 dan berubah menjadi fakultas pendidikan.

4. Pendidikan Guru Menengah Atas

Salah satu lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam melatih guru untuk sekolah menengah atas selama periode Republik adalah Institut Guru Tinggi. Pada tahun 1891, "Darülmuallimin-i Aliye" didirikan di Istanbul dan dianggap sebagai langkah awal menuju pembentukan Sekolah Guru Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan institusi-institusi ini agar dapat memenuhi kebutuhan guru, dan institusi-institusi ini terus melaksanakan fungsinya dalam melatih guru sebagai lembaga yang unik di bidangnya hingga tahun ajaran 1954-55.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan guru di sekolah menengah, Institut Guru Tinggi juga didirikan di Ankara pada tahun 1959 dan satu lagi di Izmir pada tahun 1964. Meskipun demikian, Institut Guru Menengah, yang telah berdiri sebagai lembaga pendidikan yang sangat berpengalaman dalam melatih guru untuk sekolah menengah selama 130 tahun, akhirnya dihapuskan pada tahun 1978 karena perubahan dalam sistem pendidikan.

5. Universitas

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)/ Kementerian Pendidikan Nasional di Turki Pada masa itu, MEB memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelatihan guru

hingga tahun 1982, sementara universitas memiliki sumber daya yang signifikan yang digunakan untuk tujuan ini. Terutama, Fakultas Sains dan Sastra di Universitas Istanbul, Fakultas Bahasa, Sejarah, dan Geografi di Universitas Ankara, serta Fakultas Sains di berbagai universitas berperan dalam melatih sejumlah besar guru dalam berbagai mata pelajaran, termasuk Bahasa dan Sastra Turki, Matematika, Sains, Sejarah, Geografi, dan Bahasa Asing, untuk tingkat sekolah menengah dan tingkat sekolah yang setara.

Secara khusus, para calon guru mendapatkan pelatihan melalui program "Pedagojik Formasyon," yang diadakan oleh departemen pendidikan di beberapa universitas sejak pertengahan tahun 1970-an. Dengan kata lain, mahasiswa di fakultas-fakultas tertentu (sains, sastra, dll.) akan mengikuti program sarjana mereka sambil mengambil kursus-kursus yang berfokus pada kemampuan pedagogis secara bersamaan dengan program-program studi mereka.

Namun, saat ini, pendidikan guru di Turki sepenuhnya dikelola oleh Dewan Pendidikan Tinggi dan dilaksanakan di bawah naungan fakultas-fakultas pendidikan universitas. Dalam Dokumen Visi Pendidikan 2023, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan target untuk membuka program tingkat pascasarjana dengan menghapus sistem aplikasi "Pendidikan Pedagogis" berdasarkan sertifikat. Sebagai

langkah awal, Pendidikan Pembentukan Pedagogik telah dihapus sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Badan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, tertanggal 29/06/2020 nomor 12.

Dalam konteks ini, pertemuan Dewan Pendidikan Tinggi pada tanggal 09.02.2012 mencapai kesimpulan bahwa program pendidikan guru yang bersifat terbuka harus dievaluasi dan diperbarui (Önez Çetin 2021).

D. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional Turki. Komponen ini dirancang untuk menyentuh berbagai kelompok, termasuk mereka yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal, individu yang memiliki keterampilan dan potensi tertentu saat sedang mengikuti program pendidikan formal, serta mereka yang telah keluar dari program pendidikan formal tanpa meraih gelar.

Program pendidikan nonformal di Turki memiliki tujuan untuk memberikan akses kepada orang dewasa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan tersebut. Selain itu, program ini juga

menyediakan pengetahuan dasar bagi individu semacam itu, dan jika mereka pernah mengikuti pendidikan formal, program ini berusaha memperluas basis pengetahuan mereka dari tingkat pendidikan terakhir yang pernah diikuti. Selain itu, pendidikan nonformal di Turki bertujuan untuk menciptakan peluang baru bagi individu untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Program ini juga memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip reformasi yang diperkenalkan oleh Ataturk, yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan solidaritas nasional di Turki.

Program pendidikan non-formal di Turki terdiri dari dua komponen utama: program pendidikan nonformal umum dan program pendidikan nonformal kejuruan. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal meliputi sekolah keterampilan untuk anak perempuan, sekolah keterampilan tingkat lanjut untuk anak perempuan, sekolah keterampilan industri, pusat-pusat pendidikan teknis untuk orang dewasa, pusat-pusat pendidikan umum, dan pusat-pusat pelatihan magang. Program-program ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: pendidikan umum, pelatihan magang, dan pendidikan jarak jauh.

Sebagian besar program dan kegiatan pendidikan publik dilakukan di pusat-pusat pendidikan formal. Siapa pun, tanpa memandang usia atau latar belakang

pendidikan, dapat mendaftar dalam kursus keaksaraan, kursus kejuruan, dan kursus sosial dan budaya yang tersedia di banyak gedung pendidikan formal. Pada tahun pelajaran 1998-1999, sebanyak 1.055.936 individu aktif mengikuti kursus pendidikan publik (Önez Çetin 2021).

Pelatihan magang dapat diikuti oleh mereka yang berusia antara 14 hingga 19 tahun yang belum pernah mendapatkan pendidikan formal, mereka yang telah menyelesaikan program wajib belajar delapan tahun tetapi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan formal, dan mereka yang tidak pernah menyelesaikan program pendidikan formal yang diperlukan. Individu-individu dalam kelompok usia 14 hingga 19 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dapat mendaftar dalam program pelatihan magang selama tiga hingga empat tahun. Para peserta magang menghadiri pusat-pusat pelatihan satu hari dalam seminggu, dengan durasi pelatihan delapan hingga sepuluh jam setiap kali. Setelah berhasil menyelesaikan program pelatihan, mereka memiliki hak mengikuti ujian journeyman. Lulus ujian ini memberikan mereka sertifikat journeyman, dan jika mereka melanjutkan pelatihan sebagai master, mereka dapat mengikuti ujian master setelah mengumpulkan tiga tahun pengalaman kerja. Pada tahun ajaran 1998-1999, sebanyak 267.074

siswa mengikuti pelatihan magang di salah satu dari 328 pusat pelatihan yang tersedia (Çalik and Çan 2012).

E. Sistem Anggaran Pendidikan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan di Turki diukur sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah umum pada semua sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan lainnya. Ini mencakup pengeluaran yang didanai oleh dana transfer dari sumber-sumber internasional ke pemerintah Turki. Pengeluaran pemerintah umumnya merujuk pada pemerintah lokal, regional, dan pusat.

Pada tahun 2020, pengeluaran pendidikan di Turki mencapai 9.38% dari total pengeluaran pemerintah umum, menunjukkan penurunan sebesar 3.09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019, di mana pengeluaran pendidikan mencapai 12.47%, mengalami kenaikan sebesar 0.04% dari tahun 2018. Pada tahun 2018, pengeluaran pendidikan Turki sebesar 12.43%, mengalami penurunan sebesar 0.54% dari tahun 2017, yang sebelumnya mencapai 12.97% pada tahun 2017, mengalami penurunan sebesar 0.32% dari tahun 2016.

Data ini mencerminkan perubahan dalam alokasi anggaran pemerintah Turki untuk pendidikan selama beberapa tahun terakhir, dengan fluktuasi dalam

persentase pengeluaran pendidikan sebagai bagian dari total pengeluaran pemerintah umum.

Dalam pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, Ziya Selçuk, mengenai anggaran pendidikan tahun 2021, disampaikan bahwa diperlukan sejumlah dana sebesar 211 miliar 993 juta dan 156 Lira Turki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dan non-formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Angka ini mencerminkan alokasi sekitar 15,7 persen dari total anggaran umum yang dialokasikan untuk tahun fiskal 2021.

Menyadari bahwa anggaran Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2021 telah disusun dengan cermat sesuai dengan Program Anggaran, Selçuk menekankan bahwa langkah-langkah pengalokasian sumber daya terbatas tersebut bertujuan untuk mendukung proyek-proyek yang akan memberikan manfaat paling maksimal bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian memutuskan untuk mengalokasikan dana anggaran untuk berbagai keperluan, seperti partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan pendidikan, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan menengah, seleksi dan penempatan siswa, pendidikan dasar, kerjasama pendidikan internasional, pendidikan di atas kapal, pendidikan di luar negeri, dan program-program dukungan lainnya.

Selçuk juga menyoroti alokasi dana sebesar 7 miliar 568 juta dan 630 ribu Lira Turki untuk Partisipasi Penyandang Cacat dalam Kehidupan Sosial dan Program Pendidikan Khusus, serta sebesar 3 miliar 24 juta dan 407 ribu Lira Turki untuk Program Pembelajaran Seumur Hidup. Terakhir, Selçuk mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional akan meningkatkan alokasi anggaran investasi untuk berbagai keperluan, termasuk transisi ke sistem pendidikan seragam, tujuan pendidikan prasekolah, penguatan gedung sekolah dalam rangka kesiapsiagaan terhadap gempa bumi, dan infrastruktur bengkel untuk sekolah kejuruan. Dengan peningkatan ini, alokasi anggaran tersebut meningkat dari 5,8 miliar menjadi 11,3 miliar Lira Turki, menunjukkan komitmen Kementerian dalam memajukan sektor pendidikan (We Increased Our Investment Budget By 94 Percent And Brought It To 11.3 Billion Liras N.D.).

Otonomi dan kontrol keuangan dalam pendidikan di Turki menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam pemberian otonomi kepada sekolah melalui desentralisasi keuangan, yang sering disebut sebagai "anggaran yang dilimpahkan." Sekolah-sekolah negeri tidak memiliki otonomi yang luas dalam mengatasi berbagai persoalan, dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mereka tentukan sendiri. Hal ini terkait erat dengan

struktur sistem pendidikan nasional Turki yang sangat tersentralisasi.

Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı-MEB), termasuk pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, memiliki otonomi yang terbatas dalam hal pengelolaan keuangan mereka. Dokumen Visi Pendidikan MEB 2023 menyatakan bahwa setiap sekolah akan diberikan Anggaran Pengembangan Sekolah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan rencana pengembangan sekolah. Namun, ada kondisi positif yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum anggaran tersebut diterapkan.

Penting dicatat bahwa alokasi anggaran untuk sekolah menengah tidak langsung dikelola oleh sekolah-sekolah tersebut. Sebaliknya, alokasi anggaran direncanakan secara nasional dan dikelola secara lokal oleh direktorat provinsi di bawah naungan Kemendiknas. Selain itu, terdapat dukungan terpisah yang dialokasikan untuk kelas pendidikan khusus dan fasilitas pendidikan yang ada dalam siklus pendidikan ini, menunjukkan adanya berbagai mekanisme pengelolaan keuangan dalam sistem pendidikan Turki.

1. Pendanaan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini di Turki diselenggarakan melalui berbagai jenis lembaga, termasuk taman kanak-

kanak, kelas penitipan anak, dan kelas persiapan. Meskipun pendidikan pra-sekolah ini umumnya tersedia secara gratis, sejumlah biaya tertentu mungkin dikenakan kepada orang tua untuk menutupi aspek-aspek seperti nutrisi, kebersihan, dan materi pendidikan tambahan yang tidak memberatkan kondisi ekonomi keluarga.

Dalam pengelolaan lembaga-lembaga ini, berbagai aspek seperti gaji guru, kompensasi tenaga non-pengajar, pembiayaan bahan ajar, serta biaya kelembagaan lainnya dikelola secara mandiri, dengan standar yang sama berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di setiap lembaga pendidikan. Selain pendanaan mandiri, dukungan tambahan juga diberikan melalui berbagai sumber, termasuk partisipasi orang tua murid, alokasi anggaran dari pemerintah kota, proyek-proyek bantuan, sumbangan, dukungan dari pemerintah daerah, dan jenis dukungan lainnya yang mampu memperkaya pengalaman pendidikan anak-anak di tingkat pra-sekolah. Selain lembaga-lembaga publik, sektor swasta juga turut berperan dalam menyediakan pendidikan anak usia dini di Turki melalui pendirian dan pengelolaan PAUD swasta.

2. Pendanaan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan dasar di Turki mencakup semua sekolah agama dan sekolah menengah wajib belajar yang memberikan pendidikan dasar selama 4 tahun. Meskipun

lembaga-lembaga ini mendapatkan pendanaan dari anggaran negara, mereka juga menerima bagian dari dana yang dialokasikan untuk program melalui sumbangan dan kontribusi dari pemerintah provinsi. Selain itu, sektor swasta juga aktif dalam menyelenggarakan sekolah dasar swasta mereka sendiri sebagai alternatif bagi pendidikan dasar yang disediakan oleh lembaga-lembaga publik.

b. Dukungan Keuangan untuk Pelajar

Terdapat berbagai bentuk bantuan dan dukungan pendidikan yang ditujukan untuk siswa di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya adalah "Beasiswa Pendidikan Gratis di Sekolah Asrama," yang memberikan peluang berharga bagi siswa yang telah mencapai prestasi selama pendidikan mereka. Program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak di Turki, termasuk yang membutuhkan bantuan dalam tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus.

Siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah pendidikan khusus dan kelas pendidikan khusus juga mendapatkan manfaat dari berbagai layanan pendukung. Mereka disediakan dengan transportasi gratis untuk memastikan mereka dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Bahkan, layanan makan siang juga tersedia untuk siswa dalam program pendidikan keliling, serta untuk siswa yang menghadiri kelas pendidikan

khusus di sekolah. Selain itu, untuk siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah menengah kejuruan dan teknik Anatolia dan berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan di perusahaan, pemerintah memberikan dukungan finansial kepada perusahaan yang menyediakan pelatihan keterampilan dan magang. Dukungan ini mencakup pembayaran kepada perusahaan untuk kontribusi mereka dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada siswa. Program ini telah memberikan dukungan yang signifikan sejak dimulai pada tahun 2017, dengan berbagai perusahaan membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman nyata di dunia bisnis.

Selain itu, untuk memastikan kesetaraan dalam akses ke pendidikan, semua siswa di Turki menerima buku pelajaran tanpa biaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pendidikan mereka.

c. Sekolah Swasta

Taman kanak-kanak dan sekolah swasta memiliki sejumlah otonomi dalam mengelola anggaran mereka sesuai dengan kebijakan dan keputusan internal mereka. Namun, mereka tetap tunduk pada peraturan nasional yang sama dengan sekolah negeri dan sekolah kota dalam hal persyaratan pendidikan negara dan penyelenggaraan proses pembelajaran. Lembaga-

lembaga pendidikan swasta ini dapat menggunakan properti pribadi mereka atau properti yang diberikan kepada mereka untuk operasional mereka. Pengawasan terhadap kinerja dan proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan swasta tetap berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam upaya untuk mendukung sekolah swasta dan mendorong akses pendidikan swasta, pemerintah telah meluncurkan "Aplikasi Dukungan Pendidikan yang akan Diberikan kepada Siswa untuk Belajar di Sekolah Swasta" sejak tahun akademik 2014-2015. Program ini memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada siswa yang memilih sekolah swasta. Besaran dukungan ini bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan dan pelatihan yang diambil oleh siswa. Meskipun pada tahun akademik 2019-2020 tidak ada penerimaan siswa baru dalam program ini, sejumlah besar siswa yang sebelumnya mendapat manfaat dari program ini terus menerima dukungan finansial.

Untuk memajukan kualitas pendidikan kejuruan dan teknik serta membuka lebih banyak peluang kerja dalam bidang ini, pemerintah telah memberlakukan pembayaran insentif untuk siswa yang belajar di sekolah kejuruan dan teknik swasta sejak tahun ajaran 2012-2013. Pada tahun ajaran 2016-2017, program insentif ini diperluas untuk siswa yang belajar di sekolah kejuruan dan teknik swasta di luar zona industri terorganisir.

Besaran insentif yang diberikan bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan. Program ini telah memberikan dukungan finansial kepada ribuan siswa yang berfokus pada pendidikan kejuruan dan teknik.

Selain itu, Turki juga memiliki program dukungan pendidikan khusus untuk siswa dengan beragam kebutuhan pendidikan. Program ini mencakup siswa dengan gangguan penglihatan, pendengaran, bahasa-bicara, suara, gangguan ortopedi, mental, autis, sosial dan emosional. Program ini memberikan bantuan pendidikan kepada siswa-siswa ini tanpa memandang status jaminan sosial mereka. Sejak tahun 2019, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengelola program ini dan telah memberikan manfaat kepada sejumlah besar siswa yang membutuhkan dukungan khusus ini dalam perjalanan pendidikan mereka. Total 415.785 siswa telah menerima manfaat dari bantuan pendidikan ini hingga saat ini. Semua upaya ini mencerminkan komitmen Turki untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan mengejar pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

"Paling Lengkap, Begini Sistem Pendidikan Turki!" 2021. *Al-Fatih Indonesian Student Center*. Link.

"Teachers and Education Staff." Link.

"WE INCREASED OUR INVESTMENT BUDGET BY 94 PERCENT AND BROUGHT IT TO 11.3 BILLION LIRAS." Link.

Abd. Rachman Assegaf, M.A (2003). Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat. *Gama Media*. Yogyakarta.

About DBE. (n.d.). Diambil 24 Oktober 2022, dari https://www.education.gov.za/AboutUs/AboutDBE.aspx

Academia.edu. (n.d.). Kurikulum di Negara Belanda. Diakses dari https://www.academia.edu/5553221/Kurikulum_di_Negara_Belanda.

Akyüz, Yahya. 1982. *Türk Eğitim Tarihi*. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Link PDF.

Anonym. (2021). *Pendidikan di Singapura*. Diakses online tanggal 5 November 2022, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Singapura#:~:text=Pendidikan%20dianggarkan%20sekitar%2020%20persen,tinggi%20untuk%20non%2Dwarga%20negara.

Anonym. (2022). Salary and Benefits. Diakses online tanggal 5 November 2022, dari https://www.careers.gov.sg/who-we-are/benefits

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA). (n.d.). *Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA)*. Diakses dari https://www.acara.edu.au/

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *E-book*.

Çalik, Muammer, and Gamze Çan. 2012. "An Overview of Formal and Non-Formal Health Education in Turkey." Dalam eds. Neil Taylor, Frances Quinn, Michael Littledyke, dan Richard K. Coll. Rotterdam: SensePublishers. Link.

Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). *Education in the United States*. Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_States.svg

Chan, Alevin. (2022). So You Want to go Into Teaching – Here's What You Should Expect. Diakses online tanggal 5 November 2022, dari https://www.singsaver.com.sg/blog/moe-teacher-salary-pay-scale-bonus-earnings-singapore

Cochran, J. (1986). *Education in Egypt*. London: Croom Helm.

Cracknell, A. P. (1968). Education in Singapore. *Physics Education, 3*(2), 71–76. https://doi.org/10.1088/0031-9120/3/2/305

Daftar Negara Bagian di Amerika Serikat. (n.d.). Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_bagian_di_Amerika_Serikat

Department of Basic Education Republic of South Africa. (2010). *Foundations for Learning Assessment Framework Grade R*. Diambil dari www.education.gov.za

Department of Basic Education Republic of South Africa. (2018). *Annual Report 2018/2019*.

Department of Basic Education Republic of South Africa. (n.d.). *Vote 16 Basic Education*. Diambil 26 November 2022, dari www.vulekamali.gov.za.

Department of Basic Education. (2020). *Department of Basic Education Strategic Plan 2020 - 2024*.

Department of Education, Skills and Employment. (n.d.). *Funding for Schools*. Diakses dari https://www.education.gov.au/funding-schools

Department of Higher Education and Training. (2022). *Department of Higher Education and Training Annual Performance Plan 2022/2023*. www.carrerhelp.org.za

Dharwanto. (2011). "Perbandingan Pendidikan di Mesir dengan di Indonesia". Tersedia di http://dharwanto.blogspot.com/2011/12/perbandingan-pendidikan-di-me-sir-dan-di.html. Diakses 3 Oktober 2016.

Dukha Yunitasari (2017). "Memetik Pelajaran dari Sistem Pendidikan Mesir untuk Indonesia". *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 12 No. 2 Oktober.

Dwi, Y. (2021). Enam Pengalaman Menarik tentang Menggunakan Childcare di Korea Selatan. *Phdmamaindonesia*. https://phdmamaindonesia.com/2021/12/21/enam-pengalaman-menarik-tentang-menggunakan-childcare-di-korea-selatan/

Education Policy Outlook Highlights: Turkey - OECD. (n.d.). Link.

Edukasi Sindonews. (n.d.). Diakses dari https://edukasi.sindonews.com

El-Koussy, A. (1985). "Egypt: System of Education". Dalam Husen, T. & T.N Postlethwaite. (1985). *Encyclopedia of Education*. 1st Ed. Oxford: Pergamon Press.

Ensiklopedi Nasional Indonesia. (1990). *Amerika Serikat*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

Erişen, Yavuz, Naciye Kaya, and Erdal Bay. 2022. "Etnopedagojik Bağlamda Kuzey Makedonya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarında Karakter Eğitimi." *Türkiye Eğitim Dergisi, 7*(1), 281–304.

Fatimatuzzuhroh. (2022). Sistem Pendidikan di Korea Selatan: Budaya Menjadi yang Terbaik. *Kumparan.Com*.

Forum Australian Primary Teachers in Facebook. (n.d.). Diakses dari Forum Australian Primary Teachers in Facebook

Gunaryadi. (n.d.). Email: g.yadi@sid.nl.

Hasil Interview dengan Warga Negara Korea Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia.

Initial Teacher Education. (n.d.). Diambil 26 November 2022, dari https://www.education.gov.za/Informationfor/Teachers/InitialTeacherEducation/tabid/416/Default.aspx

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA DI INDONESIA. (n.d.). Sistem Pendidikan. *Kedutaan Besar Republik Korea Di Indonesia*. Retrieved September 20, 2022, from https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2705/contents.do

Kencana, G. P., & Iswachyuni, N. (2019). Pendidikan PAUD di Korea Selatan. *Prezi*. https://prezi.com/p/iftjdywnxrjy/pendidikan-paud-di-korea-selatan/

Kim, Y. C. (2016). Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea. http://www.springer.com/series/14948

Literacy - the World Factbook. (n.d.). Diambil 23 Oktober 2022, dari https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/literacy/

Mee-Ryang, J., & Woojin, L. (2018). *Korean Education: Educational Thought, Systems and Content* (9th ed.). The Academy of Korea Selatan.

Ministry of Education, Culture and Science, Netherlands. (n.d.). Diakses dari https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science.

Ministry of Education. (2020). Government Policies and Goals. *Ministry of Education Republic of Korea*. http://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=0401&page=0401&s=english

National Recruitment Database. (n.d.). Diambil 26 November 2022, dari https://www.education.gov.za/Informationfor/Principals/NRD.aspx

Nur, A. S. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.

Nur, Agustiar Syah. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.

Önez Çetin, Zuhal. 2021. "The Contribution of Municipal Administrations to Non-Formal Education in Turkey: The Case of Gasmek." Dalam eds. Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman, dan Onur Kulaç. IGI Global, 525–43. Link.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). *Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education*. Diakses dari

http://www.oecd.org/edu/school/ECECDCN-Australia.pdf

OUCEA. (2022). *Programme For International Student Assessment (PISA) 2021*. *Department Of Education University Of Oxford*. https://www.education.ox.ac.uk/programme-for-international-student-assessment-pisa-2021/

Parlemen Australia. (2017). *Australian Education Amendment Act*. Diakses dari https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00003

Productivity Commission. (2015). 'Overview B Child care, education and training, attachment tables and data quality information'. Dalam *Report on Government Services 2015, Volume B, Section B.1*. Canberra: Australian Government Productivity Commission. Diakses dari http://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-government-services/2015/childcare-education-and-training

Rahman, M. R., & A'la, B. A. (2022). Inspirasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Telaah Sistem Penilaian Pembelajaran di Korea dan Belanda). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2260–2266. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2428

Ratriani, V. (2021). Awal Mula Perang Korea serta Sejarah Munculnya Korea Selatan dan Korea Utara. *Kontan.Co.Id*.

Schleicher, Andreas. (2019). *PISA 2018 (Insights and Interpretations)*. OECD. Diakses Online Tanggal 5 November 2022, dari https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf

Sembiring, Irvan Mustofa. 2022. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Turki." *Edu Global : Jurnal Pendidikan Islam 3*(2): 10–23.

So, K., & Kang, J. (2014). Curriculum Reform in Korea: Issues and Challenges for Twenty-first Century Learning. *Asia-Pacific Education Researcher*, 23(4), 795–803. https://doi.org/10.1007/s40299-013-0161-2

South Africa. Department of Basic Education. (2010). *Education Statistics in South Africa, 2009*. Dept. of Basic Education.

South Africa. Department of Basic Education. (n.d.). *The South African National Curriculum Framework for Children from Birth to Four: Comprehensive Version*.

Statistics South Africa. (2022). *General Household Survey*. www.statssa.gov.za, info@statssa.gov.za, Tel+27123108911.

Studying Korea. (2022). Education for Children. *Studying Korea*. https://www.studyinkorea.go.kr/en/overseas_info/allnew_educationforChildren.do

SUN Education Group. (2014). *Pendidikan di Singapura*. https://suneducationgroup.com/news-id/pendidikan-di-singapura/

Syarief, R. (2021). Sistem Pendidikan di Korea Selatan. *YouTube*.

Thut, I. N., & Adams, D. (2005). *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

United States Department of State. (2004). *The World Almanac 2000 and Book of Facts*. Washington, D.C.: National Center of Education Statistics.

Usinfo. (2004). [Title not provided]. (Informasi dari situs web yang tidak dapat diakses saat ini)

Website resmi egypt education. (http://www.mapsofworld.com/egypt/education/).

Website resmi Ministry of Education Egypt. (https://moe.gov.eg). Egypt.

Website resmi Ministry of Education Singapore: https://www.moe.gov.sg/secondary/courses/normal-academic

Website resmi Ministry of Finance Singapore (2021): https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2021/download/pdf/27-moe-2021.pdf

Website resmi Ministry of Finance Singapore (2022): https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2022/download/pdf/27-moe-2022.pdf

Website resmi The World Bank. (https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2020&locations=EG&most_recent_year_desc=false&start=1971&view=chart).

Website resmi The World Bank: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SE.XPD.TOTL.GB.ZS&country=SGP#

Wikipedia. (2022). Korea Selatan. *Wikipedia.Org*. https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan

Wulandari, T. (2008). "Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat". *Jurnal Istoria*, 1(1), Maret.

Yuni, W., Erlina, W., & Maghfur, M. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Singapura. *Jurnal Pendidikan*, 2(3), 413–420.

BIOADATA PENULIS



Hendri Gunawan, S.Pd., M.Pd., Lahir di Beng Muara Enim/03 Desember 1985 Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas PGRI Palembang jurasan Pendidikan Akuntansi kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Sriwijaya jurusan Teknologi Pendidikan saat ini penulis mengabdi sebagai salah satu Dosen di FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang penulis juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang



Pebri Hastuti, S.Pd., M.Pd. Menyelesaikan Pendidikan Strata-1 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2007, kemudian lulus pendidikan Strata-2 di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2013. Mengabdi sebagai dosen PNS pada Program Studi

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan semenjak tahun 2015. Saat ini sedang melanjutkan Studi Strata-3 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang.



Januardi, S.Pd., M.Si., Lahir di Bengkulu tahun 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas PGRI Palembang pada tahun 2004 kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Universitas Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2013. Penulis sebagai dosen pada Universitas PGRI Palembang sekaligus menduduki jabatan pada Yayasan Pendidikan Tinggi tersebut hingga sekarang. Selain itu, saat ini penulis juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang.



Depi Pramika, S.Pd., M.Si lahir di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1988. Menamatkan S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi dan S2 Program Studi Ilmu Ekonomi. Saat ini sedang menempuh pendidikan di FEB Universitas Negeri Malang (UM) pada Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi. Sampai saat ini aktif mengabdi di

Universitas PGRI Palembang dengan mengampuh beberapa mata kuliah akuntansi, ekonomi, dan statistik.



Chandra Kurniawan, S.E., M.Si lulusan Universitas Islam Bandung pada tahun 2002 dan lulusan S2 Universitas Sriwijaya pada tahun 2008. Saat ini sedang menempuh pendidikan di FEB Universitas Negeri Malang (UM) pada Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi. Sampai saat ini aktif mengabdi di Universitas PGRI Palembang dengan mengampuh beberapa mata kuliah diantaranya ekonomi mikro, ekonomi makro, kewirausahaan, manjemen bisnis, manjemen kepemimpinan dan lainnya.



Fahmi Ashari S. Sihaloho, S.Pd., M.Pd merupakan Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang Lahir di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 15 September 1994, saat ini sedang menjalani perkuliahan menempuh pendidikan program S3 Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.



Syamsul Arifin S.Pd., M.Pd lahir di Sampang Madura pada tanggal 25 april 1992. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi dan tamat pada tahun 2015 dengan masa studi 7 semester atau 3,5 tahun, pernah mendapatkan beasiswa PPA pada tahun 2012. Kemudian ia melanjutkan S2 di Universitas Negeri Surabaya jurusan Magister pendidikan ekonomi dan tamat pada tahun 2017. Dan sekarang sedang melanjutkan studi Doktoral di Universitas Negeri Malang melalui jalur Beasiswa Pendidikan Indonesia.

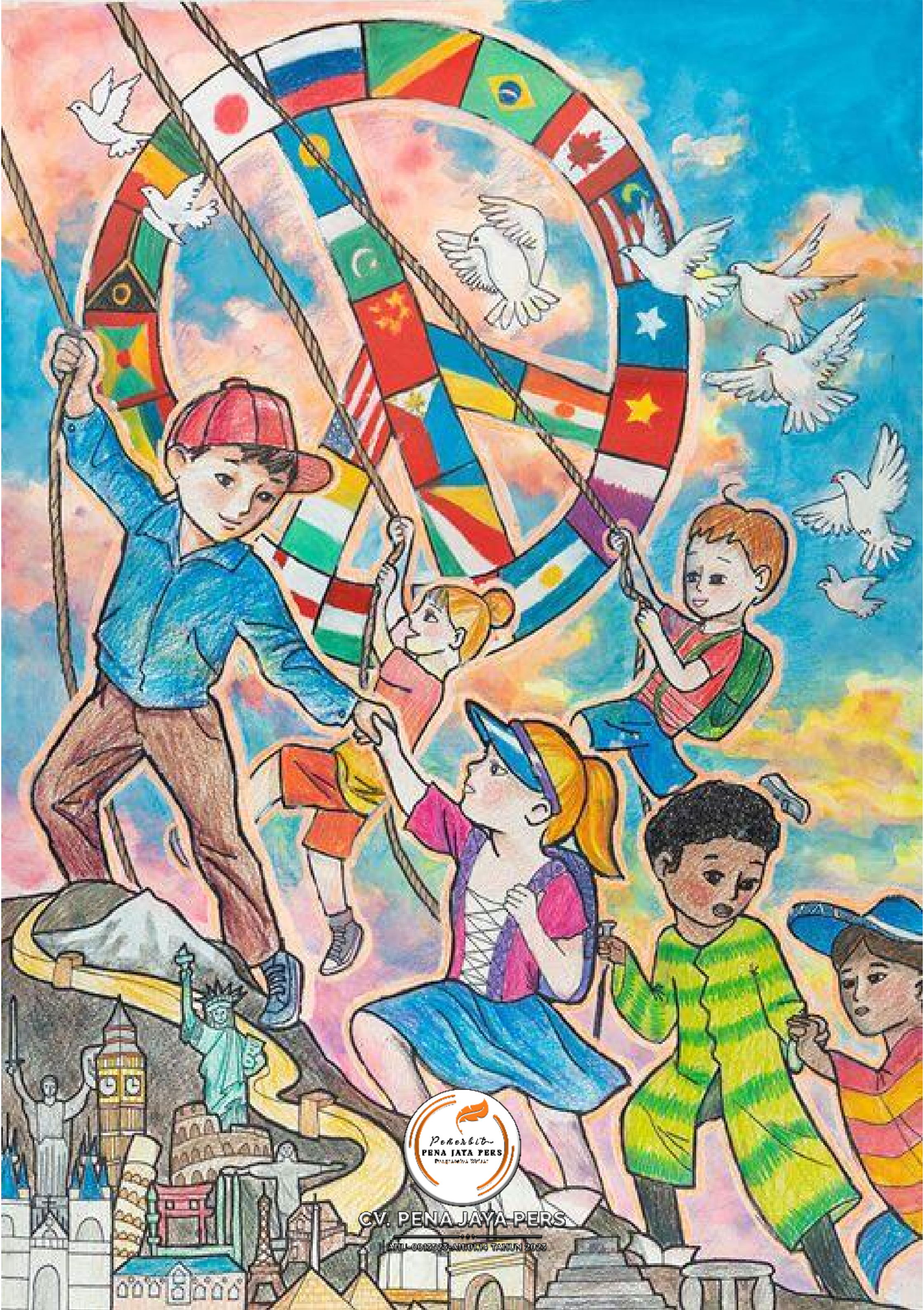


Ahmad Nabilul Maram, lahir di Surabaya pada 21 November 1994. Gelar S1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir diraih dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada 2016, S2 Ilmu Tafsir dan Ulum al-Qur’an dari International University of Africa Sudan pada 2020, dan S3 Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dari Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada 2023.


BHINNEKA TUNGGAL IKA

PESMA

AN-NUR


Penerbit
PENA JAYA PERS
CV. PENA JAYA PERS
AHU-0012523-AH.01.14 TAHUN 2023